



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT JENDERAL

DESEMBER 2022



**INSPEKTORAT JENDERAL**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu.

Namo Buddhaya, Salam Kebajikan

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan taufiq-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan tugas-tugas pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia TA. 2022 yang tertuang dalam "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Jenderal TA. 2022".

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas tugas dan fungsi yang merupakan tanggungjawab Inspektorat Jenderal terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus menjadi bahan masukan bagi seluruh jajaran di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka menentukan kebijakan lebih lanjut serta langkah perbaikan ke depan yang terprogram dan berkelanjutan. Adapun substansi materi yang disampaikan meliputi perencanaan sampai dengan capaian atas Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Jenderal TA. 2022 serta capaian lainnya sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal selaku unit pengawasan.

Ucapan terima kasih disampaikan atas kerja sama seluruh pihak terkait dengan harapan LKjIP Inspektorat Jenderal TA. 2022 dapat bermanfaat guna mewujudkan Inspektorat Jenderal yang lebih baik dalam mendukung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang semakin PASTI.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,

Om Shanti Shanti Shanti Om

Namo Buddhaya

Jakarta, 30 Desember 2022

Inspektur Jenderal



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAZILU

196511281991031002





## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Unit Inspektorat Jenderal Tahun 2022 disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran program tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Program Inspektorat Jenderal Tahun 2022, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Pimpinan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Jendral Nomor ITJ-01.PR.01.01 Tahun 2021 tanggal 19 Januari 2022 dimana RENSTRA Unit merupakan penjabaran dari RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020.

Inspektorat Jenderal telah menetapkan 11 Sasaran Strategis (SS) dengan mengusung konsep *Balance Score Card* yang mengakomodir perspektif pelanggan (3-SS dijabarkan dalam 6 Indikator Kinerja Utama), perspektif proses bisnis internal, (3-SS dijabarkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah) pembelajaran dan pertumbuhan. (5-SS dijabarkan dalam 5 Indikator Kinerja Kegiatan) serta perspektif keuangan (1-SS dijabarkan dalam 1 Indikator Kinerja Kegiatan). Pencapaian sasaran strategis dituangkan dalam Indikator Kinerja dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM 2022, dengan hasil pengukuran Perjanjian Kinerja Program Tahun 2022 tersebut sebagai berikut:



1. Pada Capaian IKU Opini Audit Eksternal atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan target WTP, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA.2021 Nomor 18a/HP/XIV/05/2022 tanggal 27 Mei 2022 Kementerian Hukum dan HAM untuk ke 11 Kali berturut-turut memperoleh WTP, sehingga capaian IKU-1 telah memenuhi target (100%);
2. Pada Capaian IKU Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan target Level 3 – Terdefinisi berdasarkan surat Menteri Hukum dan HAM ke BPKP Nomor SEK-PR.02.01-43 tanggal 14 Juni 2022 mengusulkan nilai Penilaian Mandiri dan PK sebesar, meliputi
  - a. Nilai Maturitas SPIP sebesar 4.437
  - b. Nilai MRI sebesar 3,99
  - c. Nilai IEPK sebesar 3,05Sampai dengan LKJIP ini disusun nilai SPIP Kementerian Hukum dan HAM masih dalam proses QA BPKP, dan berdasarkan hasil koordinasi dengan BPKP tanggal 22 Desember 2022 dihadiri Tim Penjamin Kualitas dan Tim PM Inspektorat Jenderal, Indeks SPIP Kementerian Hukum dan HAM tetap di Level 3 belum bisa sampai level 4. Namun demikian Target level 3 telah terpenuhi di Th.2022 ini. Dengan berdasar penilaian dari APIP tersebut maka capaian IKU-2 memenuhi target mencapai Level 3 – Terdefinisi (100%);
3. Pada Capaian IKU Persentasi Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal “BB” dengan target 93%, diperoleh presentase capaian 100%, berdasarkan Laporan Hasil Hasil Panel Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Nomor: ITJ.PW.03.01.V-53 tanggal 20 Oktober 2022, seluruh Unit Eselon I berhasil memperoleh nilai minimal BB dengan rincian :
  - 9 Unit Eselon I memperoleh Nilai “A”
  - 2 Unit Eselon I memperoleh Nilai “BB”Sehingga capaian IKU-3 telah memenuhi target 100%;
4. Pada Capaian IKU Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal target 93%, diperoleh persentase capaian 97,74%, berdasarkan Laporan Hasil Reviu LKP PMPRB Tahun 2022 Nomor: ITJ.OT.03.01-07 tanggal 26 April 2022, dengan menggunakan penilaian konversi seluruh Satuan Kerja Eselon I di lingkungan Kemenkumham berhasil memperoleh nilai PMPRB minimal 90.9% sehingga capaian IKU-4 belum memenuhi target;



5. Pada Capaian IKU Persentase Satuan Kerja yang Berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM dengan target 8%, dicapai nilai sebesar 12%. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1034 Tahun 2022 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tanggal 05 Desember 2022, disampaikan hasil 3 Satker di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM dari usulan Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 25 Satker, sehingga capaian IKU-4 telah memenuhi target.
6. Pada capaian IKU Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan target 80.00 dan realisasi capaian memperoleh indeks 95,28 (berdasarkan hasil survei Penilaian Persepsi Integritas yang telah dilaksanakan Inspektorat Jenderal tanggal 25 Juli s.d. 30 September 2022 ) sehingga target IKU ini telah tercapai 100%. Namun demikian bila dibandingkan dengan hasil Survei SPI-KPK Th.2022 Integritas Kementerian Hukum dan HAM memperoleh indeks sebesar 78,48. Indeks ini lebih tinggi dari rata-rata capaian nasional yaitu 71,94 merupakan hasil pengukuran oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kegiatan dan Capaian Tahun 2022 pada Inspektorat Jenderal dibiayai oleh DIPA Inspektorat Jenderal TA.2022 Induk Nomor: SP DIPA013.02.1.409241/2022 (DS: 8339-4622-7041-0076) dengan PAGU sebesar Rp76.877.008.000 telah mengalami 11 (sebelas) kali revisi DIPA sehingga pada Desember 2022 total DIPA Inspektorat Jenderal sebesar Rp60.225.500.000, 11 kali Tersi dalam upaya optimalisasi penyerapan anggaran dan efektifitas kegiatan sebagai berikut :

Jenis Belanja	Realisasi		Setelah Blokir		DP%	Keterangan
	DIPA	Realisasi	Sisa Anggaran	%		
Belanja Pegawai	Rp 19.147.385	Rp 18.661.599	Rp 485.786	97,46	100,00	Target realisasi bulan Desember tidak terpenuhi sebesar 2,54% dikarenakan anggaran yang sudah tidak bisa terserap di Tahun 2022
Belanja Barang	Rp 41.078.115	Rp 40.734.277	Rp 343.838	99,16	100,00	Target realisasi bulan Desember tidak terpenuhi sebesar 0,84% dikarenakan anggaran yang sudah tidak bisa terserap di Tahun 2022
Belanja Modal	Rp -	Rp -	Rp -	0,00	0,00	Di Blokir
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 60.225.500</b>	<b>Rp 59.395.876</b>	<b>Rp 829.624</b>	<b>98,62</b>	<b>100,00</b>	

Per Kegiatan	DIPA	Realisasi		Disbursement plan (%)	Selisih (%)	Unit Kerja	DIPA	Realisasi		Disbursement Plan (%)	Selisih (%)
		RP	%					Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6=(4-5)	1	2	3	4	5	6=(4-5)
Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	4.524.584	4.502.106	99,50	100,00	(0,50)	Bagian PPL	665.487	646.117	97,09	100,00	(2,91)
Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	4.788.899	4.769.515	99,60	100,00	(0,40)	Bagian Umum	28.834.363	28.140.509	97,59	100,00	(2,41)
Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	4.865.029	4.844.272	99,57	100,00	(0,43)	Kelompok Substansi Kepegawaian	935.676	931.392	99,54	100,00	(0,46)
Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	4.317.751	4.310.740	99,84	100,00	(0,16)	Kelompok Substansi Keuangan	248.108	246.445	99,33	100,00	(0,67)
Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	4.197.619	4.181.579	99,62	100,00	(0,38)	Kelompok Substansi Humas dan SIP	1.107.752	1.089.626	98,36	100,00	(1,64)
Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	5.740.232	5.733.575	99,88	100,00	(0,12)	Realisasi Total DIPA Itjen setelah dikurangi blokir/AA = 98,62% dengan DP 100%. Berdasarkan PER -5/PB/2022 Ambang batas selisih antara realisasi anggaran dan DP adalah 138%. Selisih nilai ambang batas akan mempengaruhi nilai IKPA dengan rincian sbb: 0% - 5% : skor 100 > 5% : skor 0-95					
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis (Sekretariat ITJEN)	31.791.386	31.054.089	97,68	100,00	(2,32)						
<b>JUMLAH</b>	<b>60.225.500</b>	<b>59.395.876</b>	<b>98,62</b>	<b>100,00</b>	<b>(1,38)</b>						

Penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal per 30 Desember 2022 sebesar Rp59.395.876.035 (98,62) dapat dikatakan optimal, disebabkan karena dilaksanakannya berbagai kegiatan pengawasan dan dukungan pengawasan dalam rangka pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja.

Demikian Laporan Kinerja (LKjIP) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan di level Program Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan kebijakan pimpinan dalam perumusan keputusan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal di masa mendatang.

*Kata Kunci : "Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Inspektorat Jenderal"*



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang/ Dasar Pembentukan Organisasi**

Dasar organisasi Inspektorat Jenderal tertuang dalam pasal 33 s.d. pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian kedudukan, tugas dan fungsi tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2021 tentang Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional.

### **B. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

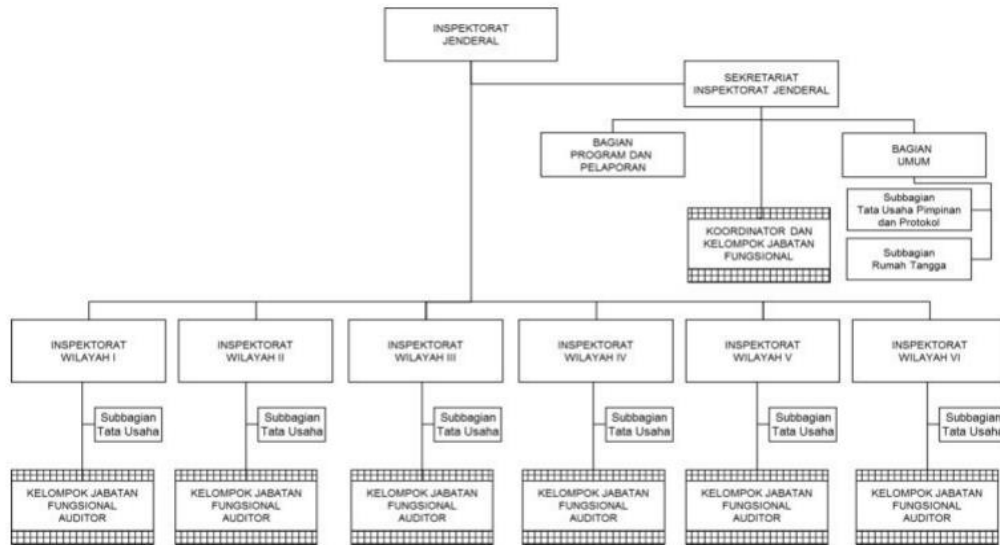
Berdasarkan pasal 318 s.d 358 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM pada BAB X, bahwa kedudukan Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, serta dipimpin oleh Inspektur Jenderal dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dengan menjalankan fungsinya:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 sebagai berikut:

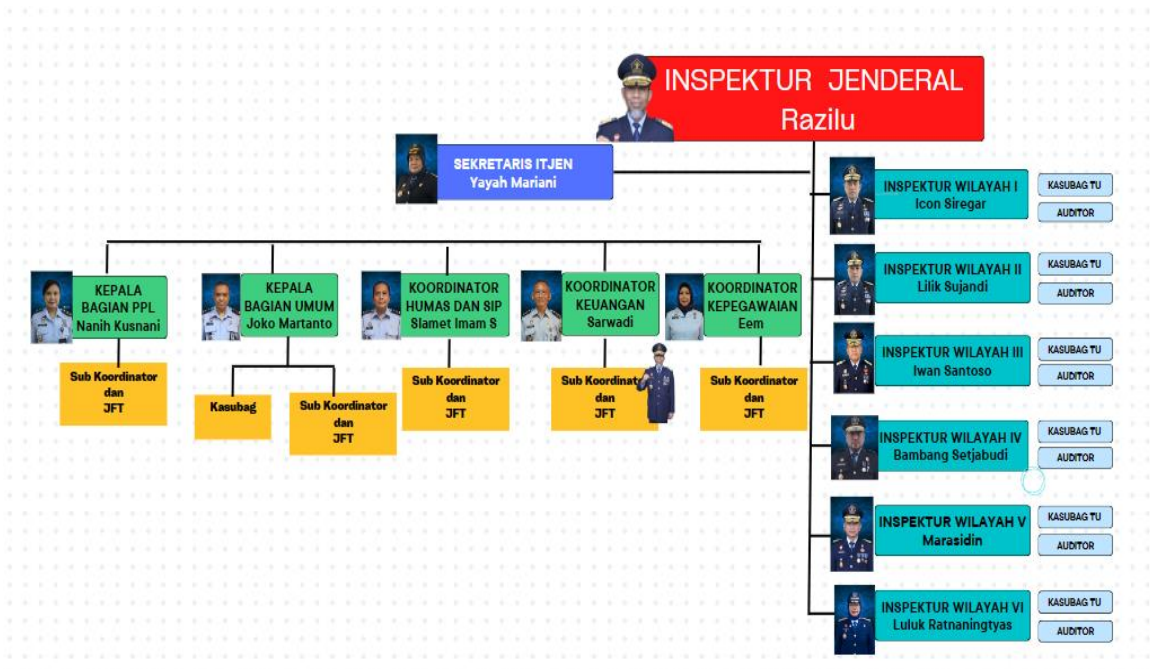
Gambar 1.1

(Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal)



Sedangkan Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 sebagai berikut :

Gambar 1.2  
(Struktur Organisasi dan Pejabat Inspektorat Jenderal)



1. Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Hukum dan HAM.





## 2. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari:

- a. Bagian Program dan Pelaporan;
- b. Bagian Umum;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 3. Inspektorat Wilayah I

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Inspektorat Jenderal, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Riau, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Wilayah I terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

## 4. Inspektorat Wilayah II

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Wilayah II terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

#### 5. Inspektorat Wilayah III

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, Jambi, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Wilayah III terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

#### 6. Inspektorat Wilayah IV

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Sekretariat Jenderal, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Data dan Teknologi Informasi, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Bali, dan Sulawesi Barat, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Wilayah IV terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha, dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

#### 7. Inspektorat Wilayah V

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Sumatera Selatan, D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Wilayah V terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

#### 8. Inspektorat Wilayah VI

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Politeknik Ilmu Pemasarakatan dan Politeknik Ilmu 2021, No.1365 -129-Imigrasi, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Papua Barat, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat Wilayah VI terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

### C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan ini disusun untuk menyampaikan informasi atas capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal pada Tahun Anggaran 2022 dan keselarasannya dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kementerian Hukum dan HAM;
2. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal kepada Pimpinan;
3. Laporan ini disusun sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan dan evaluasi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

### D. Aspek Strategis

Aspek strategis keberadaan Inspektorat Jenderal antara lain adanya tuntutan *good governance* dan *clean government*, sebagai penjamin mutu dan kualitas pelaksanaan tugas fungsi satuan kerja, mengawal opini Wajar Tanpa Pengecualian

atas Laporan Keuangan Kementerian, mengawal penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi, transformasi kelembagan, meningkatkan integritas pegawai dan sebagai Tim Penilai Internal dalam mengevaluasi Satuan Kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selain itu, Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Suap untuk mengawal Kebijakan Anti Penyuapan serta belum tersusunnya Penyusunan Peta Rawan Korupsi menjadi tantangan Inspektorat Jenderal.

### E. Isu Strategis/ Permasalahan Utama

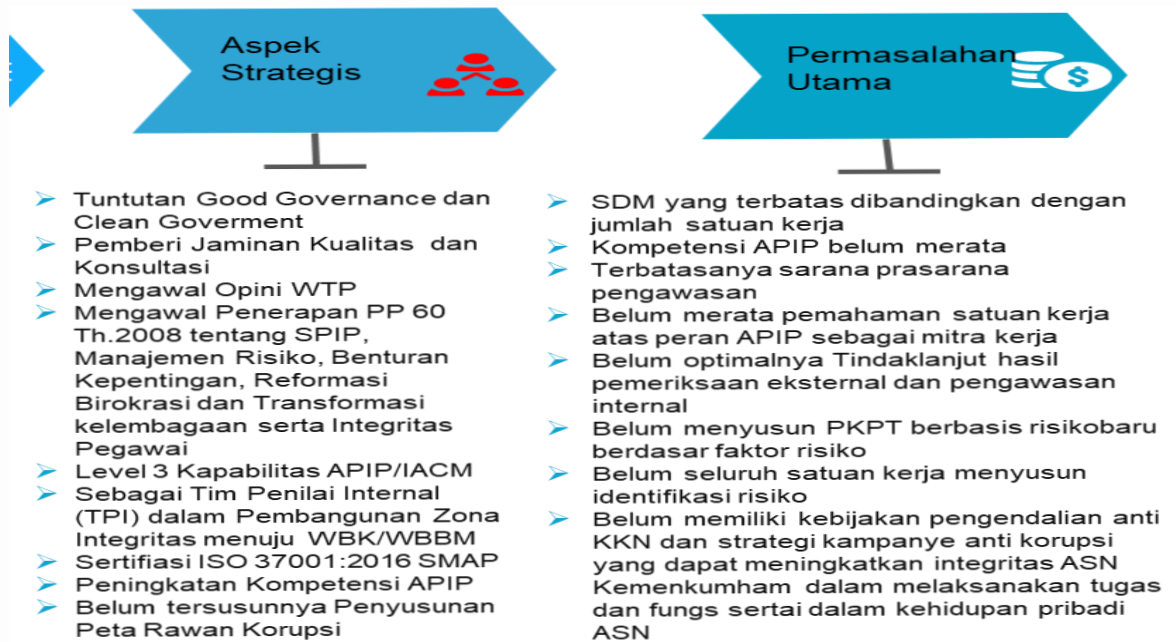
Dalam pelaksanaan pengawasan intern, permasalahan teridentifikasi dapat menghambat pencapaian kinerja yaitu terkait sumber daya manusia khususnya kekosongan pada Subkoordinator dan Pelaksana untuk mendukung tugas pada kegiatan dukungan manajemen dan teknis Unit Itjen serta masih kurangnya Auditor pada Inspektorat Wilayah dibandingkan dengan jumlah satuan kerja sebanyak 899 dan mengawal 33 (Tiga Puluh Tiga) Provinsi. Walaupun dalam 3 tahun terakhir telah mendapatkan penambahan formasi auditor dari KemenpanRB.

Gambar 1.3  
(Jumlah Satuan kerja dan Jumlah Auditor Inspektorat Jenderal)



Aspek strategis disandingkan dengan isu yang dapat teridentifikasi sebagai berikut:

Gambar 1.4  
(Aspek Strategis dan Isu Strategis/ Permasalahan Utama)



## F. Arah Kebijakan Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, merupakan unit kerja yang melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Inspektorat Jenderal bertugas melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Kegiatan pengawasan dilaksanakan untuk mengawal, mendorong, dan memastikan keagungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal sebagai pengawas intern berperan melaksanakan pengendalian intern, tujuan pengendalian intern adalah untuk melengkapi pengendalian ekstern yang dilaksanakan oleh lembaga lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta badan maupun lembaga lainnya dalam salah satu fungsi manajemen, bahwa kegiatan pengawasan di dalam suatu organisasi mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Arah dan Kebijakan Inspektorat Jenderal sebagai berikut :

Gambar 1.5

(Arah Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam Kemenkumham)



Untuk mengimplementasikan Kebijakan Pokok Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia, Inspektorat Jenderal menjalankan strategi pengawasan intern, meliputi:

1. Pengawasan intern berbasis risiko;
2. Peran inspektorat Jenderal sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*;
3. Optimalkan sistem pengendalian intern;
4. Pengelolaan Keuangan Kemenkumham yang akuntabel;
5. Implementasi kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungli;
6. Optimalkan efektifitas Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
7. Tingkatkan Sumber Daya Manusia APIP yang berkualitas, berintegritas dan professional;
8. Tingkatkan kualitas Sistem Informasi Manajemen Pengawasan;
9. Menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan Sertifikasi ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP);
10. Melakukan bimbingan teknis dan konsultasi penerapan Manajemen Risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR).



11. Mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Jenderal dengan SIMPEG di Biro Kepegawaian SETJEN, untuk *update* data kepegawaian dan data hukuman disiplin pegawai;
12. Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan komputer dengan berpedoman pada Surat Keputusan Inspektur Jenderal ITJ-11.OT.02.02 Tahun 2022

Selain hal tersebut di Tahun 2022 Inspektorat Jenderal menetapkan Panca Program dengan Surat keputusan Inspektur Jenderal nomor ITJ-43.OT.02.01 Tahun 2021 tanggal 12 November 2021, sebagai berikut :

Gambar 1.6  
(Panca Program Unggulan Inspektorat Jenderal Tahun 2022)



## G. Sumber Daya Manusia

*Bezetting* keadaan pegawai Inspektorat Jenderal sampai dengan Semester II Tahun 2022 adalah sebanyak **277** orang, dengan rincian pada halaman berikut:

Gambar 1.7  
(Rincian Total pegawai per Jabatan)

Rincian Pegawai Itjen		
Pimpinan Tinggi Madya	1	Orang
Pimpinan Tinggi Pratama	6	Orang
Pejabat Administrator	2	Orang
Pejabat Pengawas	8	Orang
Pejabat Fungsional Auditor	165	Orang
Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian	8	Orang
Pejabat Fungsional Arsiparis	6	Orang
Pejabat Fungsional Pranata Komputer	4	Orang
Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN	4	Orang
Pejabat Fungsional Analis Kebijakan	1	Orang
Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat	2	Orang
Pejabat Fungsional Analis Anggaran	1	Orang
Pejabat Fungsional Analis Hukum	4	Orang
Pejabat Fungsional Perencana	1	Orang
Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa	3	Orang
Pejabat Pelaksana	57	Orang
CPNS	4	Orang
<b>Total</b>	<b>277</b>	<b>Orang</b>

Rincian Jabatan Fungsional Auditor :		
Auditor Utama	1	Orang
Auditor Madya	34	Orang
Auditor Muda	29	Orang
Auditor Pertama	97	Orang
CPNS dengan Jabatan Auditor Tahun 2017	1	Orang
Auditor Penyelia	1	Orang
Auditor Pelaksana Lanjutan	2	Orang
Auditor Pelaksana	1	Orang
<b>Jumlah Auditor</b>	<b>166</b>	<b>Orang</b>

Rincian Auditor			
1	Auditor Yang Sudah Pengangkatan	165	Orang
2	PNS dengan Formasi CPNS Jabatan Auditor (Belum Dilantik)	1	Orang
<b>Total</b>		<b>166</b>	<b>Orang</b>





Gambar 1.8  
(Rincian Jabatan Fungsional dan Jenjang Pangkat Pegawai)

<b>Rincian Jabatan Fungsional Lainnya :</b>			
1	Analisis Kepegawaian Madya	1	Orang
2	Analisis Kepegawaian Muda	4	Orang
3	Analisis Kepegawaian Pertama	3	Orang
4	Arsiparis Muda	2	Orang
5	Arsiparis Pertama	4	Orang
6	Pranata Komputer Madya	1	Orang
7	Pranata Komputer Muda	1	Orang
8	Pranata Komputer Pertama	2	Orang
9	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Madya	1	Orang
10	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda	3	Orang
11	Analisis Kebijakan Muda	1	Orang
12	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	1	Orang
13	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	1	Orang
14	Analisis Anggaran Muda	1	Orang
15	Perencana Muda	1	Orang
16	Analisis Hukum Pertama	4	Orang
17	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	3	Orang
18	CPNS Pranata Komputer	1	Orang
19	CPNS Analisis Hukum	1	Orang
20	CPNS Analisis Anggaran	1	Orang
<b>Jumlah JFT Lainnya</b>		<b>37</b>	<b>Orang</b>

Gambar 1.9  
(Rincian pegawai per jenis pangkat)

<b>RINCIAN PANGKAT PEGAWAI ITJEN</b>		
Pangkat	Jumlah	
Pembina Utama (IVe)	1	Orang
Pembina Utama Madya (IVd)	5	Orang
Pembina Utama Muda (IVc)	9	Orang
Pembina Tingkat I (IVb)	15	Orang
Pembina (IVa)	20	Orang
Penata Tingkat I (IIIId)	28	Orang
Penata (IIIc)	35	Orang
Penata Muda Tingkat I (IIIb)	67	Orang
Penata Muda (IIIa)	90	Orang
Pengatur Tingkat I (IIId)	0	Orang
Pengatur (IIc)	6	Orang
Pengatur Muda Tingkat I (IIb)	1	Orang
Pengatur Muda (IIa)	0	Orang
<b>TOTAL</b>	<b>277</b>	<b>Orang</b>

Gambar 1.10  
(Rincian pegawai per formasi)

Pegawai Inspektorat Jenderal Per Wilayah/Bagian		
Wilayah / Bagian	Jumlah	
Ijen dan Ses. Itjen	2	Orang
Inspektorat Wilayah I	35	Orang
Inspektorat Wilayah II	30	Orang
Inspektorat Wilayah III	32	Orang
Inspektorat Wilayah IV	29	Orang
Inspektorat Wilayah V	28	Orang
Inspektorat Wilayah VI	33	Orang
Kepegawaian	17	Orang
Program dan Pelaporan	10	Orang
Keuangan	16	Orang
Humas dan Sistem Informasi Pengawasan	20	Orang
Umum	21	Orang
CPNS	4	Orang
<b>Total</b>	<b>277</b>	<b>Orang</b>

## H. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Palaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021-2024, yaitu sebagai berikut:

**KATA PENGANTAR** Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022.

**IKHTISAR EKSEKUTIF** Menyajikan ringkasan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang tertuang dalam Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022.

### Bab I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, gambaran umum struktur organisasi dan sistematika penulisan.



## **Bab II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022**

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022, meliputi Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

## **Bab III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menguraikan analisis pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis, termasuk di dalamnya menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil.

## **Bab IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan di masa yang akan datang.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal

Penyajian Perencanaan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022 tertuang dalam Rencana Stratgis (RENSTRA) Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan dengan Surat keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-01.PR.01.01 Tahun 2021 tanggal 19 Januari 2021 dimana RENSTRA Unit merupakan penjabaran dari RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020, Perencanaan strategis yang tertuang meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indkator Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Startegi juga tertera dalam dokumen anggaran seperti Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) yang kami jadikan dasar untuk menyusun LKJIP Inspektorat Jenderal Tahun 2022.

Gambar 2.1  
(Dasar Perencanaan Kinerja)



Sebagai unit pengawasan intern Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Inspektorat Jenderal terus berupaya melakukan langkah-langkah perbaikan dalam rangka memberi nilai tambah bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sejak Tahun 2021 Inspektorat Jenderal mengemban Program Dukungan Manajemen bersama dengan Sekretariat Jenderal, Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Balitbang)/ Badan Strategi Kebijakan serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia (BPSDM).

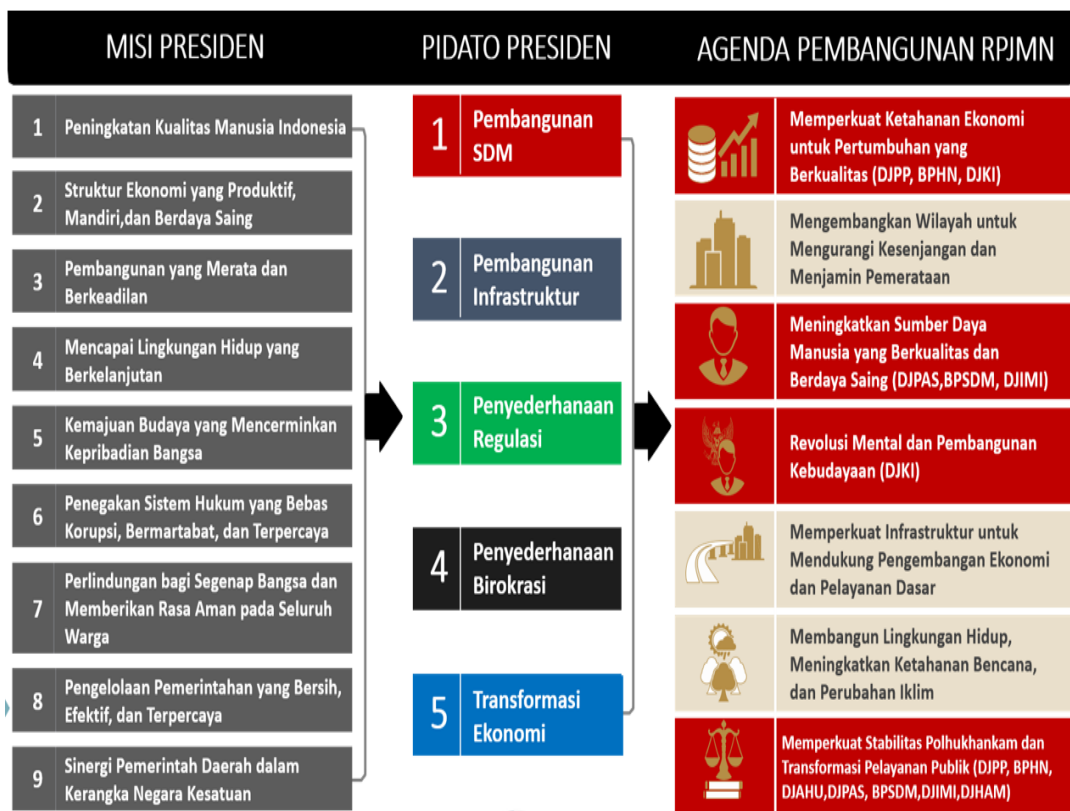


1. Visi, Misi dan Tujuan

Agenda Pembangunan RPJMN ke IV Tahun 2020 s.d. 2024, ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, dengan menetapkan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia pada halaman berikut:

Gambar 2.2  
(Visi dan Misi Presiden-RI)

**VISI PRESIDEN**  
**TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN**  
**BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG**



Visi Presiden “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, menjadi visi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dengan nomenklatur yang sama, hanya kalimat depan yang membedakan nama Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, sebagaimana Visi Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian Visi Presiden tersebut diturunkan menjadi 9 Misi dengan 5 agenda prioritas utama.

Gambar 2.3  
(Misi dan Misi kementerian Hukum dan HAM)




## KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

**VISI**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam pelaksanaan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang bedaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong".

**MISI**

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan; dan
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Visi Kementerian Hukum dan HAM menjadi Misi seluruh Unit Eselon I, sedangkan Misi diturunkan dan menjadi tanggung jawab pelaksanaannya oleh 11 Unit Eselon I, yaitu :

- a) Misi Pertama menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Badan Pengembangan Hukum Nasional (BPHN);
- b) Misi ke-Dua menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
- c) Misi ke-Tiga menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
- d) Misi ke-Empat menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
- e) Misi ke-Lima menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan BPHN;
- f) Misi ke-Enam menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi;
- g) Misi ke-Tujuh menjadi tanggungjawab Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Balitbang serta BPSDM.



Sehingga Visi dan Misi Inspektorat Jenderal sebagai berikut :

Gambar 2.4  
(Visi dan Misi Inspektorat Jenderal)

**INSPEKTORAT JENDERAL**

**VISI**  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam pelakanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang bedaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong".

**MISI**  
Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

Tujuan Inspektorat Jenderal menginduk pada tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7, yaitu Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

Gambar 2.5  
(Tujuan Kementerian Hukum dan HAM)



Sasaran Tujuan Kementerian Hukum dan HAM dilakukan penyesuaian sebagai tindak lanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas SAKIP Kementerian Hukum dan HAM penyesuaian tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.OT.01.01 Tahun 2022 tanggal 30 September 2022 tentang Penyesuaian Tujuan dan Sasaran Strategis RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.OT.01.01 Tahun 2022 tanggal 30 September 2022 tentang Penyesuaian Tujuan dan Sasaran Strategis RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM bahwa Inspektoraat Jenderal mengemban Misi ke-7, Tujuan ke-9 dan Sasaran ke-10, sebagai berikut :

Gambar 2.6  
Gambar matrik/matriks penyesuaian tujuan dan sasaran

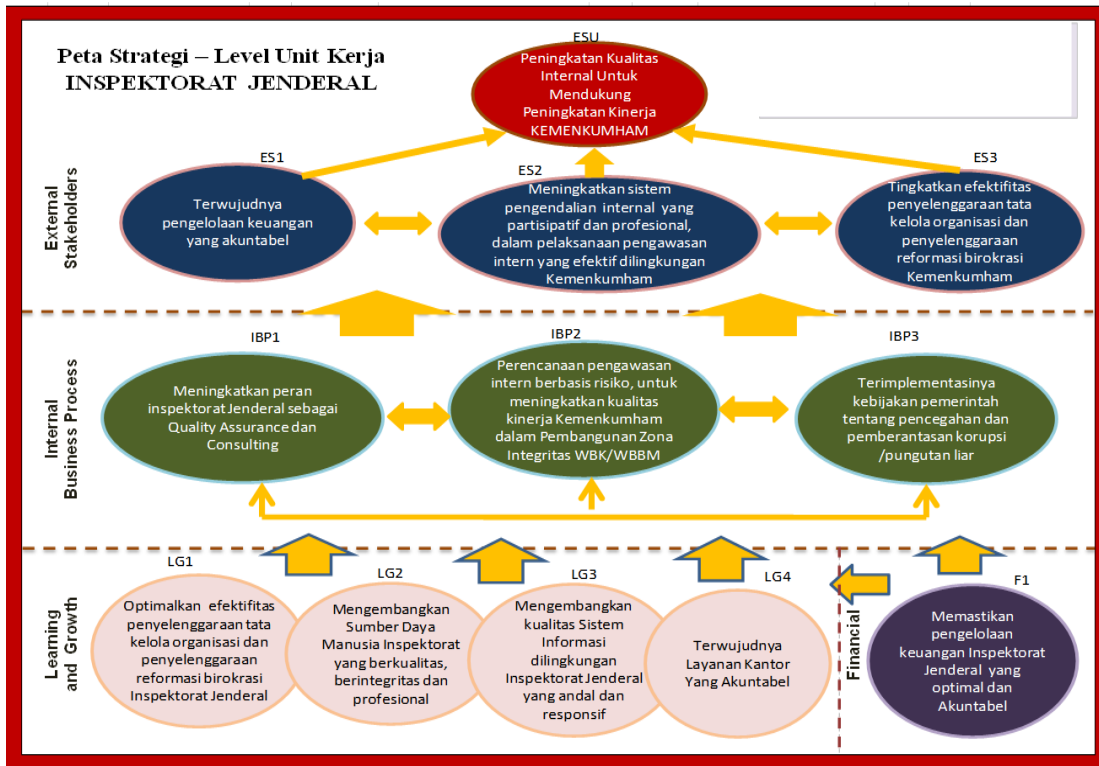
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Penanggung Jawab
No.7 Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang baik melalui reformasi Birokrasi dan Kelembagaan	No.9 Terbangunnya Budaya kerja Kemenkumham yang berintegritas, efektif dan efisien	01- Nilai Reformasi Birokrasi	Membangun budaya kerja Kemenkumham yang berintegritas, efektif dan efisien	02- Nilai Reformasi Birokrasi	SETJEN
		03- Indeks Maturitas SPIP		04- Indeks Maturitas SPIP	SETJEN
		05- Opini atas Laporan Keuangan		06- Opini atas Laporan Keuangan	SETJEN
		07- Indeks Integritas		08- Indeks Integritas	SETJEN dan ITJEN
		09- Indeks Kualitas Kebijakan		10- Indeks Kualitas Kebijakan	Badan Strategi Kebijakan/Balitbang Hukum dan HAM

Inspektoraat Jenderal bertanggungjawab pada Sasaran Strategis (SS) No.8 yaitu Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien. Pencapaian SS-8 tersebut dijabarkan dalam Peta Strategis Inspektoraat Jenderal sebagai berikut :





Gambar 2.7  
(Peta Strategis Inspektorat Jenderal)



Sumber data: Penyusunan Konsep Renstra Itjen, Aston Hotel 25 s.d 28 Juli 2020 dan update 13 Nov 2020 sesuaikan renstra Kemenkumham

## 2. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Stranas dituangkan dalam Indikator Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.1

(Cascading IKU Inspektorat Jenderal TA. 2022 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal Tahun 2022)

Sasaran Program Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	1. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM	WTP
Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	2. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	Level 3 - Terdefinisi

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis Teknologi Informasi	3. Persentasi Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB"	93 %
	4. Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 33,5	93 %
	5. Persentase Satuan Kerja yang Berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM	8 %
	6. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	80,0

Tabel 2.2

(Alur Keterkaitan antara sasaran RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM serta Visi Misi dan Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal)

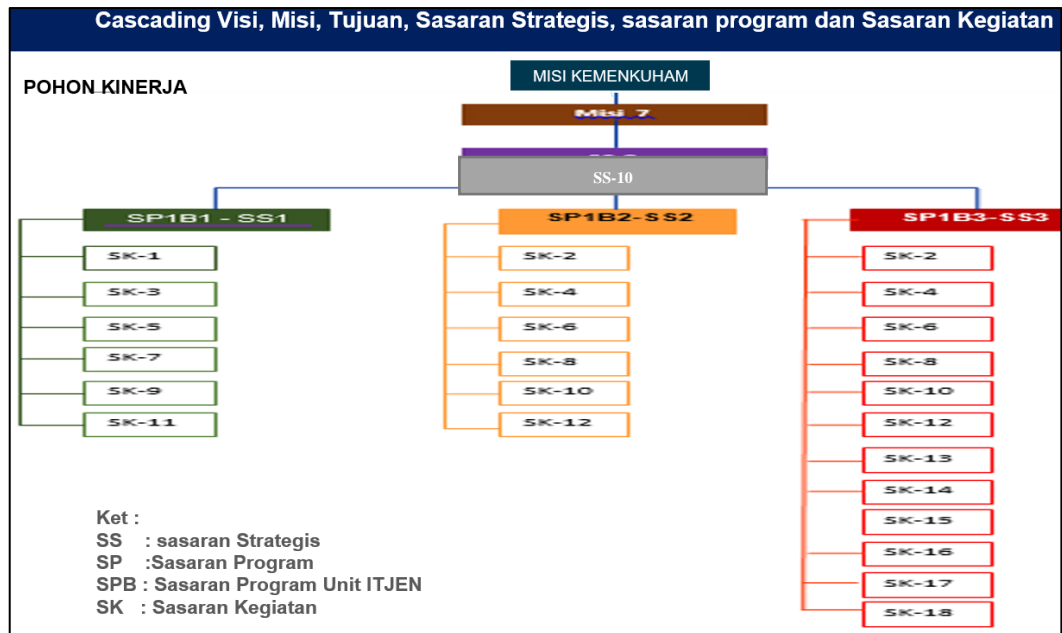
SASARAN RPJMN 2020-2024	PRESDEN / KEMENKUMHAM / ITJEN	MISI KUMHAM / ITJEN	TUJUAN KEMKUMHAM / ITJEN	SASARAN KEMKUMHAM / ITJEN	INDIKATOR SASARAN KEMKUMHAM / ITJEN	INDIKATOR SASARAN ITJEN (SASARAN PROGRAM)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT JENDERAL
Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	Nomer 8: Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	Nomer 7 : Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Nomer 7 : Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang baik melalui reformasi Birokrasi dan Kelembagaan	SS8 : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas	SSU : Peningkatan kualitas pengawasan internal untuk mendukung peningkatan kinerja KEMENKUMHAM  SP1B1 - SS1: Terwujudnya pengelolaan Keuangan yang akuntabel  SP1B2 - SS2: Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal yang Partisipatif dan Profesional dalam Pelaksanaan Pengawasan Intern yang Efektif di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM  SP1B3 - SS3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	IKU-1 : Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham  IKU-2: Nilai Maturitas SPIP Kemenkumham  IKU-3 : Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB" IKU-4 : Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90 IKU-5: Persentase Satuan Kerja Yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM IKU-6 : Indeks Persepsi Integritas Kemenkumham

### 3. Pohon Kinerja

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa Inspektorat Jenderal mengemban Program Dukungan Manajemen bersama dengan Sekretariat Jenderal, Balitbang, serta BPSDM. Selanjutnya mengemban Visi yang sama dengan Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan mengemban Misi No.7, Tujuan No.9 dan Sasaran Strategis No.10, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keterkaitan tersebut dituangkan dalam Pohon Kinerja pada halaman berikut:



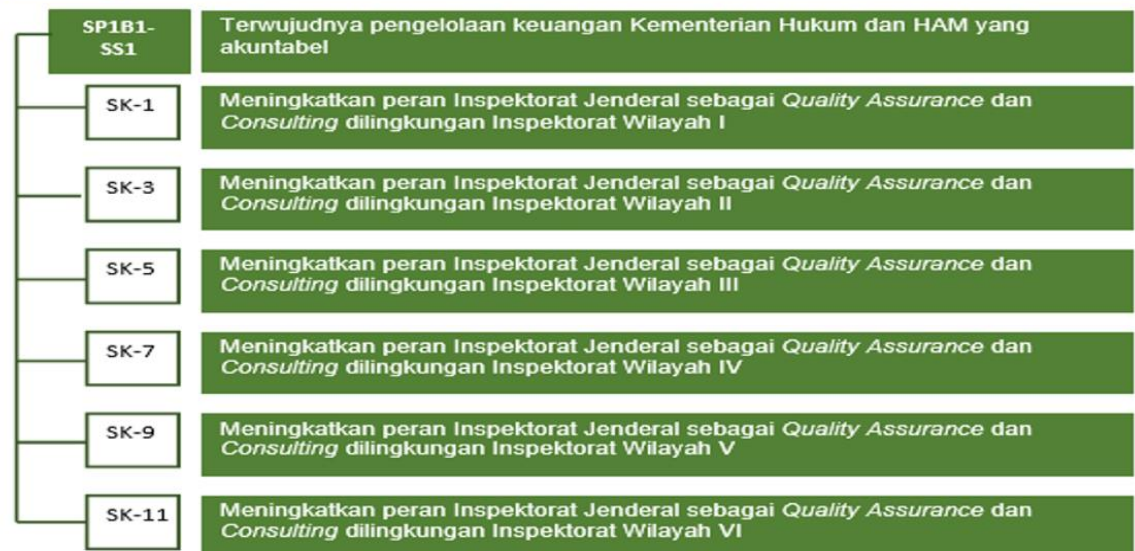
Gambar 2.8  
(Pohon Kinerja Inspektorat Jenderal)



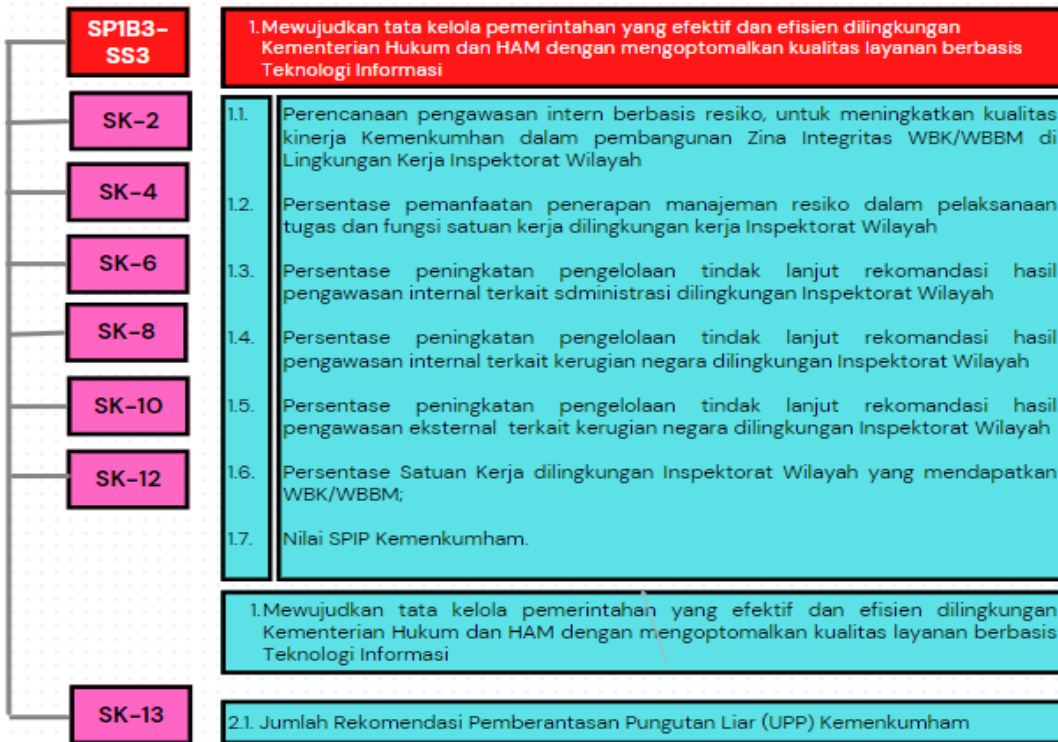
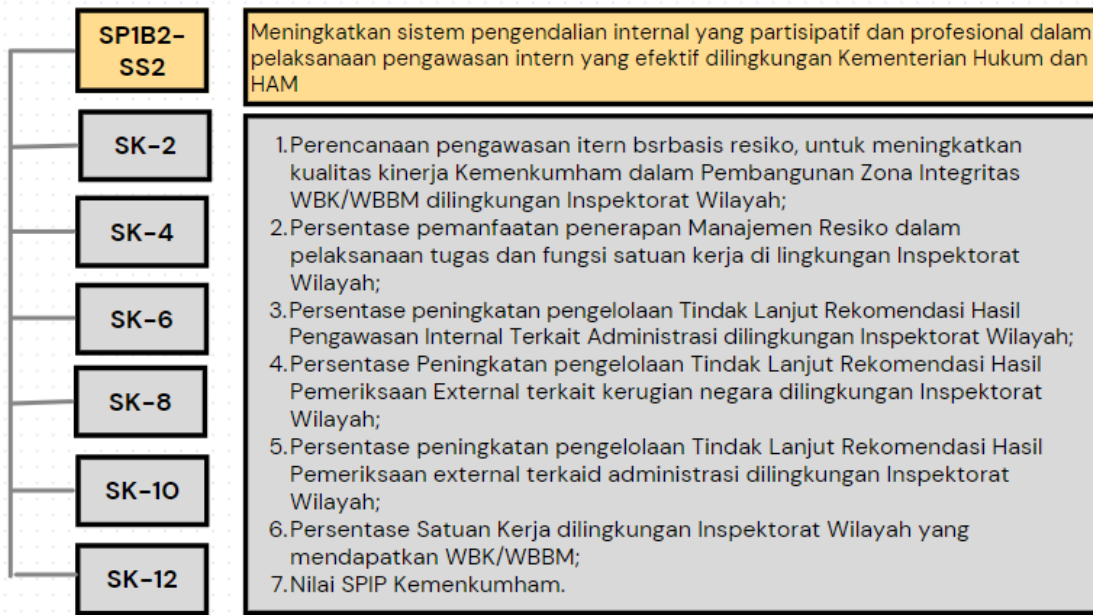
**2 Cascading Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, sasaran program dan Sasaran Kegiatan**

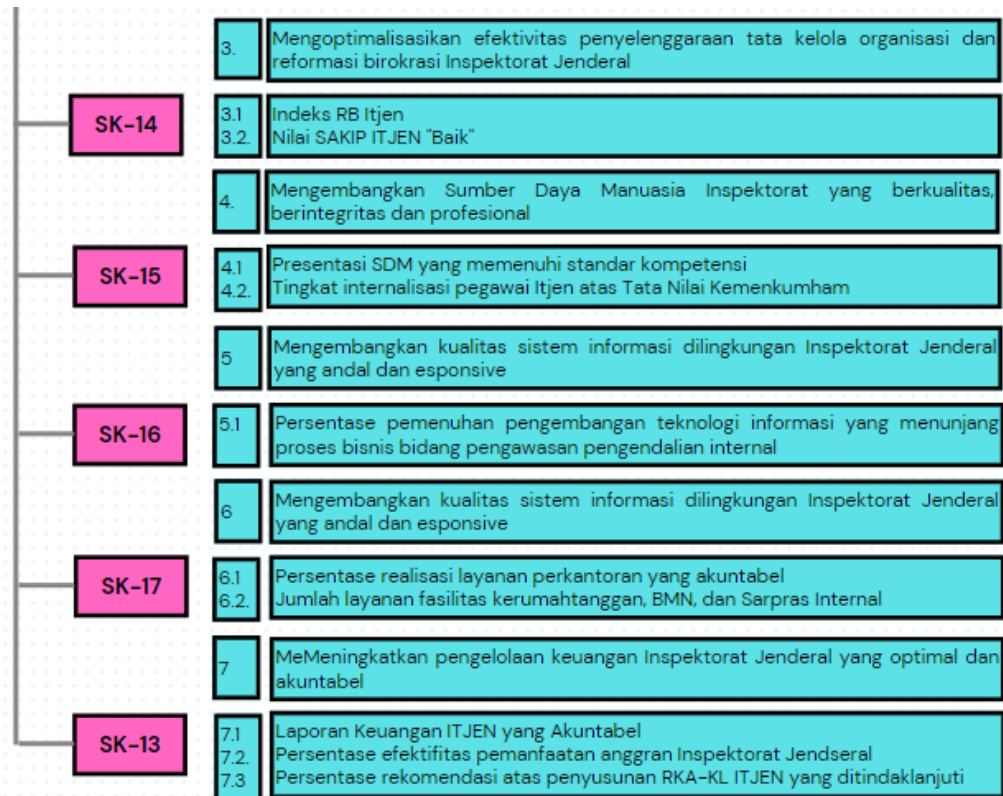
**Misi 7** Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan

**SS-8** Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien



**3. Cascading Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan**





#### 4. Strategi

##### a) Strategi Pengawasan

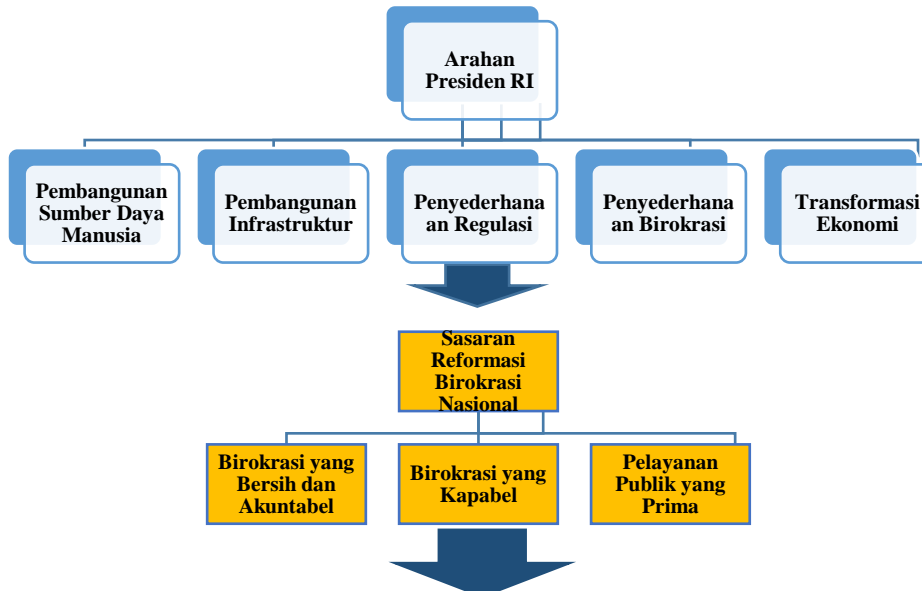
Area-area berisiko tinggi yang membutuhkan pengawasan intensif yaitu terkait pendanaan untuk penanganan bencana, pengadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaan darurat. Inspektorat Jenderal secara kolaboratif dan intensif melakukan pengawasan intern atas area-area berisiko tinggi yaitu dengan mengidentifikasi titik risiko proses penanganan bencana dan memastikan efektivitas pengendalian yang ada, melakukan kegiatan monitoring terkait kepatuhan dan efektivitas, meningkatkan peran *advice* dan *insight* terutama terkait tata kelola, risiko, dan pengendalian, serta terus melakukan peningkatan dan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan pengawasan intern. Kebijakan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- Mengoptimalkan Titor Virtual untuk dengan Satuan Kerja sebagai sarana konsultasi/pembinaan serta kegiatan lainnya dengan unit Kemenkumham maupun instansi terkait lainnya.
- Melaksanakan program unggulan secara optimal
- Rapat pimpinan sebagai wujud komitmen pimpinan atas kinerja ITJEN.

b) Kebijakan Reformasi Birokrasi

Kebijakan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal menginduk pada Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

Gambar 2.9  
(Kebijakan Reformasi Birokrasi)



KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
PROGRAM RB	KEBIJAKAN KEMENKUMHAM/INSPEKTORAT JENDERAL	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
MANAJEMEN PERUBAHAN	1. Penguatan terhadap penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi	1. Meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi
	2. Peningkatan Internalisasi sistem nilai dan integritas Reformasi Birokrasi	2. Meningkatkan perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN Inspektorat Jenderal 3. Penerapan manajemen risiko terhadap kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal
DEREGULASI KEBIJAKAN	3. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	4. Menata berbagai peraturan yang diprakarsai/disusun oleh Inspektorat Jenderal
PENATAAN ORGANISASI	4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang "good government"	5. Menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan organisasi
PENATAAN TATALAKSANA	5. Terwujudnya proses bisnis yang melayani seluruh stakeholder dalam dan luar dengan sebaik-baiknya	6. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)



KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
PROGRAM RB	KEBIJAKAN KEMENKUMHAM/INSPEKTORAT JENDERAL	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
	6. Peningkatan penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e-gov	7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui peningkatan kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal
PENATAAN SDM APARATUR	7. Meningkatnya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing	8. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Inspektorat Jenderal
		9. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Inspektorat Jenderal
		10. Meningkatkan disiplin SDM aparatur di lingkungan Inspektorat Jenderal
		11. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur di lingkungan Inspektorat Jenderal
		12. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di lingkungan Inspektorat Jenderal
PENGUATAN PENGAWASAN	8. Opini WTP dan tingkat kematangan implementasi SPIP	13. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Inspektorat Jenderal
		14. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Inspektorat Jenderal
		15. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Inspektorat Jenderal
PENGUATAN AKUNTABILITAS	9. Peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi	16. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal
	10. Peningkatan mutu perumusan, pengelolaan dan evaluasi kebijakan/program dan anggaran di lingkungan Kemenkumham	17. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal
PENINGKATAN KUALITAS	11. Peningkatan kapasitas manajemen	18. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan

KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
PROGRAM RB	KEBIJAKAN KEMENKUMHAM/INSPEKTORAT JENDERAL	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
PELAYANAN PUBLIK	penyelenggaraan pelayanan publik	lebih mudah dijangkau) di lingkungan Inspektorat Jenderal
		19. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional di lingkungan Inspektorat Jenderal
		20. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Inspektorat Jenderal

## B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal

Dalam upaya langkah nyata untuk mencapai Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan target yang telah ditetapkan tersebut ditetapkan kembali dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani bersama oleh Pimpinan, meliputi Perjanjian Kinerja Eselon I ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Inspektur Jenderal, kemudian terjadi perubahan Perjanjian Kinerja pada tanggal 1 September 2022. Berikut sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.3

(Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022)

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akuntabel	1. Opini audit eksternal atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	WTP
Meningkatkan sistem pengendalian intern yang partisipatif dan professional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Level 3 – Terdefinisi





Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan tata kelola organisasi dan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3. Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "Baik"	93%
	4. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	93%
	5. Persentase Satuan Kerja yang berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM	8%
	6. Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80.0

Program : Anggaran :  
 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM **Rp. 76.877.008.000,-**

Dengan Rincian anggaran per kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.4  
 (Rincian PAGU Anggaran Per Kegiatan Berdasarkan DIPA Induk)

No	Kegiatan	Anggaran
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 76.877.008.000,-</b>
1.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	Rp. 5.599.719.000,-
2.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	Rp. 5.599.719.000,-
3.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	Rp. 5.599.719.000,-
4.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	Rp. 5.599.719.000,-
5.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	Rp. 5.599.719.000,-
6.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	Rp. 10.107.977.000,-
7.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 38.770.436.000,-

Sumber data : DIPA ITJEN Th.2022 Nomor DIPA-013.02-0/2022 Tanggal 17 November 2021

Digital Stamp Nomor DS:2013-3630-7505-7104, dilakukan blokir Automatic Adjustment sebesar Rp19.240.569.000,-

Namun demikian pagu Inspektorat Jenderal setelah dilakukan 11 (sebelas) kali revisi pada Tahun Anggaran 2022 yang menyebabkan total pagu Inspektorat Jenderal menjadi sebesar Rp60.225.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5

(Rincian PAGU Anggaran Per Kegiatan Berdasarkan Revisi XI)

No	Kegiatan	Anggaran
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	Rp60.225.500.000,-
1.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	Rp 4.524.584.000,-
2.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	Rp 4.788.899.000,-
3.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	Rp 4.865.029.000,-
4.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	Rp 4.317.751.000,-
5.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	Rp 4.197.619.000,-
6.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	Rp 5.740.232.000,-
7.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM	Rp31.791.386.000,-

Sumber data : DIPA Itjen Tahun 2022 Nomor DIPA-013.02.1.409241/2022 Tanggal 22 Desember 2022

Digital Stamp Nomor DS:7558-6297-2401-7829



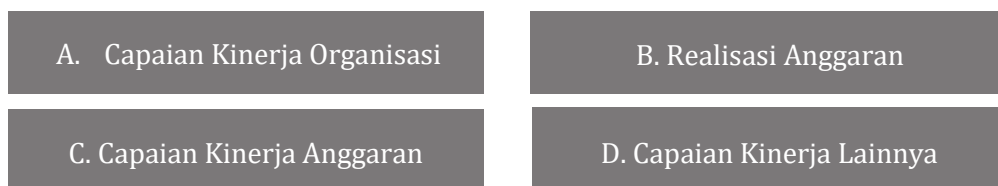
### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam LKjIP disusun meliputi data capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, capaian kinerja anggaran dan capaian kinerja lainnya. Penyajian realisasi anggaran menggunakan data yang bersumber dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang di *cut-off* per tanggal 30 Desember 2022 dikarenakan Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal *unaudited* belum selesai disusun (sumber data Bagian keuangan Inspektorat Jenderal).

Gambar 3.1

(Susunan Akuntabilitas Kinerja)



#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada capaian kinerja organisasi menguraikan capaian kinerja organisasi setiap indikator kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja (PK) disertai penjelasan dan analisis capaian. Sebelum menjelaskan capaian kinerja Tahun 2022, terlebih dahulu terlampir capaian Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021, sebagai berikut :

Gambar 3.2

(Capaian Kinerja Tahun 2021 Inspektorat Jenderal)



Sampai dengan Desember 2022, capaian kinerja Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022, pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

Gambar 3.3  
(Capaian Kinerja Tahun 2022 Inspektorat Jenderal)



Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU), 5 (lima) IKU diantaranya tercapai 100% atau melebihi target, sedangkan 1 (satu) IKU belum tercapai yaitu Persentase Satker dengan Nilai RB "Baik". Hal tersebut dikarenakan masih terdapat 1 (satu) unit utama yang memperoleh nilai RB dibawah 33,5 sehingga capaian tersebut adalah 90,9% dari target 93%.

**A. 1. Capaian dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama-1**

**1. Capaian Indikator Kinerja Utama-1:**

**Opini Audit Eksternal atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Gambar 3.4

(Capaian IKU-1 Inspektorat Jenderal Tahun 2022)



Sesuai dengan amanat pada Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.<sup>1</sup> Opini dimaksud dinyatakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia sebagai Auditor Eksternal yang mempunyai tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.<sup>2</sup> Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.<sup>3</sup>

1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

2 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3 <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk> diakses 20 Desember 2022 17:55

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan;
3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP):** Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Kriteria pemberian opini, adalah: (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP.<sup>4</sup>

Dalam rangka mempertahankan opini BPK atas penyajian Laporan Keuangan tahun 2021 Inspektorat Jenderal telah melakukan upaya berupa

4 <https://kepri.bpk.go.id/tingkatan-opini-bpk-atas-laporan-keuangan-pemerintah-daerah/> diakses 20 Desember 2022 17:58



serangkaian kegiatan yang telah ditetapkan dalam PKPT sebagaimana disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

(Kegiatan Inspektorat Jenderal dalam rangka mengawal opini WTP)

Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan Negara	Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Internal dan Eksternal
Pendampingan Satuan Kerja atas Penyusunan Laporan Keuangan	Audit Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan PNBPNBP	Audit Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan PNBPNBP	Reviu Penyerapan Anggaran
Reviu Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021	Reviu Penyerapan Anggaran	Reviu Penyerapan Anggaran	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa
Reviu Penyerapan Anggaran	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa	Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)
Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan Negara		Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)	
Reviu Pengadaan Barang dan Jasa			

Pada 7 (tujuh) tahun terakhir 2015 s.d. 2021 Kementerian Hukum dan HAM memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan, hal ini membuktikan kerja keras Inspektorat Jenderal bersama jajaran Satuan Kerja dalam mengawal/mempertahankan Opini WTP tersebut.

Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Nomor: 18a/HP/XIV/05/2022 tanggal 27 Mei 2022, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berhasil memperoleh **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dengan keterangan lengkap sebagai berikut:

*“Menurut Opini BPK, Laporan Keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kemenkumham Tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang*

berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.”<sup>5</sup>

## 2. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama 1

Dengan terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 dari BPK-RI yang memuat opini **Wajar Tanpa Pengecualian** dengan 18a/HP/XIV/05/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang diserahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 28 Juni 2021, maka **Target Capaian IKU-1, tercapai (100%)**.

Sehingga, pada Capaian Kinerja Organisasi, penilaian capaian atas Indikator Kinerja Utama 1 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Nilai Capaian IKU 1}$$

$$\frac{WTP}{WTP} \times 100\% = 100\%$$

### a) Perbandingan dengan IKU sejenis Tahun 2021

Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 Inspektorat Jenderal terhadap IKU sejenis yakni “Opini Eksternal atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”, berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 Nomor: 23.a/HP/XIV/05/2021 tanggal 24 Mei 2021 diperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian sehingga terhadap IKU tersebut tercapai 100%.

Tabel 3.2

(Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2022)

Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
IKU-1	Target	Capaian	IKU-1	Target	Capaian	
Opini Eksternal atas LK	WTP	WTP (100%)	Opini Audit Eksternal atas LK	WTP	WTP (100%)	Inspektorat Jenderal berhasil

5 LHP atas LK Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 Nomor 18a/HP/XIV/05/2022 tanggal 27 Mei 2022, BPK-RI





Kemenkumham			Kemenkumham			memperoleh capaian
Formulasi	LHP BPK atas LK Kemenkumham Nomor: 23.a/HP/XIV/05/2021 tanggal 24 Mei 2021		Formulasi	LHP BPK atas LK Kemenkumham Nomor: 18a/HP/XIV/05/2022 tanggal 27 Mei 2022		100% atas IKU-1 pada tahun 2021 dan 2022.

Sehingga berdasarkan data tersebut dapat dinilai bahwa kinerja Inspektorat Jenderal dalam rangka memperoleh Opini WTP sudah maksimal sejak Tahun 2021, sehingga pada Tahun 2022 dapat mempertahankan capaian 100%.

**b) Perbandingan realisasi kinerja s.d Tahun ini dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis**

**1) Perbandingan dengan RPJMN ke IV Tahun 2020 s.d. 2024 (RKP Tahun 2022)**

Inspektorat Jenderal sejak Tahun 2021 tidak mengemban Prioritas Nasional. Sehingga capaian IKU-1 Opini Audit Eksternal atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM tidak dapat dibandingkan dengan target RPJMN ke IV Tahun 2020 s.d. 2024.

**2) Perbandingan dengan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024**

Mengacu pada dokumen perencanaan strategis (Renstra Inspektorat Jenderal) IKU-1 Opini Audit Eksternal atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM mengandung Langkah strategi sebagai berikut:

Gambar 3.5

(Langkah Strategi IKU-1 Inspektorat Jenderal Tahun 2022)

Sasaran Program	Nomenklatur IKU	Langkah Strategi
SS-1 :  Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Kemenkumham yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham  Target : WTP	a. Meningkatkan kualitas laporan keuangan satuan kerja dan kementerian b. Penguatan perencanaan dan penganggaran serta kualitas pelaksanaan anggaran c. Komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan pelaksana kegiatan serta kesiapan sumber daya manusia d. Menyelesaikan temuan/rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan e. Meningkatkan kualitas proses pengadaan barang jasa f. Tertib pengelolaan Barang milik negara g. Pengawasan dan pendampingan proses penyusunan Laporan Keuangan h. Mewujudkan Penilaian Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan (PIPK) memadai i. Melaksanakan sinergi dengan unit utama dalam melaksanakan revaluasi BMN j. Melaksanakan audit atas pengelolaan BMN, audit barang/jasa, audit pengelolaan keuangan, reviu RKBMN, pendampingan proses Pengadaan Barang Jasa satuan kerja.

Target IKU-1 Opini Audit Eksternal atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang tertera dalam Renstra Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Gambar 3.6

(Target IKU-1 Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024)

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			
			2021	2022	2023	2024
<b>KEMENTERIAN HUKUM DAN</b>						
<b>INSPEKTORAT JENDERAL</b>						
<b>SP1B 1</b>	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Pusat				
	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham		WTP	WTP	WTP	WTP

Sehingga jika dibandingkan dengan Target pada Dokumen Renstra Inspektorat Jenderal, capaian s.d Tahun 2022 IKU- 1 Opini Audit Eksternal atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM memperoleh hasil WTP atau tercapai 100%.



**c) Perbandingan dengan Perolehan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya.**

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP-LKPP) No.50a/LHP/XV/05/2022 Tanggal 31 Mei 2022 menyajikan data sebagai berikut:

BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPP Tahun 2021.<sup>6</sup> Pada Tahun 2021, entitas pemeriksaan mencakup 87 (delapan puluh tujuh) Kementerian/ Lembaga dan 1 (satu) Bendahara Umum Negara (BUN). Atas pemeriksaan tersebut oleh BPK 83 K/L dan 1 BUN berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dimana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu K/L yang berhasil. Bahwa atas pemeriksaan Laporan Keuangan pada K/L Tahun 2021 terdapat 4 Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diperoleh Kementerian Perdagangan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Terbukti dengan kembali diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan untuk Bagian Anggaran 015 (LK BA-015). Sejak tahun 2011, LK BA 015 telah mendapat opini WTP. Dengan diperolehnya kembali opini WTP atas LK BA 015 tahun 2021 ini, maka telah 11 kali secara berturut-turut LK BA 015 mendapatkan WTP. Demikian juga dengan LKBUN, yang tahun ini juga mendapatkan opini WTP atas LKBUN tahun 2021, perolehan ini menjadikan LKBUN mendapatkan opini WTP yang ke-6 kali berturut-turut sejak tahun 2016.<sup>7</sup>

6 Ringkasan Eksekutif, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021 Nomor: 50a/LHP/XV/05/2022 tanggal 31 Mei 2022 BPK-RI, hlm. 2

7 <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/kualatungkal/id/data-publikasi/berita-terbaru/2933-lkpp-tahun-2021-kembali-mendapatkan-opini-wtp.html> diakses pada 21 Desember 2022

Tabel 3.3

(Perbandingan Capaian IKU-1 Tahun 2022 dengan IKU-1 Tahun 2021, RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 / Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 dan perbandingan dengan capaian K/L lainnya)

Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Target RPJMN-IV (RKP Tahun 2022) dan Target Renstra Itjen	Capaian Opini WTP atas LK Tahun 2021 dengan K/L lainnya
WTP (100%)	WTP (100%)	Tahun 2022 tidak mengemban Prioritas Nasional RKP, melainkan pada Tahun 2021 mengemban tentang Pembangunan ZI WBK/ WBBM (tidak dapat dibandingkan dengan IKU-1)  Dibandingkan dengan Renstra Itjen Tahun 2021 dan 2022 memperoleh hasil WTP (100%)	83 K/L dan 1 BUN berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dimana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu K/L yang berhasil

#### d) Realisasi Keuangan atas Pelaksanaan IKU-1

Dalam pelaksanaannya untuk mencapai Opini WTP, Inspektorat Jenderal telah mengalokasikan Anggaran berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-013.02-0/2022 dengan PAGU sebesar Rp76.877.008.000. Atas anggaran tersebut berdasarkan Tabel Kerangka Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal Tahun 2021 s.d. 2024, pada Tahun Anggaran 2022 Inspektorat Jenderal mengalokasikan sebesar Rp40.301.959.000<sup>8</sup> untuk mendukung Sasaran Program Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang Akuntabel dengan Indikator Kinerja Program Opini Audit Eksternal atas Laporan Keuangan Kemenkumham.

<sup>8</sup> 8 Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 s.d. 2024, hlm. 52

Dimana alokasi tersebut terbagi dalam Anggaran Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Wilayah I s.d. Inspektorat Wilayah VI.

Sepanjang Tahun Anggaran 2022, Inspektorat Jenderal telah melakukan revisi atas DIPA sebanyak 11 (sebelas) kali sehingga sampai dengan Revisi XI, IKU-1 memiliki PAGU sebesar Rp.19.334.295.000.

Bahwa berdasarkan alokasi anggaran tersebut:

- a. bahwa alokasi anggaran untuk IKU-1 dialokasikan sebesar Rp.19.334.295.000 (Data per 30 Desember 2022) dari komponen meliputi:

1563 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I

1564 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II

1565 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III

1566 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV

1567 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V

1568 Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI

Yang terkait dengan Audit Internal, Reviu, Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan, dan Perencanaan dan Penyusunan Laporan Kegiatan Pengawasan.

- b. bahwa sampai dengan capaian Opini WTP oleh BPK diperoleh dan seluruh kegiatan terlaksana pada akhir tahun, telah direalisasikan anggaran sebesar Rp19.256.633.485 atau sebesar 99,59% (Data s.d. 30 Desember 2022). Atas realisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Jenderal berhasil memanfaatkan anggaran secara maksimal dalam rangka mengawal Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tabel 3.4

(Alokasi dan Realisasi Anggaran atas Capaian IKU-1)

Alokasi DIPA Induk	Alokasi Revisi ke-XI	Realisasi	Persentase (%)
Rp21.547.096.000	Rp19.334.295.000	Rp19.256.633.485	99,59

#### e) Kendala dan Solusi

Dalam rangka pemenuhan capaian pada IKU-1, pada prosesnya terdapat kendala dalam kegiatan penunjang yang selanjutnya dapat dikendalikan dengan solusi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

## 1) Kendala

Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala dalam rangka mewujudkan capaian Opini WTP sebagai berikut:

- i. Pada awal tahun, masih terpengaruh Pandemi Covid-19, sehingga terdapat kendala pelaksanaan untuk beberapa kegiatan yang telah direncanakan dalam PKPT baik berupa penundaan maupun pembatalan kegiatan sehubungan dengan pembatasan bepergian pada wilayah dan dalam waktu tertentu; dan
- ii. Penyusunan PKPT masih berbasis Faktor atau Nilai Risiko pada Tahun Anggaran 2022, sehingga pemetaan kegiatan pengawasan belum murni berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) pada setiap satuan kerja.

## 2) Solusi

Atas beberapa kendala tersebut, Inspektorat Jenderal telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka mengatasi hal tersebut diantaranya:

- i. Menerapkan *Remote Audit* dalam rangka meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai *Quality Assurance* dan *Strategic Partner* untuk Satker di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melakukan kegiatan pengawasan secara virtual; dan
- ii. Pada Tahun 2022, Inspektorat Jenderal telah membentuk Tim dalam rangka menyusun Konsep PKPT berbasis risiko dengan bimbingan langsung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk selanjutnya dapat diterapkan.

## A. 2. Capaian dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama-2

### 1. Capaian Indikator Kinerja Utama-2:

#### **Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Gambar 3.7

(Capaian IKU-2 Inspektorat Jenderal Tahun 2022)



Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, di mana untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyelenggarakan SPIP dalam rangka memberi keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2013 Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawasan intern berperan besar dalam rangka penerapan SPIP pada Kementerian/Lembaga.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, mekanisme dalam penilaian maturitas SPIP terdiri dari 3 tahap yaitu:

- 1) Penilaian mandiri oleh manajemen;

- 2) Penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah;
- 3) Evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, Inspektorat Jenderal selaku koordinator pelaksanaan penilaian maturitas SPIP di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengemban Indikator Kinerja Utama Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Target Level 3.

Dalam pelaksanaannya, pada Tahun Anggaran 2022 dengan diterapkannya kebijakan baru oleh BPKP terkait SPIP Terintegrasi berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Inspektorat Jenderal mendapatkan pergeseran peran menjadi Penjamin Kualitas.

Penjaminan Kualitas atas Penyelenggaraan Maturitas SPIP dilakukan dengan tujuan:

- 1) Melakukan verifikasi dan validasi atas pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri penyelenggaraan SPIP pada Unit Eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 2) Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 3) Memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4) Memberikan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ruang lingkup Penjaminan Kualitas sebagai berikut:

- 1) Penetapan Tujuan yang meliputi 2 (dua) unsur penilaian;
- 2) Struktur dan Proses yang meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (dua puluh lima) sub unsur penilaian;
- 3) Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP, yang meliputi 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 11 (sebelas) sub unsur penilaian.





Pelaksanaan Penjaminan Kualitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan dengan pendekatan kuantitatif pada 3 (tiga) komponen maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu:

Tabel 3.5

(3 Komponen penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP)

No.	Komponen Penilaian	Jumlah Fokus	Bobot Komponen
1.	Penetapan Tujuan	2	40%
	a. Kualitas Sasaran Strategis	1	
	b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan)	1	
2.	Struktur dan Proses	25	30%
	a. Lingkungan Pengendalian	8	
	b. Penilaian Risiko	2	
	c. Kegiatan Pengendalian	11	
	d. Informasi dan Komunikasi	2	
	e. Pemantauan	2	
3.	Pencapaian Tujuan SPIP	7	30%
	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	2	
	b. Keandalan Pelaporan Keuangan	1	
	c. Pengamanan atas Aset Negara	3	
	d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	1	
Total Bobot			100%

Setiap komponen terbagi menjadi beberapa unsur dan subunsur yang menunjukkan karakter level maturitas mulai dari rintisan (nilai 1), berkembang (nilai 2), terdefinisi (nilai 3), terkelola dan terukur (nilai 4), dan optimum (nilai 5). Penentuan nilai ditetapkan berdasar modus dari nilai masing-masing karakter fokus maturitas. Panel hasil evaluasi atas SPIP dilakukan menggunakan teknik wawancara, analisis dokumen, dan observasi terhadap tim evaluator SPIP pada masing-masing unit eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Analisis dokumen dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi *google drive* yang menjadi sarana pengumpulan data dukung oleh tim evaluator.

Tabel 3.6

(Gradasi Penilaian SPIP)

Tingkat Maturitas	Klasifikasi Nilai	Interval Nilai
Rintisan	1	$1,0 \leq \text{Nilai} < 2,0$
Berkembang	2	$2,0 \leq \text{Nilai} < 3,0$
Terdefinisi	3	$3,0 \leq \text{Nilai} < 4,0$
Terkelola dan Terukur	4	$4,0 \leq \text{Nilai} < 4,5$
Optimum	5	$\geq 4,5$

Berdasarkan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2022 Nomor: ITJ.2.PW.03.01-55/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022, kegiatan Penjaminan Kualitas dilaksanakan untuk memberikan penilaian yang independen dan objektif tentang tingkat maturitas/kematangan penyelenggaraan/implementasi SPIP berdasarkan Penilaian Mandiri yang telah dilakukan pada 11 (sebelas) unit Eselon I.

Hasil Penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP adalah sebesar 4,437. Berdasarkan proses verifikasi dan validasi yang dilakukan terhadap hasil penilaian mandiri tersebut diperoleh hasil yang sama atau tidak mengalami koreksi. Dengan demikian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 berada pada kategori “**Terkelola dan Terukur**”.

Adapun rincian hasil Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7  
(Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2022)

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
<b>PENETAPAN TUJUAN</b>			
Kualitas Sasaran Strategis	50%	5	2,5
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50%	5	2,5
<b>SUB JUMLAH PERENCANAAN</b>	<b>100.00%</b>		<b>5</b>
<b>BOBOT PERENCANAAN</b>	<b>40.00%</b>		<b>2,00</b>
<b>STRUKTUR DAN PROSES</b>			
Lingkungan Pengendalian	30.00%	25,965	0,97
Penilaian Risiko	20.00%	6,557	0,66
Kegiatan Pengendalian	25.00%	34,386	0,78
Informasi dan Komunikasi	10.00%	6,168	0,31
Pemantauan	15.00%	5,371	0,40
<b>SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES</b>	<b>100.00%</b>		<b>3.122</b>
<b>BOBOT STRUKTUR DAN PROSES</b>	<b>30.00%</b>		<b>0,937</b>
<b>PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN SPIP</b>			
<b>Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi</b>			
Capaian <i>Outcome</i>	15.00%	5	0,75
Capaian <i>Output</i>	15.00%	5	0,75
<b>Keandalan Pelaporan Keuangan</b>			
Opini LK	25.00%	5	1,25
<b>Pengamanan atas Aset Negara</b>			
Keamanan Administrasi	10.00%	5	0,50
Keamanan Fisik	5.00%	5	0,25
Keamanan Hukum	10.00%	5	0,50
<b>Ketaatan terhadap Peraturan Perundang undangan</b>			
Temuan Ketaatan – BPK	20.00%	5	1
<b>SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN SPIP</b>	<b>100.00%</b>		<b>5</b>
<b>BOBOT HASIL</b>	<b>30.00%</b>		<b>1,5</b>
<b>TOTAL NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP</b>			<b>4,437</b>



Selanjutnya berdasarkan proses verifikasi dan validasi yang dilakukan terhadap hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada tingkat **Terkelola dan Terukur** atau **tingkat 4** (empat) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP atas pengukuran 3 (tiga) komponen penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.8  
(Hasil Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Tahun 2022)

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan		5
2.	Struktur dan Proses		3,122
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP		5
-	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	<b>4</b>	<b>4,437</b>
-	MRI		<b>3,99</b>
-	IEPK		<b>3,05</b>

## 2. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama-2

Bahwa berdasarkan realisasi atas Indikator Kinerja Utama dengan target level-3 telah tercapai Nilai Maturitas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas sebesar 4,437 atau pada level 4, hal ini mengindikasikan bahwa kinerja Inspektorat Jenderal telah terlaksana secara maksimal dengan hasil capaian yang berhasil melampaui target. Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penilaian capaian atas Indikator Kinerja Utama-2 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Nilai Capaian IKU 2}$$

$$\frac{4,437}{3} \times 100\% = 147,9\%$$

### a) Perbandingan dengan IKU sejenis Tahun 2021

Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2021 Inspektorat Jenderal terhadap IKU sejenis yakni “Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Target Level 3”, berdasarkan Laporan Hasil Panel Evaluasi atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada

Unit Eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 Nomor: ITJ.2.PW.03.02-66/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 diperoleh Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 sebesar 4,25 atau berada pada level 4 melebihi target. Sehingga pada tahun 2021, Inspektorat Jenderal memiliki capaian atas IKU-2 sebesar 141,67%.

Tabel 3.9  
(Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2022)

Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
IKU-2	Target	Capaian	IKU-2	Target	Capaian	
Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	Level 3	4,25 (141,7%)	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	Level 3	4,437 (147,9%)	Bahwa pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022, Inspektorat Jenderal berhasil mendapat capaian diatas 100% melebihi target yang ditetapkan, dan cenderung meningkat.
Formulasi	Laporan Hasil Panel Evaluasi atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Unit Eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 Nomor: ITJ.2.PW.03.02-66/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021		Formulasi	Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2022 Nomor: ITJ.2.PW.03.01-55/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022		

Sehingga berdasarkan data tersebut dapat dinilai bahwa kinerja Inspektorat Jenderal dalam rangka meningkatkan maturitas SPIP di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah maksimal sejak Tahun 2021 dan 2022. Nilai maturitas diatas target dengan capaian Level 4 atau persentase capaian 141,7% dan 147,9%. Bahwa capaian Inspektorat jenderal cenderung meningkat apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021.

**b) Perbandingan realisasi kinerja s.d. Tahun ini dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis**

**1) Perbandingan dengan RPJMN ke IV Tahun 2020 s.d. 2024 (RKP Tahun 2022)**

Seperti halnya penjelasan pada IKU-1 diatas bahwa IKU-2 Indeks/Nilai Maturitas SPIP tidak dapat dibandingkan dengan Target



RPJMN ke IV Tahun 2020 s.d. 2024 (RKP Tahun 2022) dikarenakan dalam RPJMN tersebut di Tahun 2022 Inspektorat Jenderal tidak mengemban Kegiatan Prioritas Nasional. Sedangkan jika diamanati Kegiatan Prioritas Nasional hanya ada pada Tahun 2021 terkait Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM dengan target 6% satuan kerja usulan berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM.

## 2) Perbandingan dengan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Mengacu pada dokumen perencanaan strategis (Renstra Inspektorat Jenderal) IKU- 2 Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM mengandung Langkah strategi sebagai berikut:

Gambar 3.8

(Langkah Strategi IKU-2 Inspektorat Jenderal Tahun 2022)

Sasaran Program	Nomenklatur IKU	Langkah Strategi
SS-2 :  Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dilingkungan KEMENKUM HAM	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum  Target : Level 3 (terdefinisi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian maturitas SPIP</li> <li>b. Meningkatkan komitmen seluruh pegawai untuk melakukan identifikasi risiko dan menganalisa atas tugas fungsinya,</li> <li>c. Penerapan Manajemen Risiko di seluruh satuan kerja.</li> <li>d. Menambahkan jumlah satuan kerja yang akan dilakukan penilaian maturitas SPIP bukan hanya unit eselon I tetapi juga 33 Kanwil</li> <li>e. Melaksanakan evaluasi terpisah atas penyelenggaraan SPIP terhadap suatu kejadian / prosedur yang dianggap penting.</li> </ul>

Target IKU- 2 Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM yang tertera dalam Renstra Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Gambar 3.9

(Target IKU-2 Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024)

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			
			2021	2022	2023	2024
<b>SP1B 2</b>	Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Pusat				
	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM		Level 3 - Terdefinisi	Level 3 - Terdefinisi	Level 3 - Terdefinisi	Level 4 - Terkelola dan Terukur

Sehingga jika dibandingkan dengan Target pada Dokumen Renstra Inspektorat Jenderal, capaian s.d Tahun 2022 IKU- 2 Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 sebesar 4,25 dan Tahun 2022 sebesar 4,437 memperoleh hasil melebihi target atau tercapai 100%.

### c) Perbandingan IKU sejenis dengan K/L/P

Maturitas SPIP Level 4 yang diperoleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada Kementerian/Lembaga lainnya mengingat bahwa nilai ekspose dari BPKP untuk K/L/P masih belum keluar atas penerapan SPIP Terintegrasi sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021.

Tabel 3.10

(Perbandingan Capaian IKU-2 Tahun 2021 dengan IKU Tahun 2022, RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 dan perbandingan dengan K/L lain)

Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2021	Target RPJMN-IV (RKP Tahun 2020) dan Target Renstra Itjen	Capaian Maturitas SPIP pada K/L lain Tahun 2022
<b>4,437</b> Level 4 - Terkelola dan Terukur <b>(147,9%)</b>	<b>4,25</b> Level 4 - Terkelola dan Terukur <b>(141,7%)</b>	Prioritas Nasional RKP 2021 tentang Pembangunan ZI WBK/ WBBM (tidak dapat dibandingkan dengan IKU-2)  Dibandingkan dengan Renstra Itjen Tahun 2021 dan 2022 memperoleh hasil melebihi target atau tercapai (100%)	Pada Tahun 2022 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada Kementerian/Lembaga lainnya mengingat bahwa nilai ekspose dari BPKP untuk K/L/P masih belum keluar

### d) Realisasi Anggaran atas Pelaksanaan IKU-2

Dalam pelaksanaannya untuk mencapai Maturitas SPIP Level 4, Inspektorat Jenderal telah mengalokasikan Anggaran berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-013.02-0/2022 dengan PAGU sebesar



Rp76.877.008.000. Atas anggaran tersebut berdasarkan Tabel Kerangka Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal Tahun 2021 s.d. 2024, pada Tahun Anggaran 2022 Inspektorat Jenderal mengalokasikan sebesar Rp6.826.229<sup>9</sup> untuk mendukung Sasaran Program Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan professional dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dimana alokasi tersebut terbagi dalam Sasaran Kegiatan perencanaan pengawasan berbasis risiko untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM pada Inspektorat Wilayah I s.d. Inspektorat Wilayah VI.

Sepanjang Tahun Anggaran 2022, Inspektorat Jenderal telah melakukan revisi atas DIPA sebanyak 11 (sebelas) kali sehingga sampai dengan Revisi XI, IKU-2 memiliki PAGU sebesar Rp1.467.867.000. Bahwa berdasarkan alokasi anggaran tersebut:

- a. bahwa alokasi anggaran untuk IKU-2 sebesar Rp1.467.867.000 dari komponen meliputi:
  - 1563.EBD.965.054.B; 1563.EBD.965.054.C; 1563.EBD.965.054.D ;  
1563.EBD.965.056.A ; 1563.EBD.965.056.D terkait Evaluasi dan Pendampingan SPIP serta Manajemen Risiko pada Inspektorat Wilayah I
  - 1564.EBD.965.054.B; 1564.EBD.965.054.C; 1564.EBD.965.054.D ;  
1564.EBD.965.056.A ; 1564.EBD.965.056.D terkait Evaluasi dan Pendampingan SPIP serta Manajemen Risiko pada Inspektorat Wilayah II
  - 1565.EBD.965.054.B; 1565.EBD.965.054.C; 1565.EBD.965.054.D ;  
1565.EBD.965.056.A ; 1565.EBD.965.056.D terkait Evaluasi dan Pendampingan SPIP serta Manajemen Risiko pada Inspektorat Wilayah III
  - 1566.EBD.965.054.B; 1566.EBD.965.054.C; 1566.EBD.965.054.D ;  
1566.EBD.965.056.A ; 1566.EBD.965.056.D terkait Evaluasi dan

---

9 Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 s.d. 2024, hlm. 52

Pendampingan SPIP serta Manajemen Risiko pada Inspektorat Wilayah IV

1567.EBD.965.054.B; 1567.EBD.965.054.C; 1567.EBD.965.054.D ; 1567.EBD.965.056.A ; 1567.EBD.965.056.D terkait Evaluasi dan Pendampingan SPIP serta Manajemen Risiko pada Inspektorat Wilayah V

Wilayah V

1568.EBD.965.054.B; 1568.EBD.965.054.C; 1568.EBD.965.054.D ; 1568.EBD.965.056.A ; 1568.EBD.965.056.D terkait Evaluasi dan Pendampingan SPIP serta Manajemen Risiko pada Inspektorat Wilayah VI

Wilayah VI

- b. bahwa berdasarkan alokasi anggaran tersebut, sampai dengan capaian Level 4 Maturitas SPIP diperoleh dan seluruh kegiatan terlaksana pada akhir tahun, telah direalisasikan anggaran sebesar Rp1.466.106.172 atau sebesar 99,88% (Data s.d. 30 Desember 2022). Atas realisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Jenderal berhasil memanfaatkan anggaran secara maksimal dalam rangka mengawal nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tabel 3.11

(Alokasi dan Realisasi Anggaran atas Capaian IKU-2)

Alokasi DIPA Induk	Alokasi Revisi ke-XI	Realisasi	Persentase (%)
Rp3.105.635.000	Rp1.467.867.000	Rp1.466.106.172	99,88

#### e) Kendala dan Solusi

Dalam rangka pemenuhan capaian pada IKU-2, pada prosesnya terdapat kendala dalam kegiatan penunjang yang selanjutnya dapat dikendalikan dalam dengan solusi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

##### 1) Kendala

- i. Penerapan Kebijakan Penilaian Maturitas SPIP berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada





- Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah belum menghasilkan nilai evaluasi dari BPKP;
- ii. Belum siapnya *tools* evaluasi oleh BPKP selaku K/L pembina SPIP, serta dengan diterapkannya mekanisme penilaian dengan 3 komponen penilaian meliputi Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Nilai SPIP sehingga lingkup penilaian maturitas SPIP semakin luas dan satuan kerja belum siap dalam menerapkan;
  - iii. Adanya *tools* dan pedoman evaluasi atas salah satu komponen penilaian yang berdiri sendiri di luar dari evaluasi maturitas SPIP, yaitu pada komponen Manajemen Risiko Indeks (MRI) dimana Inspektorat Jenderal sebagai APiP memiliki Kegiatan Pengawasan berupa Evaluasi Manajemen Risiko dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 dan Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor Nomor ITJ-06.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga hal ini menimbulkan kendala dimana pelaksanaan penilaian maturitas menimbulkan nilai MRI dan Evaluasi Manajemen Risiko juga menimbulkan Nilai MRI.

## 2) Solusi

Atas beberapa kendala tersebut, Inspektorat Jenderal telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka mengatasi hal tersebut diantaranya:

- i. Koordinasi berkala dengan BPKP terkait hasil penilaian evaluasi Maturitas SPIP dan penyampaian Hasil Penjaminan Kualitas APiP.
- ii. Inspektorat Jenderal selaku Penjamin Kualitas terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan salah satunya dengan melakukan kerja sama dengan K/L Pembina yaitu BPKP dengan pelaksanaan Workshop Teknik Penilaian Mandiri dan penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM tanggal 7 Maret 2022<sup>10</sup>, peningkatan kapasitas dalam SPIP Terintegrasi

---

<sup>10</sup> Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Workshop Teknik Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM

berupa workshop yang dihadiri oleh Inspektur Jenderal, Seluruh Sekretaris Unit Utama, Inspektur Wilayah I s.d. VI, Seluruh Kepala Divisi Administrasi Kanwil dan seluruh pegawai;

- iii. Terkait kendala lahirnya 2 nilai Indeks Manajemen Risiko dari 2 kegiatan pengawasan dengan *tools* yang berbeda yaitu Penilaian Maturitas SPIP dan Evaluasi Manajemen Risiko, Inspektorat Jenderal telah menuangkan langka-langkah penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi. Ditentukan bahwa Indeks Manajemen Risiko yang dihasilkan dari Evaluasi Manajemen Risiko merupakan kesatuan nilai yang berbeda dengan Indeks Manajemen Risiko sebagai Komponen Penilaian pada SPIP Terintegrasi. Selain itu, Inspektorat Jenderal juga terus memberikan penguatan kepada seluruh APIP terkait Manajemen Risiko dengan menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan sertifikasi terhadap pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal diantaranya: Diklat Manajemen Risiko; Diklat *Certified Risk Associate* (CRA); Diklat, Sertifikasi *Certified Risk Management Officer* dan *Certified Risk Governance Profesional*.

### A. 3. Capaian dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama 3

#### 1. Capaian Indikator Kinerja Utama-3

Gambar 3.9

(Capaian IKU-3 Inspektorat Jenderal Tahun 2022)



Dalam rangka memenuhi capaian IKU-3 yaitu Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP Minimal “BB” dengan target 93%, Inspektorat Jenderal telah menyusun rangkaian kegiatan diantaranya melaksanakan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), pelaksanaan evaluasi SAKIP,



pelaksanaan panel Evaluasi SAKIP sekaligus melakukan pengusulan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM kepada Kementerian PAN-RB.

Pada Tahun 2022 Inspektorat Jenderal telah melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Triwulan II.

Kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan dari tanggal 7 Juni s.d 10 Juni 2022 terhadap 11 (sebelas) Unit Eselon I dan 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan perolehan nilai capaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM periode tahun 2021 adalah sebesar **77,85 (BB) dengan interpretasi Sangat Baik**, yaitu terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12  
(Hasil Penilaian SAKIP Tahun 2022)

No.	Komponen	Bobot / Nilai	Nilai Hasil Evaluasi
I.	Perencanaan Kinerja	30%	23,51
II	Pengukuran Kinerja	30%	22,99
III	Pelaporan Kinerja	15%	11,35
IV	Evaluasi Internal	25%	20,00
<b>NILAI HASIL EVALUASI</b>		<b>100%</b>	<b>77,85</b>

Berdasarkan kegiatan tersebut didapatkan nilai Evaluasi SAKIP pada 11 (sebelas) Unit Eselon I dan 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang rinciannya dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.13  
(Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Tahun 2022)

No	Unit Kerja	Nilai	Kategori
1	Sekretariat Jenderal	81,80	A
2	Inspektorat Jenderal	83,90	A
3	Direktorat Jenderal Imigrasi	80,60	A
4	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	81,95	A
5	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	84,35	A
6	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	82,85	A
7	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	82,55	A
8	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	75,05	BB
9	Badan Pembinaan Hukum Nasional	79,25	BB
10	Balitbang HAM	80,75	A
11	BPSDM	80,60	A
Nilai Rata-Rata		80,24	A

Berdasarkan data tersebut atas pelaksanaan Evaluasi SAKIP pada 11 unit eselon I, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berhasil memperoleh nilai rata-rata 80,24 atau pada kategori A. Bahwa 9 (Sembilan) unit Eselon I berhasil memperoleh Nilai A dan 2 (dua) Unit Eselon I lainnya memperoleh nilai BB, dengan target 11 unit eselon I memperoleh nilai minimal BB (Baik), persentase tercapai 100% sesuai dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\% = \frac{\sum \text{Satker yang akuntabilitas kinerjanya kategori "Baik"}}{\sum \text{Satuan Kerja yang dilakukan Evaluasi AKIP dan Reviu LAKIP}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{11}{11} \times 100 \% = 100\%$$

## 2. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama-3

Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi, penilaian capaian atas Indikator Kinerja Utama 3 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Nilai Capaian IKU 3}$$

$$\frac{100}{93} \times 100\% = 107,52\%$$

### a) Perbandingan dengan IKU sejenis Tahun 2021

Pada Tahun 2021 Inspektorat Jenderal telah melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Triwulan II. Hasil evaluasi selanjutnya dilakukan Panel oleh Inspektorat Jenderal dalam kegiatan Konsinyering yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Konsinyering Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Periode Tahun 2020 Nomor: ITJ.6.PW.03.01-59/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021.<sup>11</sup>

Kegiatan Evaluasi berdasarkan Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor: ITJ.KP.04.01.5-42 tanggal 30 April 2021 dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu tahapan evaluasi pada pada 11 (sebelas) Unit Eselon I yang dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 11 Mei 2021 dan selanjutnya pada tahap kedua dilaksanakan kegiatan Panel Penilaian Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang terlaksana pada tanggal 17 s.d. 21 Mei 2021.<sup>12</sup> Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut didapatkan rata-rata nilai Implementasi SAKIP pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menunjukkan capaian atas IKU-3 pada Tahun 2021 adalah 100%, dimana seluruh Unit Eselon I yang dilakukan evaluasi atas Implementasi SAKIP memperoleh nilai minimal “BB” dengan target 92%.

Capaian yang diperoleh dari evaluasi dan panel SAKIP pada setiap Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14  
(Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I Tahun 2021)

No	Unit Kerja	Nilai	Kategori
1	Sekretariat Jenderal	75,59	BB
2	Inspektorat Jenderal	82,94	A
3	Direktorat Jenderal Imigrasi	80,12	A
4	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	80.46	A

<sup>11</sup> Laporan Hasil Konsinyering Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Periode Tahun 2020 Nomor: ITJ.6.PW.03.01-59/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021.

<sup>12</sup> *Ibid*

5	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	81,21	A
6	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	80,39	A
7	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	80,37	A
8	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	80,64	A
9	Badan Pembinaan Hukum Nasional	78,88	BB
10	Balitbang HAM	83,25	A
11	BPSDM	77,99	BB
<b>Nilai Rata-Rata</b>		<b>80,17</b>	<b>A</b>

Berdasarkan data tersebut atas pelaksanaan Evaluasi SAKIP pada 11 unit eselon I, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berhasil memperoleh nilai rata-rata **80,17** atau pada kategori **A**.

$$\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Nilai Capaian IKU 3}$$

$$\frac{100}{92} \times 100\% = 108,70\%$$

Tabel 3.15

(Perbandingan dengan IKU-3 Tahun 2021)

Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
IKU-3	Target	Capaian	IKU-3	Target	Capaian	
Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "Baik" (BB)	92%	100% (108,7%)	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "Baik" (BB)	93%	100% (107,52%)	Dengan realisasi maksimal sebesar 100% pada tahun 2021 dan 2022, terdapat penurunan capaian dari 108,7% menjadi 107,52%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan target dari 92% menjadi 93%.
Formulasi	Jumlah satker yang akuntabilitas kinerja kategori baik dibagi jumlah satker yang dilakukan evaluasi dan revidi LKjIP dikali 100%		Formulasi	Jumlah satker yang akuntabilitas kinerja kategori "BB" dibagi jumlah satker yang dilakukan evaluasi AKIP dikali 100%		

**b) Perbandingan realisasi kinerja s.d Tahun ini dengan target kinerja jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis**

**1) Perbandingan dengan RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 (RKP Tahun 2021)**

Seperti halnya penjelasan pada IKU-1 diatas bahwa IKU-3 Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "Baik" (BB) tidak dapat dibandingkan dengan Target RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 (RKP Tahun 2022)



dikarenakan dalam RPJMN tersebut di Tahun 2022 Inspektorat Jenderal tidak mengemban Kegiatan Prioritas Nasional. Sedangkan jika diamanati Kegiatan Prioritas Nasional hanya ada pada Tahun 2021 terkait Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM dengan target 6% satuan kerja usulan berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM.

## 2) Perbandingan dengan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Mengacu pada dokumen perencanaan strategis (Renstra Inspektorat Jenderal) IKU- 3 Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal “BB” mengandung Langkah strategi sebagai berikut:

Gambar 3.10

(Langkah Strategi IKU-3 Inspektorat Jenderal Tahun 2022)

Sasaran Program	Nomenklatur IKU	Langkah Strategi
SS-3 :  Meningkat nya efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi KEMKUMHAM	Persentase Satuan Kerja Yang Nilai AKIP minimal "BB"  Target : 92%	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kompetensi pejabat/pegawai yang akan melaksanakan evaluasi SAKIP dan reuiv LAKIP</li> <li>b. Melaksanakan workshop evaluasi SAKIP</li> <li>c. Perluasan evaluasi SAKIP sampai dengan tingkat Kantor Wilayah</li> <li>d. Menyusun modul diklat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan HAM</li> <li>e. Mendampingi Sekretariat Jenderal dalam revisi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH.-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</li> </ul>

Target IKU- 3 Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal “Baik” (BB) yang tertera dalam Renstra Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Gambar 3.11

(Target IKU-3 Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024)

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			
			2021	2022	2023	2024
<b>SP1B 3</b>	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Pusat				
	Persentase Satuan Kerja Yang Nilai AKIP minimal "BB"		92%	93%	94%	95%

Sehingga jika dibandingkan dengan Target pada Dokumen Renstra Inspektorat Jenderal, capaian s.d Tahun 2022 IKU- 3 Pesentase Satuan

Kerja yang Nilai AKIP Minimal “BB” Tahun 2021 dan Tahun 2022 tercapai 100%.

### c) Perbandingan dengan perolehan IKU pada K/L lainnya

IKU-3 Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal “Baik” (BB), tidak sama nomenklturnya pada K/L lain sehingga tidak dapat diperbandingkan atas capaian IKU tersebut:

Tabel 3.16

(Perbandingan Capaian IKU-3 Tahun 2022 dengan IKU-3 Tahun 2021, RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 dan Target Renstra Itjen serta perbandingan dengan K/L lain)

Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2021	Target RPJMN-IV (RKP Tahun 2020)	Capaian Persentase Nilai AKIP pada K/L lain
11 Unit Eselon I yang dilakukan Evaluasi mendapat nilai minimal baik <b>100% (107,52%)</b>	11 Unit Eselon I yang dilakukan Evaluasi mendapat nilai minimal baik <b>100% (108,7%)</b>	Prioritas Nasional RKP 2021 tentang Pembangunan ZI WBK/ WBBM (tidak dapat dibandingkan dengan IKU-3)  Dibandingkan dengan Renstra Itjen Tahun 2021 dan 2022 memperoleh hasil melebihi target atau tercapai (100%)	IKU-3 tidak dapat dibandingkan dengan K/L lain karena tidak sama nomenklturnya.

### d) Realisasi Anggaran atas IKU-3

Dalam pelaksanaannya untuk mencapai Target, Inspektorat Jenderal telah mengalokasikan Anggaran berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-013.02-0/2022 dengan PAGU sebesar Rp76.877.008.000. Atas anggaran tersebut berdasarkan Tabel Kerangka Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal Tahun 2021 s.d. 2024, pada Tahun Anggaran 2022 Inspektorat





Jenderal mengalokasikan sebesar Rp76.494.626.<sup>13</sup> Untuk mendukung Sasaran Program Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis teknologi informasi. Sasaran tersebut diturunkan kepada 4 IKU yaitu: Persentasi satuan kerja yang nilai AKIP minimal “BB”; Persentase satuan kerja yang nilai capaian RB minimal 90; Persentase satuan kerja yang berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM; dan Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga ke-empat IKU tersebut berada dalam 1 Alokasi Anggaran Sasaran Program.

Sepanjang Tahun Anggaran 2022, Inspektorat Jenderal telah melakukan revisi atas DIPA sebanyak 11 (sebelas) kali sehingga sampai dengan Revisi XI, IKU-3 memiliki PAGU sebesar Rp786.751.000. Bahwa berdasarkan alokasi anggaran tersebut:

a. bahwa alokasi anggaran untuk IKU-3 sebesar Rp786.751.000. dari komponen meliputi:

1563.EBD.965.052.E; 1563.EBD.965.054.A; 1563.EBD.965.056.B ;  
terkait Reviu LAKIP, Evaluasi AKIP, dan Pendampingan Penyusunan LAKIP pada Inspektorat Wilayah I

1564.EBD.965.052.E; 1564.EBD.965.054.A; 1564.EBD.965.056.B ;  
terkait Reviu LAKIP, Evaluasi AKIP, dan Pendampingan Penyusunan LAKIP pada Inspektorat Wilayah II

1565.EBD.965.052.E; 1565.EBD.965.054.A; 1565.EBD.965.056.B ;  
terkait Reviu LAKIP, Evaluasi AKIP, dan Pendampingan Penyusunan LAKIP pada Inspektorat Wilayah III

1566.EBD.965.052.E; 1566.EBD.965.054.A; 1566.EBD.965.056.B ;  
terkait Reviu LAKIP, Evaluasi AKIP, dan Pendampingan Penyusunan LAKIP pada Inspektorat Wilayah IV

1567.EBD.965.052.E; 1567.EBD.965.054.A; 1567.EBD.965.056.B ;  
terkait Reviu LAKIP, Evaluasi AKIP, dan Pendampingan Penyusunan LAKIP pada Inspektorat Wilayah V

---

<sup>13</sup> Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 s.d. 2024, hlm. 52

1568.EBD.965.052.E; 1568.EBD.965.054.A; 1568.EBD.965.056.B ;  
terkait Reviu LAKIP, Evaluasi AKIP, dan Pendampingan Penyusunan  
LAKIP pada Inspektorat Wilayah VI

- b. bahwa berdasarkan alokasi anggaran tersebut, sampai dengan capaian Persentase Nilai AKIP diatas “BB” diperoleh dan dan seluruh kegiatan terlaksana pada akhir tahun, telah direalisasikan anggaran sebesar Rp785.871.675 atau sebesar 99,88% (Data s.d. 30 Desember 2022). Atas realisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Jenderal berhasil memanfaatkan anggaran secara maksimal dalam rangka mengawal Nilai AKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tabel 3.17

(Alokasi dan Realisasi Anggaran atas Capaian IKU-3)

Alokasi DIPA Induk	Alokasi Revisi ke-XI	Realisasi	Persentase (%)
Rp1.253.239.000	Rp786.751.000	Rp785.871.675	99,88

### e) Kendala dan Solusi

Dalam rangka pemenuhan capaian pada IKU-3, pada prosesnya terdapat kendala dalam kegiatan penunjang yang selanjutnya dapat dikendalikan dengan solusi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Kendala

Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala dalam rangka mewujudkan capaian Nilai AKIP Satuan Kerja minimal BB sebagai berikut:

- i. Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Renstra Tahun 2020-2024 tetapi belum dilengkapi dengan Manual IKU yang berisi deskripsi kinerja, definisi IKU dan formulasi pengukurannya;
- ii. Capaian Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja belum seluruhnya berhasil dicapai 100%, seperti halnya pada Inspektorat Jenderal sendiri terkait IKU Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 33,5.

#### 2) Solusi

Atas beberapa kendala tersebut, Inspektorat Jenderal telah melakukan beberapa giat dalam rangka mengatasi hal tersebut diantaranya:

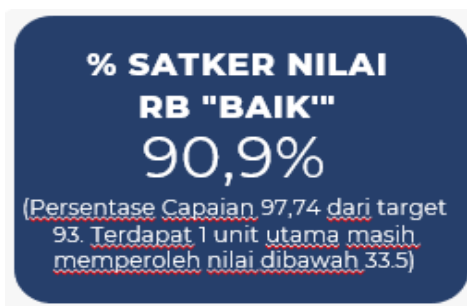
- i. Menyusun Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-07.OT.01.01 Th.2022 tanggal 30 September 2022 tentang penyesuaian Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM;
- ii. Menyusun manual IKU di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Renstra Tahun 2020-2024 yang berisi deskripsi kinerja, definisi IKU dan formulasi pengukurannya, dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-08.OT.01.01 Th.2022 tanggal 30 September 2022 tentang Manual IKU Kementerian Hukum dan HAM, dilanjutkan disusun untuk setiap unit eselon I hingga level Indikator Kinerja Kegiatan (IKK);
- iii. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berjenjang, serta melakukan langkah-langkah perbaikan yang dapat digunakan untuk pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja agar target dapat tercapai 100% atau lebih. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pemutakhiran target dalam Perjanjian Kinerja tersebut.

#### A. 4. Capaian dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama 4

##### 1. Capaian Indikator Kinerja Utama-4

Gambar 3.12

(Capaian IKU-4 Inspektorat Jenderal Tahun 2022)



Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja yang transparan atas pencapaian target dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan

pendampingan dalam penyusunan LKP dan Rencana Aksi atas Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Metode evaluasi sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 26 Tahun 2020 menggunakan program-program Reformasi Birokrasi dan dituangkan kedalam model Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil. Komponen Pengungkit tersebut terdiri atas 8 (delapan) area perubahan sebagai berikut:

- 1) Manajemen Perubahan;
- 2) Deregulasi Kebijakan;
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi;
- 4) Penataan Tatalaksana;
- 5) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- 6) Penguatan Akuntabilitas;
- 7) Penguatan Pengawasan;
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Komponen Hasil merupakan *output* dan/atau *outcome* yang dihasilkan Komponen Pengungkit, yang terdiri dari:

- 1) Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi;
- 2) Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN;
- 3) Kualitas Pelayanan Publik.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menyempurnakan peraturan sebelumnya, terdapat perubahan penilaian evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi hal ini dikarenakan terjadi perubahan pada area komponen pengungkit yang terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu aspek pemenuhan, hasil antara area perubahan dan aspek *reform*. Sehingga dalam rangka pemenuhan capaian IKU Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 33,5.

Berdasarkan Hasil Reviu atas Lembar Kerja Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada 11 (sebelas) Unit Eselon I



di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dituangkan dalam tabel pada halaman berikut:

Tabel 3.18  
(Hasil Reviu atas Lembar Kerja Hasil PMPRB 11 Unit Eselon I)

No	Unit Kerja	Hasil Reviu
1	Sekretariat Jenderal	35,51
2	Inspektorat Jenderal	35,71
3	Balitbang Hukum dan HAM	35,71
4	Ditjen KI	35,85
5	BPSDM Hukum dan HAM	33,93
6	Ditjen PP	34,25
7	Ditjen AHU	35,82
8	Ditjen Imigrasi	34,07
9	Ditjen Pemasyarakatan	32,50
10	BPHN	35,35
11	Ditjen HAM	34,28

Berdasarkan Hasil Reviu Lembar Kerja Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Refoemasi Birokrasi Tingkat Pusat Kementerian Hukum dan HAM didapatkan Usulan Nilai capaian Indeks RB Tahun 2022 sebesar **92,16 (Sembilan puluh dua koma enam belas)** yang terdiri dari total nilai pengukngkit dan hasil.<sup>14</sup>

Apabila dituangkan sebagai capaian Formulasi pengukuran Persentase Satuan Kerja yang nilai Capaian RB minimal 33,5 adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{\sum \text{Satker yang nilai RB} > 33,5}{\sum \text{Satuan Kerja yang dilakukan Evaluasi RB}} \times 100 \%$$
$$\% = \frac{10}{11} \times 100 \% = 90,9\%$$

## 2. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama-4

Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi, penilaian capaian atas Indikator Kinerja Utama 4 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Nilai Capaian IKU 4}$$
$$\frac{90,9}{93} \times 100\% = 97,74\%$$

<sup>14</sup> Laporan Hasil Reviu Lembar Kerja Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Pusat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor ITJ.PW.05.01.II-06 tanggal 12 April 2022

## a) Perbandingan dengan IKU sejenis Tahun 2021

Tabel 3.19

(Tabel Perbandingan dengan IKU-4 Tahun 2022)

Tahun 2022			Tahun 2021			Ket.
IKU-4	Target	Capaian	IKU-4	Target	Capaian	
Persentase Satuan Kerja yang nilai Capaian RB minimal 33,5	93%	90,9% <b>(97,74%)</b>	Persentase Satuan Kerja yang nilai Capaian RB minimal 90	92%	100% <b>(108,7%)</b>	Belum tercapai IKU-4 dikarenakan masih terdapat 1 Unit Eselon I dengan nilai dibawah 33,5 sehingga capaian 90,9% dari target 93%. IKU ini mengalami penurunan dari capaian Tahun 2021.
Formulasi	Jumlah satker yang nilai minimal PMPRB 33,5 dibagi jumlah Satker yang dilakukan pendampingan RB (11 Unit Utama) dikali 100%		Formulasi	Jumlah satker dengan nilai PMPRB minimal 90 dibagi jumlah satker yang dilakukan penilaian dikali 100%		

## b) Perbandingan realisasi kinerja s.d. Tahun ini dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis

## 1) Perbandingan dengan RPJMN ke IV Tahun 2020 s.d. 2024 (RKP Tahun 2022)

Seperti halnya penjelasan pada IKU-1 diatas bahwa IKU-4 Persentase Satuan Kerja dengan nilai capaian RB minimal 33,5 tidak dapat dibandingkan dengan Target RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 (RKP Tahun 2022) dikarenakan dalam RPJMN tersebut di Tahun 2022 Inspektorat Jenderal tidak mengemban Kegiatan Prioritas Nasional. Sedangkan jika diamanati Kegiatan Prioritas Nasional hanya ada pada Tahun 2021 terkait Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM dengan target 6% satuan kerja usulan berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM.

## 2) Perbandingan dengan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Mengacu pada dokumen perencanaan strategis (Renstra Inspektorat Jenderal) IKU- 4 Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 33,5 mengandung Langkah strategi sebagai berikut:



- i. Meningkatkan kompetensi pejabat/pegawai yang akan melaksanakan reviu PMPRB terkait Lembar Kerja Penilaian (LKP) Unit dan Pusat;
- ii. Melaksanakan workshop PMPRB dengan KemenPAN RB terkait teknis reviu PMPRB;
- iii. Perluasan reviu PMPRB pada 11 unit eselon I;
- iv. Melaksanakan survey internal dan eksternal atas PMPRB;
- v. Melaksanakan reviu lintas wilayah (telaahan sejawat atas hasil PMPRB) dgn melibatkan 11 unit Eselon I;
- vi. Meningkatkan pemahaman asesor dan tim pembantu asesor dalam melakukan pemenuhan data dukung khususnya pada LKP aspek pemenuhan dan aspek reform Pengawasan : Gratifikasi, SPIP, Wishtle Blowing Sistem (WBS), Benturan Kepentingan, Penanganan Pengaduan, LHKPN dan LHKSN;
- vii. Melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi RB pd 11 unit eselon I.

Target IKU- 4 Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 33,5 yang tertera dalam Renstra Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Gambar 3.13  
(Target IKU-4 Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024)

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			
			2021	2022	2023	2024
<b>SP1B 3</b>	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Pusat				
	Persentase Satuan Kerja Yang Nilai AKIP minimal "BB"		92%	93%	94%	95%

Sehingga jika dibandingkan dengan Target pada Dokumen Renstra Inspektorat Jenderal, capaian s.d Tahun 2022 IKU- 4 Pesentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 90 (konversi 32,67) Tahun 2021 tercapai 100% dan Pesentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 33,5 Tahun 2022 belum tercapai.

### c) Perbandingan dengan perolehan IKU pada K/L lainnya

IKU-4 Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 33,5, tidak ada nomenklatur yang sama di Inspektorat Jenderal pada Kementerian/Lembaga lain, sehingga tidak dapat dibandingkan.

Tabel 3.20

(Perbandingan Capaian IKU-4 Tahun 2022 dengan IKU Tahun 2022, RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 dan Target Renstra Itjen serta perbandingan dengan LKPP)

Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2021	Target RPJMN-IV (RKP Tahun 2022) dan Target Renstra Itjen	Capaian Nilai PMPRB / RB Tahun 2022 dari K/L
90,9% (97,74%)	100% (108,7%)	Prioritas Nasional RKP 2021 tentang Pembangunan ZI WBK/ WBBM (tidak dapat dibandingkan dengan IKU-4)  Dibandingkan dengan Renstra Itjen Tahun 2021 memperoleh hasil 100% dan Tahun 2022 memperoleh hasil 90,9% (kurang dari target)	IKU-3 tidak dapat dibandingkan dengan K/L lain karena tidak sama nomenklaturinya

### d) Realisasi Keuangan atas Pelaksanaan IKU-4

Dalam pelaksanaannya untuk mencapai Target, Inspektorat Jenderal telah mengalokasikan Anggaran berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-013.02-0/2022 dengan PAGU sebesar Rp76.877.008.000. Atas anggaran tersebut berdasarkan Tabel Kerangka Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal Tahun 2021 s.d. 2024, pada Tahun Anggaran 2022 Inspektorat Jenderal mengalokasikan sebesar Rp76.494.626.<sup>15</sup> Untuk mendukung Sasaran Program Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan

<sup>15</sup> Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 s.d. 2024, hlm. 52





efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis teknologi informasi. Sasaran tersebut diturunkan kepada 4 IKU yaitu: Persentasi satuan kerja yang nilai AKIP minimal “BB”; Persentase satuan kerja yang nilai capaian RB minimal 90; Persentase satuan kerja yang berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM; dan Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga ke-empat IKU tersebut berada dalam 1 Alokasi Anggaran Sasaran Program.

Sepanjang Tahun Anggaran 2022, Inspektorat Jenderal telah melakukan revisi atas DIPA sebanyak 11 (sebelas) kali sehingga sampai dengan Revisi X, IKU-4 memiliki PAGU sebesar Rp334.013.000. Bahwa berdasarkan alokasi anggaran tersebut:

- a. bahwa alokasi anggaran untuk IKU-4 sebesar Rp334.013.000, dari komponen yang meliputi:
  - 1563.EBD.956.054.E Evaluasi PMPRB pada Inspektorat Wilayah I
  - 1564.EBD.956.054.E Evaluasi PMPRB pada Inspektorat Wilayah II
  - 1565.EBD.956.054.E Evaluasi PMPRB pada Inspektorat Wilayah III
  - 1566.EBD.956.054.E Evaluasi PMPRB pada Inspektorat Wilayah IV
  - 1567.EBD.956.054.E Evaluasi PMPRB pada Inspektorat Wilayah V
  - 1568.EBD.956.054.E Evaluasi PMPRB pada Inspektorat Wilayah VI
- b. bahwa berdasarkan alokasi anggaran tersebut, sampai dengan capaian Persentase Nilai RB diatas 33,5 diperoleh dan seluruh kegiatan terlaksana pada akhir tahun, telah direalisasikan anggaran sebesar Rp333.592.001 atas sebesar 99,87% (Data s.d. 30 Desember 2022). Atas realisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Jenderal berhasil memanfaatkan anggaran secara maksimal dalam rangka mengawal Nilai RB Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tabel 3.21

(Alokasi dan Realisasi Anggaran atas Capaian IKU-4)

Alokasi DIPA Induk	Alokasi Revisi ke-XI	Realisasi	Persentase (%)
Rp451.478.000	Rp334.013.000	Rp333.592.001	99,87

## e) Kendala dan Solusi

Dalam rangka pemenuhan capaian pada IKU-4, pada prosesnya terdapat kendala dalam kegiatan penunjang yang selanjutnya dapat dikendalikan dengan solusi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

### 1) Kendala

Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala dalam rangka mewujudkan capaian Nilai PMPRB satuan kerja minimal 33,5 sebagai berikut:

- i. Berdasarkan hasil revidi, dalam hal pelaksanaan PMPRB Tahun 2022 masih banyak unit Eselon I yang belum terpenuhi data dukung lembar kerja Hasil PMPRB;
- ii. Berdasarkan hasil revidi, masih terdapat 1 unit eselon I yang memperoleh nilai PMPRB 33,5 sehingga capaian IKU-4 tidak tercapai sesuai target.

### 2) Solusi

Atas beberapa kendala tersebut, Inspektorat Jenderal telah melakukan beberapa giat dalam rangka mengatasi hal tersebut diantaranya:

- i. Memberikan rekomendasi atas pemenuhan data dukung yang belum lengkap dan merekomendasikan penyusunan rencana aksi pemenuhan data sebagaimana dimaksud;
- ii. Inspektorat Jenderal selaku APIP melakukan penguatan dan pendampingan lebih atas pelaksanaan PMPRB dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Inspektorat Jenderal juga telah melaksanakan workshop PMPRB guna menunjang pelaksanaan PMPRB di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

**A. 5. Capaian dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama 5**

**1. Capaian Indikator Kinerja Utama-5**

Gambar 3.14

(Capaian IKU-5 Inspektorat Jenderal Tahun 2022)



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Inspektorat Jenderal telah membantuk Tim Penilai Internal dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: ITJ-3.OT.03 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2022 tanggal 21 Januari 2022.

Sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal tersebut, maka tugas Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah:

1. Melakukan pendampingan, penilaian/evaluasi dan penguatan terhadap pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilakukan oleh satuan kerja;

2. Menyampaikan rekomendasi kepada Menteri terhadap kelayakan satuan kerja untuk mendapat predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap satuan kerja yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan melaporkannya kepada Menteri.

Selanjutnya Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Internal telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung dalam rangka persiapan Evaluasi Satuan Kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM diantaranya melalui:

4. Pencanaan Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Tahun 2022;
5. Penetapan Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
6. *Focus Group Discussion* (FGD) Persiapan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Tahun 2022;
7. Pengajuan Usulan Satuan Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dari Unit Eselon I kepada TPI Inspektorat Jenderal
8. Penetapan Usulan Satuan Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan Evaluasi oleh TPI;
9. Workshop Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022;
10. Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
11. Pelaksanaan Panel TPI;
12. Penetapan satuan kerja Zona Integritas menuju WBK/ WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Menteri PAN dan RB;
13. Pengusulan Satuan Kerja Berpredikat WBK dan WBBM oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Menpan RB;



14. Monitoring dan Evaluasi Satuan Kerja Yang Sudah Mendapatkan Predikat WBBM setiap 2 Tahun di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
15. Penguatan dan pendampingan TPI pada Satker usulan WBK WBBM terkait persiapan penilaian lapangan oleh TPN;
16. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada satuan kerja dalam rangka menghadapi Pelaksanaan Verifikasi Lapangan oleh Menpan-RB.

Dalam membangun Zona Integritas, Menteri menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK dan WBBM. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK dan WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya:

- 1) Dianggap sebagai unit yang penting dan strategis dalam melakukan pelayanan publik;
- 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar; dan
- 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Setelah unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM ditetapkan, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan komponen-komponen yang harus dibangun. Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil.

#### 1) Komponen Pengungkit

Proses Pembangunan Zona Integritas pada area pengungkit difokuskan pada enam area perubahan yang merupakan bagian dari area perubahan reformasi birokrasi. Pembangunan area pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Area tersebut mencakup penerapan Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dimana dalam setiap area tersebut, setiap unit kerja harus memperhatikan aspek pemenuhan dan reform dalam pembangunan zona integritas.

Dalam membangun Zona Integritas, setiap unit kerja melaksanakan pembangunan enam area tersebut secara konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik dalam kualitas tata kelola pemerintah sehingga dampaknya stakeholder dapat merasakan kualitas layanan yang semakin prima dan bebas dari korupsi.

Tabel 3.22  
(Bobot Komponen Pengungkit)

No	Uraian Komponen	Bobot Area	Bobot Minimal WBK	Bobot Minimal WBBM
<b>A</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>48</b>
<b>A1</b>	<b>Komponen Pengungkit Aspek Pemenuhan</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>22,5</b>
1	Manajemen Perubahan	4,0	2,4	3,0
2	Penataan Tatalaksana	3,5	2,1	2,62
3	Penataan Manajemen SDM	5,0	3,0	3,75
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	5,0	3,0	3,75
5	Penguatan Pengawasan	7,5	4,5	5,62
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,0	3,0	3,75
<b>A2</b>	<b>Komponen Pengungkit Aspek Reform</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>22,5</b>
1	Manajemen Perubahan	4,0	2,4	3,0
2	Penataan Tatalaksana	3,5	2,1	2,62
3	Penataan Manajemen SDM	5,0	3,0	3,75
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	5,0	3,0	3,75
5	Penguatan Pengawasan	7,5	4,5	5,62
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,0	3,0	3,75

## 2) Komponen Hasil

Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel dan Kualitas Pelayanan Publik yang prima.

Tabel 3.23  
(Bobot Komponen Hasil)

No	Uraian Komponen	Bobot Area	Bobot Minimal WBK	Bobot Minimal WBBM
<b>B</b>	<b>Komponen Hasil</b>	<b>40</b>	<b>32,25</b>	<b>35,26</b>
1	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	20,0	18,25	19,50
a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	15,0	15,75	15,75



b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,0	2,5	3,75
2	Kualitas Pelayanan Publik	20,0	14,0	15,76
	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survey Eksternal)	20,0	14,0	15,76

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor SEK-17.OT.03.01 Tahun 2022 tentang Penetapan Usulan Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 dan Surat a.n Menteri Hukum dan HAM, Sekretaris Jenderal Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor SEK-OT.03.03-21 tanggal 28 Juni 2022 hal Usulan Unit/ Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diusulkan 25 (dua puluh lima) satuan kerja sebagai calon satuan kerja menuju WBK dan WBBM dengan rincian sebagai berikut:

**1. 19 (sembilan belas) unit/ satuan kerja untuk predikat menuju WBK;**

- a) Lapas Kelas IIA Sidoarjo
- b) Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun
- c) Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta
- d) Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang
- e) Rutan Kelas I Labuhan Deli
- f) Rutan Kelas IIB Gresik
- g) Rutan Kelas IIB Wates
- h) Rutan Kelas IIB Magetan
- i) Rupbasan Kelas II Blitar
- j) Kanim Kelas I TPI Tanjung Pinang
- k) Kanim Kelas I TPI Tanjung Priok
- l) Kanim Kelas I TPI Jember
- m) Kanim Kelas I TPI Kendari
- n) Kanim Kelas I TPI Padang
- o) Kanim Kelas II TPI Cilegon
- p) Kanim Kelas II TPI Tanjung Uban
- q) Kanim Kelas II TPI Langsa
- r) Kanim Kelas II TPI Sibolga
- s) Kanim Kelas II Non TPI Tobelo

## 2. 6 (enam) unit/ satuan kerja untuk predikat menuju WBBM

- a) Badan Pembinaan Hukum Nasional
- b) Kantor Wilayah DKI Jakarta
- c) Kanim Kelas I TPI Malang
- d) Kanim Kelas I Khusus Ngurah Rai
- e) Kanim Kelas II Non TPI Madiun
- f) Badiklat Jawa Tengah

Berdasarkan Undang-undang Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengumumkan hasil Evaluasi TPN atas usulan satker TPI dengan hasil sebanyak **3 (tiga) Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)**, dengan rincian satuan kerja sebagai berikut:

### 3 Predikat WBK:

- 1) Rupbasan Kelas II Blitar
- 2) Kanim Kelas Non TPI Tobelo
- 3) Kanim Kelas I TPI Kendari

Sehingga apabila dituangkan sebagai capaian, telah dicapai 3 Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM dari 25 satuan kerja yang diusulkan oleh TPI dengan perhitungan capaian sebagai berikut:

$$\% = \frac{\sum \text{Satker berpredikat WBK atau WBBM}}{\sum \text{Satuan Kerja yang diusulkan kepada TPN}} \times 100 \%$$

$$\% = \frac{3}{25} \times 100 \% = 12\%$$

## 2. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama-5

Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi, penilaian capaian atas Indikator Kinerja Utama 5 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Nilai Capaian IKU 5}$$

$$\frac{12\%}{8\%} \times 100\% = 150\%$$





**a) Perbandingan dengan IKU sejenis Tahun 2021**

Tabel 3.24

(Perbandingan dengan IKU-5 Tahun 2021)

Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
IKU-5	Target	Capaian	IKU-5	Target	Capaian	
Persentase Satuan Kerja yang berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM	6%	11,53% <b>(192,17%)</b>	Persentase Satuan Kerja yang berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM	8%	12% <b>(150%)</b>	Bahwa sejak Tahun 2021 sampai dengan 2022, Inspektorat Jenderal berhasil mencapai target pada IKU-5. Secara capaian menunjuk-an peningkatan, namun secara persentase capaian mengalami penurunan dikarenakan target yang meningkat
Formulasi	Jumlah satker yang memperoleh WBK/WBBM dibagi jumlah satker yang diusulkan ke kementerian RB dikali 100%		Formulasi	Jumlah satker yang memperoleh WBK/WBBM dibagi jumlah satker yang diusulkan ke kementerian RB dikali 100%		

**b) Perbandingan realisasi kinerja s.d. Tahun ini dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis**

**1) Perbandingan dengan RPJMN ke IV Tahun 2020 s.d. 2024 (RKP Tahun 2022)**

Dalam RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 di RKP Tahun 2022 Inspektorat Jenderal tidak mengemban Prioritas Nasional. Sedangkan Tahun 2021, Inspektorat mengemban Prioritas Nasional yaitu :

- PN 5 RKP 2021 : Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
- Program Prioritas : Penguatan Upaya Anti Korupsi
- Kegiatan Prioritas : Penguatan Upaya Anti Korupsi
- Sasaran : Berkurangnya Praktik Koruptif
- Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) : Optimalisasi Upaya Anti Suap pada Sistem Peradilan
- Sasaran Pro PN : Menurunnya Praktik Suap pada Sistem Peradilan
- Program : Program Pengawasan dan Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham

Kegiatan : Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah  
I, II, III, IV, V dan VI

Output : Persentase Satuan Kerja yang Berhasil  
Memperoleh Predikat WBK/WBBM

Target dan Satuan Output: 6% dan 54 Satker

Anggaran : Rp8.964.400.000

Capaian output : 11,53% atau 55 dari 477 Satker Usulan

Realisasi Anggaran : Rp8.958.094.698

Berdasarkan data tersebut, maka capaian IKU-5 Inspektorat pada Tahun 2021 telah melampaui target dan satuan output RPJMN ke IV Tahun 2020 s.d. 2024. Sedangkan pada Tahun 2022 capaian PN tidak dapat diperbandingkan dikarenakan pada Tahun 2022 tidak mengemban lagi Prioritas Nasional.

## 2) Perbandingan dengan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Mengacu pada dokumen perencanaan strategis (Renstra Inspektorat Jenderal) IKU- 5 Persentase Satuan Kerja yang Berhasil Memperoleh Predikat WBK/ WBBM mengandung Langkah strategi sebagai berikut:

- i. Menjadi program prioritas nasional dengan menambah target satuan kerja yang berpredikat WBK/ WBBM;
- ii. Meningkatkan kompetensi Tim Penilai Internal;
- iii. Melaksanakan mekanisme penilaian secara online dan tatap muka atas satuan kerja yang diusulkan WBK/ WBBM
- iv. Pembentukan tunas-tunas integritas Kementerian Hukum dan HAM;
- v. Melakukan monitoring atas satuan kerja yang telah memperoleh predikat WBK/ WBBM.

Target IKU- 5 Persentase Satuan Kerja yang Berhasil Memperoleh Predikat WBK/ WBBM yang tertera dalam Renstra Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:



Gambar 3.15

(Target IKU-5 Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024)

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			
			2021	2022	2023	2024
<b>SP1B 3</b>	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Pusat				
	Persentase Satuan Kerja Yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM (Prioritas nasional)		6%	6%	6.5%	6.5%

Bahwa terjadi perubahan Target pada Tahun 2022 pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Pemutakhiran II Tahun Anggaran 2022 tanggal 1 September 2022 yang merubah target pada Dokumen Renstra untuk Tahun 2022 sebesar 6% menjadi sebesar 8%. Sehingga jika dibandingkan dengan Target pada Dokumen Renstra Inspektorat Jenderal, capaian s.d Tahun 2022 IKU- 5 Persentase Satuan Kerja yang Berhasil Memperoleh Predikat WBK/WBBM dari Tahun 2021 dan 2022 sudah tercapai (100%).

**c) Perbandingan dengan perolehan IKU pada K/L lainnya**

IKU-5 Persentase Satuan Kerja yang berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM menjadi target K/L/P, berdasarkan penilaian Kemenpan-RB Tahun 2022 yang tertuang dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 2034 Tahun 2022 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memperoleh 3 satuan kerja berpredikat WBK/WBBM dari 13 satuan kerja di lingkungan Kementerian Aparat Penegak Hukum (APH) yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM. Berikut capaian pada Kementerian Aparat Penegak Hukum pada Tahun 2022:

- a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 3 satuan kerja dari 25 usulan satuan kerja (12%);
- b. Mahkamah Agung sebanyak 6 satuan kerja dari 30 usulan satuan kerja (20%);
- c. Kepolisian RI sebanyak 3 satuan kerja dari 24 usulan satuan kerja (12,5%);

- d. Kejaksanaan Agung sebanyak 1 satuan kerja dari 25 usulan satuan kerja (4%).

Bahwa berdasarkan data tersebut diatas, apabila dibandingkan dengan capaian pada Kementerian Aparat Penegak Hukum lainnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada pada peringkat ke-3 untuk persentase perolehan predikat WBK/WBBM dari satuan kerja yang diusulkan pada lingkup Kementerian Aparat Penegak Hukum.

Tabel 3.25

(Perbandingan Capaian IKU-5 Tahun 2022 dengan IKU Tahun 2021, RPJMN ke IV Tahun 2020 s.d. 2024 dan Renstra Itjen, serta perbandingan dengan LKPP)

Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2021	Target RPJMN-IV (RKP Tahun 2022) dan Target Renstra Itjen	Capaian WBK/WBBM K/L/P
12% 3 Satker memperoleh WBK/WBBM dari TPN dari 25 Usulan <b>(150%)</b>	11,53% 55 Satker memperoleh WBK/WBBM dari TPN dari 477 Usulan <b>(192,17%)</b>	Prioritas Nasional RKP 2022 tentang Pembangunan ZI WBK/WBBM tidak dapat dibandingkan dengan IKU-5  Dibandingkan dengan Renstra Itjen Tahun 2021 dan 2022 tercapai (100%)	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memperoleh 3 satuan kerja berpredikat WBK/WBBM dari 13 satuan kerja di lingkungan Kementerian Aparat Penegak Hukum (APH) yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM

#### d) Realisasi Anggaran atas IKU-5

Dalam pelaksanaannya untuk mencapai Target, Inspektorat Jenderal telah mengalokasikan Anggaran berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-013.02-0/2022 dengan PAGU sebesar Rp76.877.008.000. Atas anggaran tersebut berdasarkan Tabel Kerangka Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal Tahun 2021 s.d. 2024, pada Tahun Anggaran 2022



Inspektorat Jenderal mengalokasikan sebesar Rp76.494.626.<sup>16</sup> Untuk mendukung Sasaran Program Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis teknologi informasi. Sasaran tersebut diturunkan kepada 4 IKU yaitu: Persentase satuan kerja yang nilai AKIP minimal “BB”; Persentase satuan kerja yang nilai capaian RB minimal 90; Persentase satuan kerja yang berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM; dan Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga ke-empat IKU tersebut berada dalam 1 Alokasi Anggaran Sasaran Program.

Sepanjang Tahun Anggaran 2022, Inspektorat Jenderal telah melakukan revisi atas DIPA sebanyak 11 (sebelas) kali. Bahwa sampai dengan Revisi XI IKU-5 memiliki PAGU sebesar Rp 6.346.167.000.

a. bahwa alokasi anggaran untuk IKU-5 sebesar Rp 6.346.167.000 dari komponen yang meliputi:

1563.EBD.965.055 Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di lingkungan Inspektorat Wilayah I

1564.EBD.965.055 Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di lingkungan Inspektorat Wilayah II

1565.EBD.965.055 Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di lingkungan Inspektorat Wilayah III

1566.EBD.965.055 Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di lingkungan Inspektorat Wilayah IV

1567.EBD.965.055 Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di lingkungan Inspektorat Wilayah V

1568.EBD.965.055 Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di lingkungan Inspektorat Wilayah VI

b. Bahwa berdasarkan alokasi anggaran tersebut, sampai dengan capaian satker di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memperoleh predikat WBK/WBBM dan seluruh kegiatan terlaksana pada akhir tahun, telah direalisasikan anggaran sebesar Rp6.340.058.182 atau sebesar 99,90% (Data s.d. 30 Desember

---

<sup>16</sup> Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 s.d. 2024, hlm. 52

2022). Atas realisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Jenderal berhasil memanfaatkan anggaran secara maksimal dalam rangka mengawal Zona Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tabel 3.26

(Alokasi dan Realisasi Anggaran atas Capaian IKU-5)

Alokasi DIPA Induk	Alokasi Revisi ke-XI	Realisasi	Persentase (%)
Rp9.020.282.000	Rp6.346.167.000	Rp6.340.058.182	99,90

### e) Kendala dan Solusi

Dalam rangka pemenuhan capaian pada IKU-5, pada prosesnya terdapat kendala dalam kegiatan penunjang yang selanjutnya dapat dikendalikan dengan solusi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Kendala

Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala dalam rangka mewujudkan capaian satuan kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM sebagai berikut:

- i. Kegagalan Satker dalam proses Evaluasi oleh TPI, yang disebabkan antara lain:
  - a) Kantor Wilayah dan Unit Eselon I tidak optimal dalam memberikan pembinaan terhadap satuan kerja dibawahnya;
  - b) Rendahnya komitmen Pimpinan dan seluruh pegawai Satuan kerja dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
  - c) Terjadinya pergantian Pimpinan (Kepala Satuan Kerja) yang baru, sehingga memungkinkan tidak melakukan atau melanjutkan pembangunan Zona Integritas;
  - d) Masih terdapat Pimpinan satuan kerja berpredikat WBK menuju WBBM yang tidak melakukan proses perubahan menuju WBBM sehingga inovasi dan perubahan yang disajikan adalah inovasi dan perubahan yang disajikan pada saat Evaluasi menuju WBK;
  - e) Masih kurangnya inovasi yang dilakukan oleh Satker;
  - f) Inovasi yang disajikan oleh satuan kerja menuju WBBM tidak mengalami perubahan dari inovasi yang disajikan pada saat



- mendapatkan predikat WBK sehingga dinilai tidak melakukan proses perubahan yang berkelanjutan serta tidak menunjukkan peningkatan Capaian Kinerja dan Capaian Target Kinerja;
- ii. Adanya pengumuman dari Kementerian PAN-RB tentang Hasil Seleksi Administrasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022 yang membatasi 25 Satuan Kerja yang dapat diusulkan untuk Evaluasi oleh TPN;
  - iii. Belum diteruskannya Laporan Evaluasi ZI menuju WBK/WBBM Tahun 2022 dari Kementerian PAN-RB kepada Kementerian Hukum dan HAM;
  - iv. Tidak terbukanya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku TPN atas Indikator Penilaian yang menentukan keberhasilan satuan kerja dalam memperoleh predikat WBK/WBBM.

## 2) Solusi

Atas beberapa kendala tersebut, Inspektorat Jenderal telah melakukan beberapa giat dalam rangka mengatasi hal tersebut diantaranya:

- i. Dalam rangka meningkatkan keberhasilan satker dalam memperoleh predikat WBK/WBBM, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan penguatan terhadap APIP sebagai TPI melalui kegiatan Kegiatan FGD Sosialisasi dan Asistensi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM serta meningkatkan atensi terhadap komitmen Pimpinan dan seluruh pegawai Satuan Kerja dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dengan menggunakan sistem *Reward* dan *Punishment*;
- ii. Terhadap pimpinan (Kepala Satuan Kerja) yang melakukan pergantian, diperlukan adanya *transfer knowledge* saat serah terima jabatan;
- iii. Menyarankan kepada Pimpinan satuan kerja berpredikat WBK menuju WBBM agar membuat inovasi baru atau melakukan *upgrade* terhadap inovasi yang telah disajikan saat Evaluasi menuju WBK agar dinilai telah melakukan proses perubahan yang berkelanjutan

serta menunjukkan peningkatan Capaian Kinerja dan Capaian Target Kinerja;

- iv. Terkait kendala laporan evaluasi ZI oleh TPN yang belum diserahkan, sehubungan dengan tidak diberikannya laporan Evaluasi TPN pada Tahun Anggaran sebelumnya Inspektorat Jenderal turut menyusun Laporan atas pelaksanaan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM sepenuhnya berdasarkan sudut pandang APIP sebagai TPI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- v. Pada Tahun Anggaran 2022, dalam rangka mewujudkan target satuan kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM, Inspektorat Jenderal terus meningkatkan koordinasi dengan K/L Pembina KemenPAN-RB selaku TPN.

## A. 6. Capaian dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama 6

### 1. Capaian Indikator Kinerja Utama-6

Gambar 3.16

(Capaian IKU-6 Inspektorat Jenderal Tahun 2022)



Berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: ITJ-07.OT.02.02 Tahun 2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI). Persepsi Integritas merupakan salah satu tolak ukur Reformasi Birokrasi dan dalam rangka mengukur persepsi integritas perlu melakukan penilaian mandiri persepsi integritas (PMPI) untuk mengukur salah satu pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkumham dan IKU Inspektorat Jenderal. Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) Tahun 2022 merupakan penilaian yang dilakukan oleh





Inspektorat Jenderal untuk mengukur tingkat integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dilaksanakan melalui survei *online* pada *website* <http://itjen.kemenkumham.go.id>.

Sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman PMPI, Pelaksanaan Penilaian Persepsi Integritas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2022 berupa:

a) Pemberitahuan Pelaksanaan Survei PMPI

Pemberitahuan akan waktu pelaksanaan survei PMPI diinformasikan melalui surat Inspektur Jenderal kepada Pimpinan Satuan Kerja (Pimpinan Unit Utama, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Satuan Kerja) melalui surat Inspektur Jenderal kepada para Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama Nomor ITJ.OT.02.02-04 Tanggal 7 Juli 2022 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Survei Penilaian Mandiri Persepsi Integritas Tahun 2022.

b) Sosialisasi Teknik Tata Cara Pengisian PMPI

Untuk memperoleh kesamaan persepsi dan memahami tata cara pengisian survei PMPI, dilaksanakan Sosialisasi kepada responden (pegawai Kemenkumham), melalui mekanisme zoom meeting tanggal 2 Agustus 2022 diikuti oleh total 950 peserta dari Unit Eselon I dan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu Pedoman Teknis Tata cara Pengisian PMPI juga di upload di website Itjen, demikian pula tentang update berkala setiap senin tentang rekapitulasi jumlah responden yang mengisi survei.

c) Pelaksanaan PMPI Online

Merujuk surat Inspektur Jenderal Nomor ITJ.OT.02.02-04 Tgl 16 Juni 2021 tersebut, bahwa survei PMPI dilaksanakan tanggal 25 Juli s.d 30 September 2022 melalui mekanisme online pada website <http://itjen.kemenkumham.go.id> pada menu survei PMPI. Pada Tahun 2022 responden PMPI Internal tidak dibatasi/ditentukan respondennya per unit utama, per kanwil dan per UPT, sehingga untuk responden tidak dibatasi dengan maksud agar setiap pegawai mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk ikut berpartisipasi mengisi survei PMPI dimaksud. PMPI dilaksanakan melalui 2 mekanisme pengukuran yaitu survei PMPI Internal untuk mengukur tingkat persepsi integritas pegawai

Kementerian Hukum dan HAM serta PMPI eksternal untuk mengukur tingkat persepsi integritas atas layanan yang diberikan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Responden PMPI internal adalah pegawai Kemenkumham dan responden PMPI eksternal adalah masyarakat/pengguna layanan Kemenkumham. Indikator survei sebagaimana telah ditetapkan dalam Pedoman PMPI pada halaman berikut:

Tabel 3.26  
(Indikator Survei Internal PMPI)

Budaya Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Akses Data Sulit</li> <li>b. Sarat Kepentingan Pribadi</li> <li>c. Adanya calo</li> <li>d. Perlakuan SARA</li> <li>e. Perintah Atasan Tidak Sesuai Aturan</li> <li>f. Suap/gratifikasi</li> <li>g. Adanya honor tidak resmi</li> <li>h. Perlakuan buruk atasan kepada bawahan yang menolak perintah</li> </ul>
Sistem Anti Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sosialisasi anti korupsi/pungutan liar</li> <li>b. Sistem Pencegahan Korupsi/pungutan liar</li> <li>c. Penindakan pelaku korupsi/pungutan liar</li> <li>d. Perlindungan pelapor</li> </ul>
Pengelolaan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan Pegawai sarat KKN</li> <li>b. Mutasi dan Promosi Karir sarat KKN</li> <li>c. Kesempatan Pengembangan Kompetensi SDM sarat KKN</li> </ul>
Pengelolaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelewengan Anggaran</li> <li>b. Penyelewengan Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>c. Penggunaan Anggaran Tidak Sesuai dengan Perencanaan</li> <li>d. Proyek Fiktif</li> <li>e. Penyelewengan Perjalanan Dinas</li> <li>f. Pemotongan Honor Tidak Sah</li> </ul>

Tabel 3.27  
(Indikator Survei Eksternal PMPI)

Budaya Integritas Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Informasi Sulit Didapat</li> <li>b. Prosedur Sulit</li> <li>c. Layanan Tidak Sesuai Prosedur</li> <li>d. Pelayanan Diskriminatif</li> </ul>
------------------------------	---



	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Kampanye Anti Korupsi</li> <li>f. Pengaduan Pungutan Liar dan/atau Korupsi</li> <li>g. Perlindungan Pelapor</li> <li>h. Tindak Lanjut Laporan Masyarakat Terkait Pungutan Liar dan/atau Korupsi</li> </ul>
Budaya Integritas Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak Jujur</li> <li>b. Sarat Kepentingan Pribadi</li> <li>c. Menyalahi Wewenang</li> <li>d. Adanya Suap/gratifikasi</li> <li>e. Adanya Pungutan Liar/Pemerasan</li> <li>f. Pelayanan Publik Tidak Baik</li> <li>g. Keberadaan Calo</li> </ul>

d) Data Responden Survei PMPI Tahun 2022

Tabel 3.28  
(Data Responden Survei PMPI Tahun 2022)

Kegiatan	Tahun 2022
Survei PMPI Internal	Jumlah Responden : 28.501 pegawai
	Indikator terendah: Sistem Anti Korupsi
	Indeks Internal : 94,68
Survei PMPI Eksternal	Jumlah Responden : 4.209 orang
	Indikator terendah: Budaya Integritas Organisasi
	Indeks Eksternal : 95,84
Penilaian Lapangan	Sampling 4 (empat) Kanwil / perwakilan UPT yaitu Kanwil DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan
Indeks Rata-rata	95,26 (sangat baik)

e) Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) Internal Tahun 2022

Sebaran responden internal persatuan kerja, diikuti oleh sebanyak 28.501 pegawai yaitu 789 pegawai unit eselon I dan 27.712 pegawai Kantor Wilayah serta UPT. Hanya di Kanwil Nusa Tenggara Barat dan Papua tidak ada pegawai yang berpartisipasi mengisi survei PMPI internal, tanpa memberikan alasan sedangkan pada saat sosialisasi hadir dan ada perwakilan.

Data demografi dan responden internal sebagai berikut:

Tabel 3.29

(Data Demografi dan Responden Survei PMPI Internal Tahun 2022)

No	Jenis Kelamin	Jumlah	No	Range Usia	Jumlah
1	Laki-laki	21.185	1	18 - 30 Tahun	10.948
2	Perempuan	7.316	2	31 - 45 Tahun	12.703
			3	46 - 60 Tahun	4.841
			4	Lebih dari 60 Tahun	9
	<b>Total :</b>	<b>28.501</b>		<b>Total :</b>	<b>28.501</b>

Akumulasi dari hasil penilaian survei online PMPI Internal baik di unit Eselon Utama, Kantor Wilayah beserta UPT perindikator survei PMPI internal sebagai berikut:

Tabel 3.30

(Hasil Survei Internal PMPI *Online* Tahun 2022)

Budaya Organisasi	Sistem Anti Korupsi	Pengelolaan SDM	Pengelolaan Anggaran	Nilai Rata-Rata
22,56	15,16	16,40	40,56	94,68

Berdasarkan perbandingan 4 (empat) indikator survei PMPI Internal di peroleh nilai terendah adalah pada indikator Sistem Anti Korupsi (15,16). Nilai indikator Sistem Anti Korupsi tersebut naik sebesar 0.24 dari tahun 2021 (14,92) Hal tersebut dapat dimaknai bahwa walaupun telah dilakukan sosialisasi anti korupsi, namun masih terdapat pegawai:

- a. Belum memahami tentang sistem anti korupsi
- b. Belum mengetahui bahwa Kemenkumham telah ada sistem pencegahan korupsi
- c. Tidak percaya bahwa sistem anti korupsi di Kemenkumham itu efektif mencegah dan mampu membuat pegawai menghindari korupsi
- d. Tidak percaya bila ada pegawai yang berbuat KKN akan diproses secara administrasi dan/ atau hukum
- e. Melihat/ mendengar/ melaporkan pelaku KKN di Kemenkumham
- f. Tidak percaya pegawai yang melaporkan praktik korupsi di instansi Anda akan mendapat perlindungan
- g. Tidak tahu bahwa Kemenkumham terdapat mekanisme perlindungan pelapor



Dari kelemahan tersebut agar dilakukan sosialisasi Sistem Anti Korupsi secara berkala kepada seluruh pegawai sehingga pegawai bukan hanya mengetahui tapi juga memahami sistem anti korupsi di Kementerian Hukum dan HAM.

Bahwa secara umum pegawai menilai Kemenkumham adalah organisasi yang memiliki integritas sangat baik dari tahun ke tahun dan percaya bahwa survei PMPI dapat memberi masukan untuk mencegah korupsi pada Kemenkumham. Dari 28.501 pegawai, terdapat :

- 534 (0.019%) Pegawai yang selama satu tahun terakhir pernah mendengar/melihat pegawai menerima suap / gratifikasi (uang, barang, fasilitas) dari pihak luar, berkisar Rp.5jt sd Rp.10jt.
- 715 (0,025%) pegawai pernah melihat/ mendengar ada calo yang mengurus sesuatu
- 282 (0.009%) pegawai pernah melihat/ mendengar atasan menerima honor tidak resmi
- 500 (0,017%) pegawai melihat/ mendengar seseorang memberikan hadiah (uang, barang, fasilitas) terkait dengan kebijakan karir (mutasi, promosi, diklat dan lainnya)

f) Penilaian Mandiri Persepsi Integritas (PMPI) Eksternal Tahun 2022

Sebaran responden eksternal/pengguna layanan sebanyak 10.365 responden, terdiri dari 814 pengguna layanan unit utama dan 9551 pengguna layanan Kantor Wilayah termasuk Unit Pelaksana Teknis.

Sebaran responden eksternal/pengguna layanan sebanyak 4209 responden, terdiri dari 98 pengguna layanan unit utama dan 4111 pengguna layanan Kantor Wilayah termasuk Unit Pelaksana Teknis paling banyak diisi oleh responden yang lebih dari 5 kali menggunakan layanan kemenkumham, rata-rata berpendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta dan PNS dan untuk kepentingan pribadi. Data responden eksternal sebagai berikut :

Tabel 3.31  
(Demografi Survei Eksternal PMPI *Online* Tahun 2022)

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2.489
2	Perempuan	1.720
<b>Total :</b>		<b>4.209</b>

No	Berkaitan dengan Instansi	Jumlah
1	1 Kali	1.050
2	2 Kali	432
3	3 Kali	273
4	4 Kali	147
5	5 Kali	169
6	Lebih dari 5 Kali	2.138
<b>Total :</b>		<b>4.209</b>

No	Pendidikan	Jumlah
1	S3	8
2	S2	292
3	S1	1.244
4	SMA	2.111
5	SMP	216
6	SD	103
7	Diploma	227
8	Tidak Pernah Sekolah	8
<b>Total :</b>		<b>4.209</b>

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Karyawan swasta	499
2	wiraswasta	612
3	PNS	1.587
4	TNI-POLRI	41
5	Petani-Nelayan	103
6	Pelajar-Mahasiswa	356
7	Ibu RumahTangga	460
8	Profesional(pengacara, akuntan dll)	162
9	tidak bekerja	103
10	Lainnya	286
<b>Total :</b>		<b>4.209</b>

No	kepentingan	Jumlah
1	Kepentingan keluarga-pribad	2.969
2	kepentingan orang lain	381
3	pekerjaan-biro jasa	859
<b>Total :</b>		<b>4.209</b>

Akumulasi dari hasil penilaian survei *online* PMPI eksternal baik di unit Eselon Utama, Kantor Wilayah beserta UPT perindikator survei PMPI eksternal sebagai berikut:

Tabel 3.32  
(Hasil Survei Eksternal PMPI *Online* Tahun 2022)

Budaya Integritas Organisasi	Budaya Integritas Kerja	Nilai Rata-rata
<b>31,96</b>	<b>63,88</b>	<b>95,84</b>
34,80%	65,20%	

Dari data tersebut bahwa hasil akhir Indeks Persepsi Integritas Eksternal diperoleh sebesar **95,84**.

Dari perbandingan 2 (dua) indikator survei PMPI Internal di peroleh nilai terendah adalah pada Budaya Integritas Organisasi (31,96) walaupun terdapat kenaikan dari tahun 2021 sebesar 1,04 (30.92). Hal tersebut dapat dimaknai bahwa walaupun Kemenkumham sudah melakukan



kampanye /himbauan anti korupsi, melalui pemasangan spanduk, banner, stiker, poster dan lainnya, dalam upaya pencegahan korupsi, namun masih terdapat pengguna layanan yang menilai :

- a. Pegawai Kemenkumham belum menerapkan transparansi dan prosedur kerja dengan baik
- b. Pegawai Kemenkumham memberikan perlakuan khusus atau prioritas pada orang tertentu (Perlakuan khusus/jalur cepat, prioritas, memotong antrian dan lainnya. Memberikan layanan khusus pada orang/kelompok yang membayar, memiliki hubungan dengan pejabat dan lainnya).
- c. Bila pegawai melakukan korupsi tidak akan diproses secara hukum sesuai dengan kesalahannya.
- d. Kemenkumham belum memiliki tata cara menerima laporan masyarakat terkait korupsi, gratifikasi, pungli dan tersedia nomor, saluran atau orang yang bisa dihubungi.
- e. Kemenkumham tidak akan memberikan perlindungan untuk masyarakat yang melaporkan korupsi, gratifikasi, pungli dan lainnya (memberikan perlindungan dan menjaga kerahasiaan pelapor).
- f. Bila ada laporan masyarakat tentang korupsi tidak akan ditindaklanjuti/tidak melakukan penyelidikan kejadian, memproses pelaku, pemberian sanksi kepada pegawainya.

Dari kelemahan tersebut agar Pimpinan unit kerja melakukan pengawasan lebih ketat dan meningkatkan integritas pegawai di jajaran masing-masing untuk menerapkan kode etik pegawai Kemenkumham, kode etik profesi serta core value ASN Berakhlak.

- g) Hasil Penilaian Mandiri Persepsi Integritas Secara Keseluruhan  
Bahwa telah diuraikan diatas hasil penilaian PMPI Internal memperoleh nilai sebesar **94,68** dan PMPI eksternal memperoleh nilai sebesar **95,84**. Sehingga Penilaian Mandiri Persepsi Integritas secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar **95,26**.
- h) Penilaian/Survei Lapangan PMPI  
PMPI Tahun 2022 dilaksanakan survei/penilaian lapangan pada 4 (empat) satuan kerja yaitu D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat.

## 2. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama-6

Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi, penilaian capaian atas Indikator Kinerja Utama 6 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Nilai Capaian IKU 6}$$

$$\frac{95,26}{80} \times 100\% = 119,07\%$$

### a) Perbandingan dengan IKU sejenis Tahun 2021

Tabel 3.33

(Perbandingan IKU-6 dengan IKU Tahun 2021)

Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
IKU-6	Target	Capaian	IKU-6	Target	Capaian	
Indeks Persepsi Integritas	66,0	91,82 (139,12%)	Indeks Persepsi Integritas	80,0	95,26 (119,07%)	Bahwa berdasarkan data capaian pada tahun 2021 dan 2022, Indeks Persepsi Integritas Kemenkumham berdasarkan survei PMPI berhasil meningkat dari 91,82 menjadi 95,26 dengan persentase capaian yang menurun disebabkan karena naiknya target capaian pada tahun 2022 dibandingkan 2021.
Formulasi	Hasil penilaian PMPI Tahun 2021		Formulasi	Hasil penilaian PMPI Tahun 2022		

Secara lebih detail dapat dilihat perbandingan hasil survei PMPI Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.34

(Rincian Perbandingan Hasil Survei PMPI Tahun 2022 dan 2021)

Keterangan	Tahun 2021	Tahun 2022
Survei PMPI Internal	Jumlah Responden : 43.115 pegawai	Jumlah Responden : 28.501 pegawai
	Indikator terendah: Sistem Anti Korupsi	Indikator terendah: Sistem Anti Korupsi
	Indeks Internal : 88,89	Indeks Internal : 94.68





Survei Eksternal	PMPI	Jumlah Responden : 10.365 orang	Jumlah Responden : 4.209 orang
		Indikator terendah: Budaya Integritas Organisasi	Indikator terendah: Budaya Integritas Organisasi
		Indeks Eksternal : 94,75	Indeks Eksternal : 95,84
Penilaian Lapangan		Tidak dilakukan dikarenakan adanya Kebijakan Pemerintah (PPKM) dan dilakukan Refocusing anggaran / penghematan belanja negara untuk pencegahan dan penaganna Covid-19	Sampling 4 (empat) Kanwil /perwakilan UPT yaitu Kanwil DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan.
Indeks Rata-rata		91,82 (sangat baik)	95,26 (sangat baik)

Bahwa berdasarkan sebagaimana disampaikan dalam tabel sebelumnya, tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan PMPI serta indeks persepsi itegritas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cenderung meningkat, hal ini dapat diidentifikasi dengan meningkatnya meningkatnya indeks internal dan eksternal pada Tahun 2021 ke Tahun 2022. Selain itu secara keseluruhan terdapat peningkatan Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar 3,75% dari indeks persepsi integritas sebesar 91,82 (Tahun 2021) menjadi 95,26 (Tahun 2022).

**b) Perbandingan realisasi kinerja s.d Tahun ini dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis**

**1) Perbandingan dengan RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 (RKP Tahun 2022)**

Seperti halnya penjelasan pada IKU-1 diatas bahwa IKU-6 Indeks Persepsi Integritas tidak dapat dibandingkan dengan Target RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 (RKP Tahun 2022) dikarenakan dalam RPJMN tersebut di Tahun 2022 Inspektorat Jenderal tidak mengemban Kegiatan Prioritas Nasional, sedangkan di Tahun 2021 Inspektorat Jenderal mengemban Kegiatan Prioritas Nasional Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM.

## 2) Perbandingan dengan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Mengacu pada dokumen perencanaan strategis (Renstra Inspektorat Jenderal) IKU- 6 Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM mengandung Langkah strategi sebagai berikut:

- i. Penilaian Mandiri Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM secara *online*;
- ii. Kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan survei penilaian integritas nasional;
- iii. Menyusun Permenkumham tentang Budaya Integritas.

Target IKU- 6 Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM yang tertera dalam Renstra Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Gambar 3.17

(Target IKU-6 Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024)

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			
			2021	2022	2023	2024
SP1B 3	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Pusat				
	Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM		66,0	67,0	68,0	69,0

Bahwa terjadi perubahan Target pada Tahun 2022 pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Pemutakhiran II Tahun Anggaran 2022 tanggal 1 September 2022 yang merubah target pada Dokumen Renstra untuk Tahun 2022 dengan nilai 67 menjadi 80. Sehingga jika dibandingkan dengan Target pada Dokumen Renstra Inspektorat Jenderal, capaian s.d Tahun 2022 IKU- 6 Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM dari Tahun 2021 dan 2022 sudah tercapai (100%).

### c) Perbandingan dengan perolehan IKU pada K/L Lainnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) mengembangkan kegiatan Survei Penilaian Integritas sejak tahun 2016. Di tahun 2022, kegiatan survei kembali



dilakukan pada K/L/P secara elektronik dan dengan metode *Computer-Assisted Personal Interview (CAPI)* untuk beberapa daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan jaringan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia turut berpartisipasi sebagai salah satu Kementerian yang dilakukan survei penilaian dengan nilai Indeks sebesar 78,48. Peroleh indeks integritas tersebut menempatkan posisi indeks integritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada urutan 51 dari 87 K/L yang turut dilakukan penilaian. Atas survei tersebut KPK sebagai penyelenggara menerbitkan laporan Survei Penilaian Integritas Tahun 2022 dengan hasil sebagaimana terlampir pada tabel berikut:

Tabel 3.34

(Indeks Integritas SPI KPK pada Kementerian/Lembaga Tahun 2022)

No Urut	Kementerian/Lembaga	Nilai SPI
1	BANK INDONESIA	87,28
2	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	85,48
3	OTORITAS JASA KEUANGAN	85,24
4	LEMBAGA KEBUJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	84,68
5	BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI	84,60
6	BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	84,58
7	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	84,54
8	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	84,04
9	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	83,97
10	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	83,68
11	KEMENTERIAN KEUANGAN	83,68
12	SEKRETARIAT KABINET	83,49
13	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	83,44
14	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	83,44
15	MAHKAMAH KONSTITUSI	83,15
16	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	83,07

17	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)	82,88
18	BADAN PUSAT STATISTIK	82,80
19	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	82,79
20	LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN	82,77
21	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)	82,71
22	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	82,65
23	BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA	82,33
24	BPJS KETENAGAKERJAAN	81,93
25	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	81,81
26	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	81,76
27	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	81,53
28	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	81,24
29	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	81,10
30	BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAP	81,00
31	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	80,75
32	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	80,66
33	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	80,40
34	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	80,34
35	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	80,32
36	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	80,31
37	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	80,09
38	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	80,08
39	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	80,06
40	DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL	79,94
41	BPJS KESEHATAN	79,83
42	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	79,73
43	BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	79,56
44	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	79,45
45	KEMENTERIAN INVESTASI/ BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)	79,38
46	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	79,21
47	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	78,96
48	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	78,81



49	KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA	78,71
50	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	78,55
51	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	78,48
52	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	78,37
53	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	78,23
54	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	78,15
55	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	78,04
56	RADIO REPUBLIK INDONESIA	77,73
57	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL	77,64
58	KOMISI YUDISIAL	77,46
59	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	77,43
60	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	77,28
61	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI (BRIN)	76,88
62	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	76,47
63	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	76,27
64	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	76,03
65	KEJAKSAAN AGUNG	75,82
66	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	75,60
67	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	75,56
68	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	75,52
69	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	75,18
70	KEMENTERIAN KESEHATAN	75,15
71	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	74,88
72	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	74,64
73	MAHKAMAH AGUNG	74,60
74	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	74,55
75	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	74,21
76	KEMENTERIAN AGAMA	74,16

77	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	73,59
78	KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)	73,23
79	TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	73,01
80	KEMENTERIAN SOSIAL	72,68
81	KEMENTERIAN PERTANIAN	72,67
82	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	72,61
83	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	72,53
84	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG (BADAN PERTANAHAN NASIONAL)	70,87
85	KOMISI KEJAKSAAN	70,35
86	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	66,49
87	KOMISI PENYIARAN INDONESIA	65,85

Tabel 3.35

(Perbandingan Capaian IKU-6 Tahun 2022 dengan IKU Tahun 2021, RPJMN ke IV Tahun 2020 s.d. 2024 dan Target Renstra Itjen serta perbandingan dengan K/L lainnya)

Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2021	Target RPJMN-IV (RKP Tahun 2022) dan Target Renstra Itjen	Capaian Nilai Indeks Integritas Tahun 2020 dari K/L
<b>95,26 (119,07%)</b>	<b>91,82 (139,12%)</b>	Prioritas Nasional RKP 2022 tentang Pembangunan ZI WBK/ WBBM tidak dapat dibandingkan dengan IKU-6  Dibandingkan dengan Renstra Itjen Tahun 2021 dan 2022 tercapai (100%)	Berdasar Laporan Survei Penilaian Integritas Tahun 2022 bahwa Indeks Integritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah <b>78,48</b> dimana Kemenkumham memperoleh urutan ke-51 dari 87 K/L yang turut dilakukan survei penilaian.

#### d) Realisasi Anggaran atas IKU-6

Dalam pelaksanaannya untuk mencapai Target, Inspektorat Jenderal telah mengalokasikan Anggaran berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-013.02-0/2022 dengan PAGU sebesar Rp76.877.008.000. Atas anggaran tersebut berdasarkan Tabel Kerangka Kinerja dan



Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen Unit Inspektorat Jenderal Tahun 2021 s.d. 2024, pada Tahun Anggaran 2022 Inspektorat Jenderal mengalokasikan sebesar Rp76.494.626.000<sup>17</sup> untuk mendukung Sasaran Program Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis teknologi informasi. Sasaran tersebut diturunkan kepada 4 IKU yaitu: Persentasi satuan kerja yang nilai AKIP minimal “BB”; Persentase satuan kerja yang nilai capaian RB minimal 90; Persentase satuan kerja yang berhasil memperoleh Predikat WBK/WBBM; dan Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga ke-empat IKU tersebut berada dalam 1 Alokasi Anggaran Sasaran Program.

Sepanjang Tahun Anggaran 2022, Inspektorat Jenderal telah melakukan revisi atas DIPA sebanyak 11 (sebelas) kali sehingga sampai dengan Revisi XI, IKU-6 memiliki PAGU akhir sebesar Rp31.956.407.000. Bahwa berdasarkan alokasi anggaran tersebut, sampai dengan capaian Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diperoleh dan seluruh kegiatan terlaksana pada akhir tahun, telah direalisasikan anggaran sebesar Rp31.213.614.520 atau sebesar 97,67%. Hal ini diperoleh dari realisasi atas pelaksanaan PMPI, UPP, sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP dan kegiatan lainnya di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang mendukung pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal untuk mewujudkan indeks integritas. Atas realisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Jenderal berhasil melaksanakan kegiatan dengan optimal.

Tabel 3.36

(Alokasi dan Realisasi Anggaran atas Capaian IKU-6)

<b>Alokasi DIPA Induk</b>	<b>Alokasi Revisi ke-XI</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Rp41.499.278.000	Rp31.956.407.000	Rp31.213.614.520	97,67

<sup>17</sup> Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 s.d. 2024, hlm. 52

## e) Kendala dan Solusi

Dalam rangka pemenuhan capaian pada IKU-6, pada prosesnya terdapat kendala dalam kegiatan penunjang yang selanjutnya dapat dikendalikan dengan solusi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

### 1) Kendala

- i. Dasar hukum belum optimal karena masih berpedoman pada Pedoman Penilaian Persepsi Integritas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Jenderal nomor ITJ-07.OT.02.02 tanggal 20 Juni 2019 dan belum terdapat dasar hukum yang lebih tinggi, mengingat yang dilakukan survei adalah seluruh Kementerian Hukum dan HAM bukan hanya di lingkungan Inspektorat Jenderal. Hal ini terbukti dengan masih terdapat Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis yang belum berpartisipasi mengikut survei PMPI. Selain itu, jumlah responden di UPT bervariasi sehingga sebaran responden belum seluruhnya mewakili hasil survei di UPT dimaksud;
- ii. Masih terdapat Satuan Kerja yang belum berpartisipasi secara aktif dalam pengisian survei PMPI;
- iii. Terdapat penurunan jumlah responden pelaksanaan survei PMPI Tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### 2) Solusi

- i. Terkait dasar hukum yang belum optimal karena masih berpedoman pada Pedoman Penilaian Persepsi Integritas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Jenderal nomor ITJ-07.OT.02.02 tanggal 20 Juni 2019 dan belum terdapat dasar hukum yang lebih tinggi, Inspektorat Jenderal beriringan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi sekaligus menggaungkan bahwa Tahun 2023 survei PMPI dan SPI KPK akan dilaksanakan beriringan;
- ii. Bahwa pada Tahun 2022, dalam upaya meningkatkan responden dan keandalan atas capaian hasil survei, koordinator PMPI pada Inspektorat Jenderal dalam hal ini Bagian Program dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan Penilaian Lapangan atas Survei PMPI yang pada tahun berjalan dilakukan pada 4 (empat) Kantor Wilayah yaitu D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat.





- iii. Meminta komitmen kepada pimpinan unit kerja untuk melakukan pengawasan lebih untuk meningkatkan integritas pegawai di jajaran masing-masing.
- iv. Mulai Tahun 2023, untuk lebih fokus ke satu saja survei terkait integritas maka untuk penilaian IKU Indeks Integritas menggunakan hasil Penilaian SPI-KPK sehingga PMPI tidak akan dilakukan.

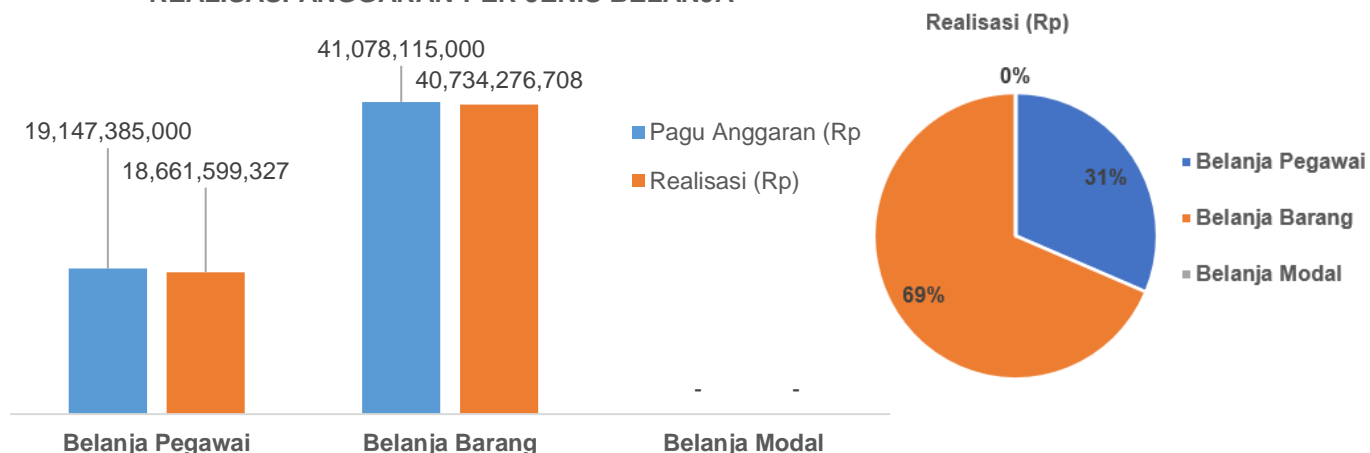
## B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan kinerja dan capaian Tahun 2022, Inspektorat Jenderal telah mengalokasikan Anggaran berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-013.02-0/2022 dengan PAGU sebesar Rp76.877.008.000 dan telah mengalami 11 (sebelas) kali revisi DIPA. Berdasarkan data SAKTI, realisasi anggaran belanja keseluruhan sampai dengan 30 Desember 2022 sebesar Rp59.395.876.035 (98,62%) dari total pagu Rp60.225.500.000 dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 3.18  
(Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal per 30 Desember 2022)

Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
Belanja Pegawai	19.147.385.000	18.661.599.327	97,46	485.785.673
Belanja Barang	41.078.115.000	40.734.276.708	99,16	343.838.292
Belanja Modal	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>60.225.500.000</b>	<b>59.395.876.035</b>	<b>98,62</b>	<b>829.623.965</b>

### REALISASI ANGGARAN PER JENIS BELANJA



Adapun realisasi anggaran Inspektorat Jenderal berdasarkan jenis kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.37

(Anggaran Per Program/Kegiatan Tahun 2022 per 30 Desember 2022)

Per Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham	60.225.500.000	59.395.876.035	98,62%
Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	4.524.584.000	4.502.105.582	99,50%
Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	4.788.899.000	4.769.515.115	99,60%
Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	4.865.029.000	4.844.272.223	99,57%
Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	4.317.751.000	4.310.739.640	99,84%
Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	4.197.619.000	4.181.579.399	99,62%
Kegiatan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	5.740.232.000	5.733.574.800	99,88%
Kegiatan Dukungan Manajemen Sekretariat ITJEN	31.791.386.000	30.054.089.276	97,68%

Selain anggaran yang terdapat dalam DIPA Inspektorat Jenderal Tahun 2022, terdapat pula BMN yang diperoleh maupun yang dikeluarkan. Transfer keluar/ transfer masuk merupakan perpindahan asset/ kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L dan antara K/L dengan BA-BUN. Transfer masuk sampai dengan 25 Desember 2022 sebesar Rp226.600.000 yang merupakan transfer Komputer tablet Apple iPad Pro dan Laptop Asus X515. Selain itu transfer masuk berupa Software Komputer (Website Inspektorat Jenderal) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.38

(Transfer Masuk BMN Tahun 2022)

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai (Rp)
1	Apple iPad Pro (4 unit)	Ditjen Pemasarakatan	160.000.000
2	Laptop Asus X515 (3 unit)	Ditjen Pemasarakatan	66.600.000
3	Software Komputer (Website Inspektorat Jenderal)	Ditjen Kekayaan Intelektual	-
Jumlah			226.600.000



Sedangkan transfer keluar terdiri dari Mini Bus (1 Unit, Penumpang 14 Orang kebawah), Sedan Toyota Etios (2 unit), Sedan Toyota Vios (1 Unit) yang diserahkan kepada Lapas Kelas IIA Yogyakarta, Rutan Kelas IIB Banyumas, Rupbasan Kelas II Wates, dan Rupbasan Kelas II Purbalingga.

Selanjutnya disajikan perbandingan realisasi anggaran Tahun 2021 dengan Tahun 2022, sebagai berikut: (Data yang disajikan Tahun 2022 per 30 Desember 2022)

Tabel 3.39  
(Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2021)

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	% Realisasi
<b>TAHUN 2022</b>				
Belanja Pegawai	Rp 19.147.385.000	Rp 18.661.599.327	Rp 485.785.673	97,46%
Belanja Barang	Rp 41.078.115.000	Rp 40.734.276.708	Rp 343.838.292	99,16%
Belanja Modal	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%
Jumlah	Rp 60.225.500.000	Rp 59.395.876.035	Rp 829.623.965	<b>98,62%</b>
<b>TAHUN 2021</b>				
Belanja Pegawai	Rp 18.061.223.000	Rp 17.858.239.078	Rp 202.983.922	98,88%
Belanja Barang	Rp 39.123.617.000	Rp 38.659.803.235	Rp 463.813.765	98,81%
Belanja Modal	Rp 4.658.158.000	Rp 4.526.349.417	Rp 131.808.583	97,17%
Jumlah	Rp 61.842.998.000	Rp 61.044.391.730	Rp 798.606.270	<b>98,71%</b>

Dibandingkan dengan anggaran pada Tahun 2021, alokasi anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2022 mengalami penurunan namun tidak menutup upaya pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien dalam mencapai kinerja Inspektorat Jenderal. Dalam DIPA Induk Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-013.02-0/2022 dengan PAGU sebesar Rp76.877.008.000 dan telah mengalami 11 (sebelas) kali revisi DIPA sebagai berikut:

- 1) Revisi-1, disahkan dengan Surat a.n. Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-851/AG/AG.5/2021 tanggal 15 Desember 2021;
- 2) Revisi-2, disahkan dengan Surat a.n. Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-101/AG/AG.5/2022 tanggal 31 Maret 2022;
- 3) Revisi-3, disahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Nomor S-2447/WPB.12/2022 tanggal 27 April 2022;
- 4) Revisi-4, disahkan dengan Surat a.n. Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-216/AG/AG.5/2022 tanggal 4 Juni 2022;

- 5) Revisi-5, disahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Nomor S-3440/WPB.12/2022 tanggal 27 Juni 2022;
- 6) Revisi-6, disahkan dengan Surat a.n. Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-400/AG/AG.5/2022 tanggal 19 Agustus 2022;
- 7) Revisi-7, disahkan dengan Surat a.n. Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-454/AG/AG.5/2022 tanggal 16 September 2022;
- 8) Revisi-8, disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Nomor S-5400/WPB.12/2022 tanggal 4 Oktober 2022;
- 9) Revisi-9, disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Nomor S-6820/WPB.12/2022 tanggal 4 November 2022;
- 10) Revisi-10, disahkan dengan Surat a.n. Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-695/AG/AG.5/2022 tanggal 5 Desember 2022;
- 11) Revisi-11, disahkan dengan Surat a.n. Direktur Jenderal Anggaran Nomor SP DIPA-013.02.1.409241/2022 tanggal 22 Desember 2022.

### C. Capaian Kinerja Anggaran

Pada Tahun 2022 Alokasi dalam DIPA Induk Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-013.02-0/2022 dengan PAGU sebesar Rp76.877.008.000 dan telah mengalami 11 (sebelas) kali revisi DIPA. Berdasarkan data SAKTI, realisasi anggaran belanja keseluruhan sampai dengan 30 Desember 2022 sebesar Rp59.395.876.035 (98,62%) dari total pagu Rp60.225.500.000

Dengan anggaran tersebut dibandingkan dengan jumlah satuan kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (899 Satuan kerja) yang dilakukan pengawasan, mengharuskan Inspektorat Jenderal menentukan prioritas kegiatan agar efisiensi pemanfaatan anggaran dapat digunakan kepada hal yang diutamakan untuk mengawal mencapai visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

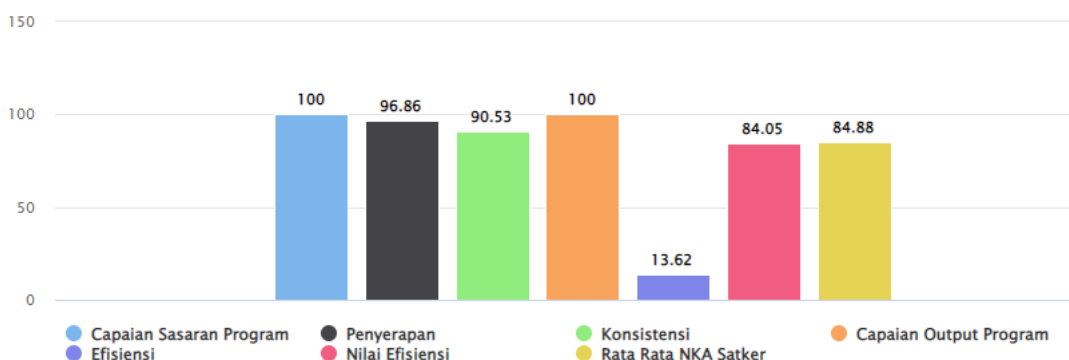
Dalam aplikasi monev smart kinerja anggaran pada website <https://smart.kemenkeu.go.id/> bahwa efisiensi anggaran Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :



Gambar 3.19  
(Nilai Kinerja Anggaran pada Aplikasi SMART)  
Nilai SMART per tanggal 30 Desember 2022

Nilai Kinerja  
91.34

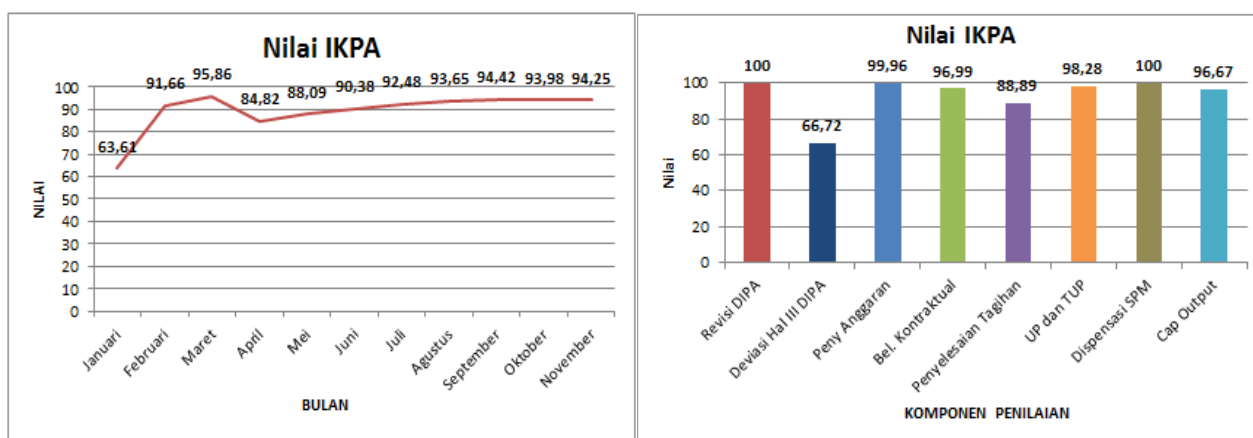
Sangat Baik



Indeks Efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran sebesar 13,62 mengandung penjelasan bahwa terdapat pencapaian realisasi pemanfaatan anggaran output program dan anggaran output kegiatan Inspektorat Jenderal lebih efisien dengan Nilai Efisiensi sebesar 84,05. Dengan catatan bahwa Indeks efisiensi anggaran dalam aplikasi smart mempunyai nilai maksimum 20% dan nilai minimum -20%.<sup>18</sup>

Sedangkan prolehan nilai IKPA s.d November 2022 sebesar 94,25 dengan kategori nilai IKPA 89<94,25<95 baik.

Gambar 3.20  
(Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA))



<sup>18</sup> Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.02.2021

Bahwa nilai IKPA s.d. Desember 2022 baru dapat diketahui nilai nya pada minggu ke-2 bulan berikutnya.

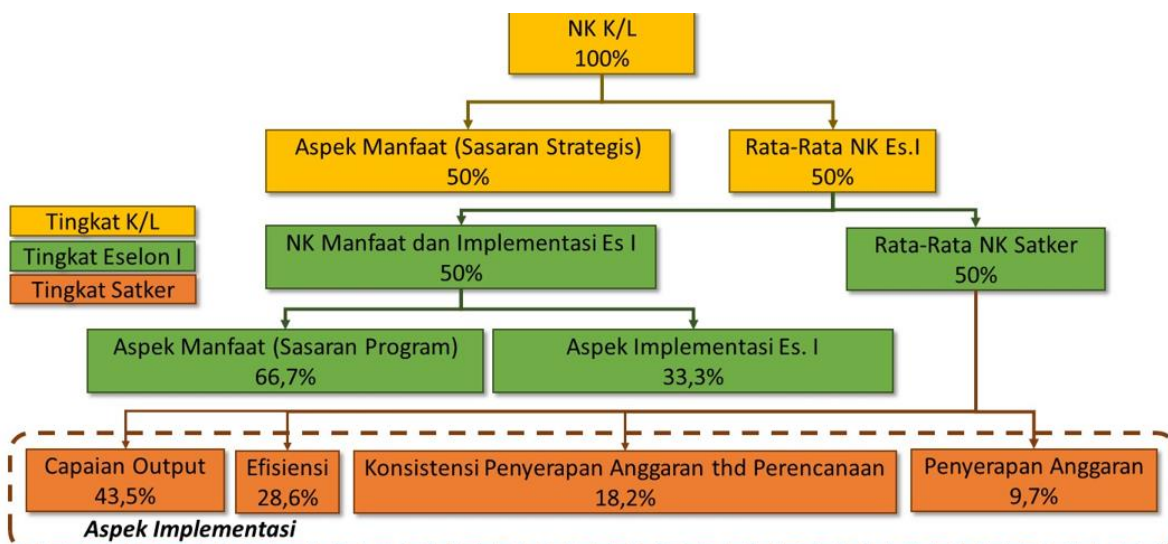
Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan langkah-langkah optimalisasi capaian kinerja anggaran pada Kementerian Hukum dan HAM, termasuk pada Inspektorat Jenderal yang *urgent* untuk dilakukan dengan beberapa pertimbangan:

1. Peran strategis EKA dalam meningkatkan kualitas PBK pada Kemenkumham, baik melalui perannya sebagai *proving* maupun *improving* (untuk kebijakan di periode tahun anggaran berikutnya)
2. Perlu diidentifikasi risiko tidak optimalnya NKA pada akhir tahun, khususnya risiko ketidaktercapaian target kinerja untuk memastikan efektivitas alokasi anggaran dan efisiensinya.
3. Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk:
  - a) penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan;
  - b) penyusunan reviu angka dasar;
  - c) penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/ atau penyesuaian anggaran tahun berkenaan; dan
  - d) pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi.

Sehingga pengukuran kinerja pada Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.21

(Pengukuran Kinerja Tahun 2022)





Hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk mengoptimalkan capaian kinerja anggaran:

1. Memastikan kesesuaian dan keselarasan data referensi dan data entri;
2. Mengidentifikasi dan memastikan kelengkapan informasi kinerja (terutama ketersediaan);
3. Mengoptimalkan Nilai Konsistensi setiap bulan sejak awal tahun anggaran;
4. Meningkatkan akurasi data capaian yang dilaporkan;
5. Mengidentifikasi target yang belum tercapai dan menyiapkan strategi pencapaiannya;
6. Menyelesaikan pelaporan kinerja pada Aplikasi SMART;
7. Meng-approve capaian kinerja level di bawahnya;
8. Meningkatkan awareness semua pihak dalam EKA;
9. Memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta evaluasi.

#### D. Capaian Kinerja Lainnya

##### 1. Kinerja pada Aplikasi E- Performance

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal pada Aplikasi E-Performance dapat terlihat bahwa kinerja Inspektorat Jenderal hamper seluruhnya tercapai (100%; warna Hijau) maupun tercapai (> 100%; warna Biru). Tetapi masih terdapat 1 (satu) kinerja Inspektorat Jenderal yang tidak tercapai (<100%; warna Merah) yaitu Persentase Capaian Nilai RB Minimal 33,5.

The screenshot shows the 'E-PERFORMANCE' system interface for the 'INSPEKTORAT JENDERAL' unit in 2022. It displays a table of performance agreements and their realization status. The table includes columns for target, actual performance, and realization percentage. One specific performance item is highlighted in red, indicating it was not fully achieved.

NO	SABARAN	STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	KILAUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	TARGET			REALISASI	LAMPIRAN	DOKUMEN MONITORING	BOBOT	SCORE (%)	
								JUMLAH	SATUAN	JUMLAH (%)						
1.	Tercapainya pengelolaan keuangan yang akurat		1	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Berperspektif		1. SEMPURNA INSPEKTORAT JENDERAL 2. INDIKATOR KEUANGAN	1 Opini WTP BPK Triwulan IV	TW1	0	Opini WTP BPK	0	Januari: Proses indokalogi temuan dan penyusunan laporan keuangan Tahunan. Proses indokalogi temuan dan penyusunan laporan keuangan Harat. Proses indokalogi temuan dan penyusunan laporan keuangan April. Proses indokalogi temuan dan penyusunan laporan keuangan Mei. Proses indokalogi temuan dan penyusunan laporan keuangan. Proses Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Tahun 2021 Juni. Proses indokalogi temuan dan penyusunan laporan keuangan. Hasil Pemeriksaan dan Laporan Keuangan Kementerian Tahun 2022 Juli: Proses indokalogi temuan dan penyusunan laporan keuangan Agustus. Proses indokalogi temuan dan penyusunan laporan keuangan September. Proses indokalogi temuan dan penyusunan laporan keuangan Oktober. Proses indokalogi temuan dan penyusunan laporan keuangan November. Proses indokalogi temuan dan penyusunan laporan keuangan Desember. Proses indokalogi temuan dan penyusunan laporan keuangan				
								TW2	1	Opini WTP BPK	1		100			
								TW3	0	Opini WTP BPK	0					
								TW4	0	Opini WTP BPK	0					
2.	Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal yang partisipatif dan profesional dalam pelaksanaan pengawasan laporan yang etasial ditinjau kinerjanya		2	Nilai Maturasi SPI		1. SEMPURNA INSPEKTORAT JENDERAL 2. INDIKATOR KEUANGAN 3. INDIKATOR KEUANGAN 4. INDIKATOR KEUANGAN	3 Level Triwulan IV	TW1	0	Level	0	Januari: Penetapan kegiatan Pendampingan dengan Sekelompok Jenderal selaku Koordinator PMP Perolehan Mandiri. Februari: Penetapan kegiatan Pendampingan dengan Sekelompok Jenderal selaku Koordinator PMP Perolehan Mandiri. Maret: Pelaksanaan kegiatan Pendampingan dalam proses Perolehan Mandiri pada satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM. April: Pelaksanaan kegiatan Pendampingan dalam proses Perolehan Mandiri pada satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM. Mei: Penetapan kegiatan Pengiriman Kualitas (PK) ke hal Perolehan Mandiri SPI. Peringkat pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM. Juni: Pelaksanaan Pengiriman Kualitas (PK) ke hal Perolehan Mandiri Maturasi SPI. Peringkat pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM				
								TW2	0	Level	0					

No	Indikator	Uraian	Penanggung Jawab	Target	Waktu	Skor	Realisasi	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
2	Mengubah Sistem Pengendalian Internal yang efektif dengan Kemitraan	1. Monev Mutu SPK JENDRAL 2. INDOCIKAM WILAYAH V 3. INDOCIKAM WILAYAH IV 4. INDOCIKAM WILAYAH VI	1. SEKRETARAT INDOCIKAM JENDRAL 2. INDOCIKAM WILAYAH V 3. INDOCIKAM WILAYAH IV 4. INDOCIKAM WILAYAH VI	3 Level: Triwulan IV	7/1/2022	0	Level 0	100	0	0	0
3	Mengupayakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kualitas layanan berbasis TI	1. Monev Mutu SPK JENDRAL 2. INDOCIKAM WILAYAH V 3. INDOCIKAM WILAYAH IV 4. INDOCIKAM WILAYAH VI	1. SEKRETARAT INDOCIKAM JENDRAL 2. INDOCIKAM WILAYAH V 3. INDOCIKAM WILAYAH IV 4. INDOCIKAM WILAYAH VI	93 Persen; Triwulan II	7/1/2022	0	Level 3	100	0	0	0

No	Indikator	Uraian	Penanggung Jawab	Target	Waktu	Skor	Realisasi	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
3	Perencanaan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Monev Mutu SPK JENDRAL 2. INDOCIKAM WILAYAH V 3. INDOCIKAM WILAYAH IV 4. INDOCIKAM WILAYAH VI	1. SEKRETARAT INDOCIKAM JENDRAL 2. INDOCIKAM WILAYAH V 3. INDOCIKAM WILAYAH IV 4. INDOCIKAM WILAYAH VI	93 Persen; Triwulan II	7/1/2022	0	Level 3	100	0	0	0
3	Perencanaan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Monev Mutu SPK JENDRAL 2. INDOCIKAM WILAYAH V 3. INDOCIKAM WILAYAH IV 4. INDOCIKAM WILAYAH VI	1. SEKRETARAT INDOCIKAM JENDRAL 2. INDOCIKAM WILAYAH V 3. INDOCIKAM WILAYAH IV 4. INDOCIKAM WILAYAH VI	93 Persen; Triwulan II	7/1/2022	0	Level 3	100	0	0	0

No	Indikator	Uraian	Penanggung Jawab	Target	Waktu	Skor	Realisasi	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
3	Perencanaan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Monev Mutu SPK JENDRAL 2. INDOCIKAM WILAYAH V 3. INDOCIKAM WILAYAH IV 4. INDOCIKAM WILAYAH VI	1. SEKRETARAT INDOCIKAM JENDRAL 2. INDOCIKAM WILAYAH V 3. INDOCIKAM WILAYAH IV 4. INDOCIKAM WILAYAH VI	93 Persen; Triwulan II	7/1/2022	0	Level 3	100	0	0	0
3	Perencanaan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Monev Mutu SPK JENDRAL 2. INDOCIKAM WILAYAH V 3. INDOCIKAM WILAYAH IV 4. INDOCIKAM WILAYAH VI	1. SEKRETARAT INDOCIKAM JENDRAL 2. INDOCIKAM WILAYAH V 3. INDOCIKAM WILAYAH IV 4. INDOCIKAM WILAYAH VI	93 Persen; Triwulan II	7/1/2022	0	Level 3	100	0	0	0



## 2. Kinerja pada Aplikasi Target Kinerja

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal pada Aplikasi Target Kinerja dapat terlihat bahwa kinerja Inspektorat Jenderal seluruhnya tercapai.

Tabel 3.40

(Hasil Penilaian Kinerja pada Aplikasi Target Kinerja Tahun 2022)

No	Target Kinerja	Capaian B03	Capaian B06	Capaian B09	Capaian B12
1.	Penguatan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Maturitas SPIP pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM	100	100	93,33	Menunggu hasil verifikasi
2.	Implementasi Manajemen Risiko (MR)	100	100	100	Menunggu hasil verifikasi
3.	Peningkatan Kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan HAM Level 4	100	100	100	Menunggu hasil verifikasi
4.	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Pendampingan, Reviu, dan Audit terkait Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan	96,67	100	100	Menunggu hasil verifikasi
5.	Meningkatnya Jumlah Satuan Kerja berpredikat WBK/ WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	100	100	100	Menunggu hasil verifikasi

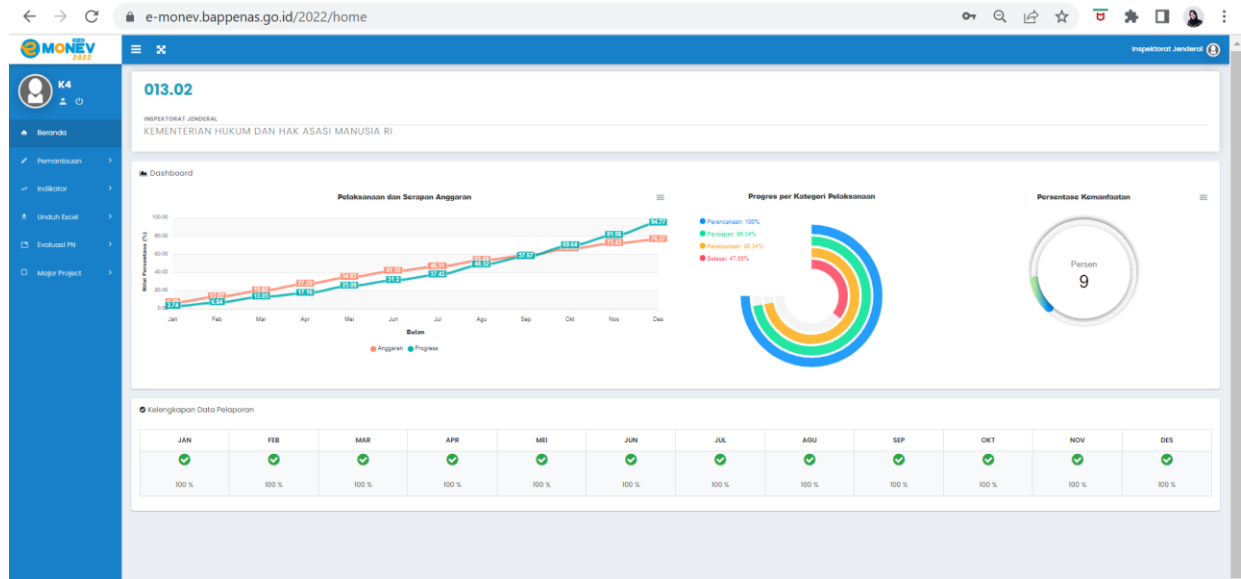
\*Nilai Capaian B03, B06, B09 merupakan rata-rata nilai pada Periode Triwulan yang bersangkutan. Sedangkan nilai B12 baru akan dilakukan pada periode verifikasi tanggal 6 s.d. 15 Januari 2023 oleh Sekretariat Jenderal.

## 3. Kinerja pada Aplikasi E-Monev Bappenas

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Inspektorat Jenderal pada Aplikasi Target Kinerja dapat terlihat bahwa kinerja Inspektorat Jenderal seluruhnya tercapai 100%.

Gambar 3.22

(Hasil Penilaian Kinerja pada Aplikasi Target Kinerja Tahun 2022)



#### 4. Capaian Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP, kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari 3 unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM yang harus dimiliki oleh APIP agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat dan meningkatkan atau laksana atau proses bisnis dan SDM APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Dengan demikian APIP pada K/L tidak lagi berperan sebagai *watch dog* atau melakukan audit ketaatan saja (*compliance audit*) tapi sudah berperan sebagai konsultan (*consulting*) dan menjamin kualitas (*quality assurance*) dalam kegiatan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang penilaian Kapabilitas Aparat pengawasan Intern pemerintah pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Sesuai dengan mandat Presiden Republik Indonesia Kepala BPKP selaku pembina APIP di Indonesia, disampaikan bahwa 85% APIP harus berada di Level 3.

Hasil penilaian yang dilakukan secara mandiri tersebut menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut (rincian penilaian terlampir):

- Elemen 1 Peran dan Layanan berada di level 3
- Elemen 2 Pengelolaan SDM berada di level 3



- c) Elemen 3 Praktik Profesional berada di level 3
- d) Elemen 4 Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja berada di level 3
- e) Elemen 5 Budaya dan Hubungan Organisasi berada di level 3
- f) Elemen 6 Struktur Tata Kelola berada di level 3

Berdasarkan Surat Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah bidang Polkumham, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: SP-214/D2/02/2019 tanggal 10 November 2019 serta Simpulan Hasil Penjaminan Mutu atas Hasil Penilaian Mandiri tingkat Kapabilitas APIP Kemenkumham 2019, BPKP menetapkan tingkat kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham berada pada level 3, dan selanjutnya akan menuju level 4. Adapun pembagian level kapabilitas APIP adalah sebagai berikut:

Level 1 : *Initial* (APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi).

Level 2 : *Infrastructure* (APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi).

**Level 3 : *Integrated* (APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern).**

Level 4 : *Managed* (APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern).

Level 5 : *Optimizing* (APIP menjadi agen perubahan).

Pada Tahun 2022, saat ini masih berlangsung penilaian Kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan HAM oleh BPKP tetapi belum dapat diketahui hasil dari penilaian tersebut. Adapun pelaksanaan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan HAM sudah dilakukan berdasarkan Surat Perintah Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor ITJ.KP.04.01- 177 dan ITJ.KP.04.01- 178 tanggal 28 April 2022 telah melaksanakan kegiatan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022.

Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2022 dilaksanakan melalui tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

- a) Melakukan Penilaian Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) dan Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result), terdiri :

- Penyusunan dan pengumpulan data dukung masing-masing elemen 1 s.d 6.
  - Panel untuk mereviu kelengkapan dan kualitas data dukung elemen 1 s.d 6 yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 24 Mei 2022 dan tanggal 06 Juni 2022.
  - FGD Pendampingan dari Tim BPKP untuk mereviu kelengkapan dan kualitas data dukung elemen 1 s.d 6 yang dilaksanakan tanggal 15 dan 16 Juni 2022.
- b) Penginputan data dukung elemen 1 s.d 6 pada aplikasi PK-APIP yang dilaksanakan tanggal 17 s.d 23 Juni 2022.
- c) Penyimpulan Hasil Akhir tanggal 23 s.d 30 Juni 2022. - Penyusunan Rencana Aksi.

Hasil kegiatan pelaksanaan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 menunjukkan bahwa simpulan Kapabilitas Level Elemen dan Kapabilitas APIP Level Entitas pada Kementerian Hukum dan HAM berada di **level 4 (empat) dari 5 (lima) level Kapabilitas APIP atau Institutionalized, yaitu : “APIP telah menjadi mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah secara berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan organisasi”**

Penilaian Mandiri terhadap 6 (enam) elemen Kapabilitas APIP menghasilkan skor elemen sebesar **“4,23”** dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 3.23

(Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2022)

ELEMEN/TOPIK	ASPEK PENILAIAN					SKOR TOPIK	SIMPULAN LEVEL ELEMEN	SKOR ELEMEN
	LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5			
<b>DUKUNGAN PENGAWASAN (ENABLER) (60%)</b>								2,530
<b>PENGLOLAAN SDM (30%)</b>								
Rekrutmen SDM APIP	Y	Y	Y	Y	Y	5	5	0,9
Pengembangan SDM Profesional APIP	Y	Y	Y	Y	Y	5		
<b>PRAKTIK PROFESIONAL (30%)</b>								
Perencanaan Pengawasan	Y	Y	Y	T	T	3	3	0,63
Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	Y	Y	Y	Y	T	4		
<b>AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA (10%)</b>								
Rencana kerja dan anggaran APIP	Y	Y	Y	Y	T	4	4	0,24
Pelaksanaan Anggaran	Y	Y	Y	Y	T	4		
Pelaporan kepada manajemen K/L/D	Y	Y	Y	Y	T	4		
Sistem Pengukuran Kinerja APIP	Y	Y	Y	Y	T	4		
<b>BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI (10%)</b>								
Pengelolaan Proses Bisnis Pengawasan Internal APIP	Y	Y	Y	Y	T	4	4	0,24
Hubungan APIP dengan Manajemen	Y	Y	Y	Y	T	4		
Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	Y	Y	Y	Y	T	4		
<b>STRUKTUR TATA KELOLA (20%)</b>								
Hubungan Pelaporan	Y	Y	Y	Y	T	4	4	0,52
Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM	Y	Y	Y	Y	T	4		
Mekanisme Pendanaan	Y	Y	Y	Y	Y	5		
<b>AKTIVITAS PENGAWASAN (DELIVERY) DAN KUALITAS PENGAWASAN (RESULT) (40%)</b>								1,7
<b>PERAN DAN LAYANAN</b>								
Audit Ketaatan (Compliance Auditing)	Y	Y	Y	Y	T	4	4	1,7
Audit Kinerja (Performance Auditing)	Y	Y	Y	Y	T	4		
Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance Risk and Control/GRC)	Y	Y	Y	Y	T	4		
Jasa Konsultasi (Advisory Services)	Y	Y	Y	Y	Y	5		
							SKOR LEVEL	4,23
							LEVEL	4

## 5. Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

ISO 37001:2016 adalah sertifikasi internasional terkait sistem manajemen anti suap (SMAP) yang telah diterima Inspektorat Jenderal sejak Tahun 2020 dan dapat terus dipertahankan s.d. Tahun 2022.



Berawal pada tanggal 27 Oktober 2020, Inspektorat Jenderal telah berhasil memperoleh Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) diikuti dengan kegiatan penyerahan sertifikat dengan Nomor: 03 13 J 20022 oleh PT. Tuv-Nord dilaksanakan secara langsung pada tanggal 3 November 2020 Pimpinan

Tinggi Pratama di lingkungan Inspektorat Jenderal, dalam rangka mempertahankan sertifikasi tersebut perlu dilakukan reviu per tahun.

Pada Tahun 2022 dilakukan reviu atas implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) dengan tahapan kegiatan implementasi yang telah dilaksanakan dalam Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.41

(Tahapan kegiatan implementasi ISO 37001:2016 SMAP Tahun 2022)

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Kick Off Meeting Penerapan ISO 37001:2016 SMAP	13 Juni 2022
2	Permintaan Dokumen Gap Analysis ISO 37001:2016 SMAP Tahun 2022	11 Juli 2022
3	Training Awareness ISO 37001:2016 SMAP Tahun 2022	12 Juli 2022
4	Reviu Dokumen Gap Analysis ISO 37001:2016 SMAP Tahun 2022	9 Agustus 2022
5	Bimbingan Teknik Audit Internal ISO 37001:2016 SMAP Tahun 2022	26 September 2022
6	Penyampaian Hasil Audit Internal FKAP ISO 37001:2016 SMAP	14 Oktober 2022
7	Surveillance Audit ISO 37001:2016 SMAP	25 s.d. 26 Oktober 2022



## 6. Whistle Blowing System (WBS)



Atas dasar Peraturan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. 57 tahun 2016 tentang Petunjuk Penanganan Laporan Pengaduan, pada 30 Agustus Tahun 2016 diluncurkan aplikasi WBS untuk pengelolaan atas pengaduan masyarakat baik dari

kalangan pegawai internal maupun masyarakat. Penyampaian laporan melalui aplikasi WBS Kemenkumham ([wbs.kemenkumham.go.id](http://wbs.kemenkumham.go.id)) ini mulai dimanfaatkan oleh masyarakat & pegawai terhitung mulai tanggal 8 maret 2017.

Pada tahun 2017, Kemenkumham melalui Inspektorat Jenderal bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pembangunan Koneksitas *Whistle Blowing System* dengan salah satu ruang lingkupnya berupa Pertukaran data atau informasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Berikut kegiatan yang berindikasi pelanggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI yang dapat dilaporkan.

- a. Pelanggaran Disiplin Pegawai;
- b. Penyalahgunaan Wewenang, Mal Administrasi dan Pemerasan/ Penganiayaan;
- c. Perilaku Amoral/ Perselingkuhan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- d. Korupsi;
- e. Pengadaan Barang dan Jasa/BAMA;
- f. Pungutan Liar, Percaloan, dan Pengurusan Dokumen;
- g. Narkoba;
- h. Pelayanan Publik;
- i. Laporan dan Klarifikasi.

Berdasarkan Laporan Tahunan Kelompok Substansi Humas dan Sistem Informasi Pengawasan, Penerapan *Whistle Blowing System* pada Tahun 2022 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pemanfaatan aplikasi WBS tercatat **57 (Lima Puluh Tujuh) data**

penanganan pengaduan pada Tahun 2022, dengan rincian yaitu Proses Disposisi 16 (enam belas), Sudah Diklarifikasi 14 (empat belas), Proses telaah Irwil 10 (sepuluh), Proses Unit Utama/Kanwil 5 (lima), Terbukti 0, Tidak terbukti 3 (tiga), dan bukan kewenangan Kemenkumham 9 (sembilan).<sup>19</sup>

## 7. Gratifikasi/Unit Pengendalian Gratifikasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa Inspektorat Jenderal memiliki fungsi pelaporan pengendalian Gratifikasi yang diluncurkan Aplikasi pelaporan Gratifikasi melalui website [upg.kemenkumham.go.id](http://upg.kemenkumham.go.id).

Berdasarkan Laporan Tahunan Kelompok Substansi Humas dan SIP Tahun 2022 Pengendalian Gratifikasi, disampaikan bahwa terdapat Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (UPG Pusat) pada bulan April berupa Parcel Buah dan bulan Mei berupa Parcel Kue.



## 8. E-LHKASN dan Pelaporan LHKPN

Dalam rangka Implementasi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melaksanakan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara pada Tahun 2022. Guna mengoptimalkan pelaporan LHKASN di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia silakukan kegiatan verifikasi atas kewajaran penginputan data wajib laporan LHKASN oleh Inspektorat Jenderal pada beberapa Kantor Wilayah/ Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, dilaksanakan update aplikasi LHKASN agar lebih

<sup>19</sup> Laporan Tahunan Kelompok Substansi Humas dan SIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia





mudah digunakan (*user friendly*) dan beberapa fitur tambahan yang saat juga juga sedang dilakukan perubahan Kepmen yang mengatur hal tersebut.

Sampai dengan Bulan **Desember 2022**, **persentase pelaporan LHKASN di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mencapai 100%** melalui Aplikasi <https://lhkasn.kemenkumham.go.id/>. Sehingga, pelaporan LHKASN dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 sudah meningkat yaitu dari 98,5% menjadi 100% atau meningkat sebesar **1,50 %**.<sup>20</sup>

Adapun terkait Pelaporan LHKPN s.d Desember Tahun 2022 pukul, presentase tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

Tabel 3.42

(Pelaporan LHKPN Inspektorat Jenderal Tahun 2022 dan 2021)

No	TAHUN PELAPORAN	JUMLAH WL	YANG MELAPOR	KEPATUHAN
1.	2021	117	117	100%
2.	2022	143	143	100%

## 9. Penguatan Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal

Bahwa terkait persentase pemenuhan pengembangan teknologi informasi yang menunjang proses bisnis, telah dilaksanakan pemenuhan pengembangan TI yang menunjang pengawasan diantaranya pada aplikasi SIPIDU, website, UPG, WBS, LHKASN, e-Office dan e-MAWAS. Bahwa dari kebutuhan teknologi informasi tersebut, selama Tahun 2022 sudah terpenuhi progress sebagai berikut:

### a) Pembangunan Aplikasi:

- 1) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi EMAWAS Versi 2022 (80% Pimpinan)
- 2) Pembangunan Aplikasi Pengolahan/Analisis Hasil Survei Pendahuluan dan Evaluasi MR (100% Inspektorat Wilayah III)
- 3) Pembangunan Aplikasi Penilaian dan Pemilihan Pegawai Teladan ITJEN (100% Koor. Kepegawaian)
- 4) Pembangunan Aplikasi Backend Pengaduan terintegrasi ITJEN dengan KPK (100% Koor. Humas dan SIP)

<sup>20</sup> Laporan Tahunan Kelompok Substansi Kepegawaian Inspektorat Jenderal Tahun 2022

- 5) Pembangunan Dashboard Survei PMPI (100% Bagian Program dan Pelaporan)
  - 6) Pembangunan Aplikasi Kehadiran virtual/elektronik ITJEN (100% Koord. Kepegawaian)
  - 7) Pembangunan Dashboard ILAWAS (Integrated Laporan Pengawasan) (100% Pimpinan)
- b) Pengembangan Aplikasi:
- 1) Pengembangan Aplikasi LHKASN (70% Koordinator Kepegawaian)
  - 2) Pengembangan Aplikasi Kehadiran Itjen/Handkey terintegrasi dengan SIMPEG (100% Koordinator Kepegawaian)
  - 3) Perbaikan dan Penyesuaian Aplikasi E -Consul ITJEN (100% Inspektorat Wilayah I)
  - 4) Pengembangan Aplikasi Analisis Hasil Survei PMPI (100% Bagian Program dan Pelaporan)
- c) Pengelolaan dan Pemeliharaan:
- Pengelolaan dan Pemeliharaan Data, Aplikasi, Jaringan, Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi Inspektorat Jenderal ( 100 %) melalui bugs fixing Aplikasi, Antivirus, firewall/keamanan dan Administrator Aplikasi.

## 10. Rekapitulasi Hukuman Disiplin di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Bahwa pada Tahun Anggaran 2022 telah diterapkan kebijakan baru terkait Disiplin PNS. Inspektorat Jenderal selaku fungsi pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melaksanakan kegiatan sosialisasi bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Bahwa pada PP Nomor 94 Tahun 2021 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Manajemen ASN dan PP 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS jo PP 17 Tahun 2020 yang mengatur terkait kewajiban PNS, larangan PNS, tingkat & jenis hukuman disiplin sampai dengan ketentuan penutup. Satu hal yang menjadi sorotan adalah aturan hukuman disiplin sedang yang sebelumnya hanya bersifat administratif berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, dan penurunan pangkat 1 tingkat lebih rendah selama 1 tahun, akan tetapi pada peraturan baru tersebut dirubah



menjadi pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan, 9 bulan s.d 12 bulan lamanya. Selain itu, salah satu poin yang membedakan dari aturan sebelumnya di PP Nomor 53 Tahun 2010 jika pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pelanggaran maka akan diberikan hukuman disiplin setingkat lebih berat.

Sehubungan dengan masih berlakunya ketentuan peralihan, berikut disampaikan data Rekapitulasi Surat Keputusan Hukuman Disiplin yang diterbitkan pada Tahun 2022 berjumlah 212 dengan rincian sebagai berikut:

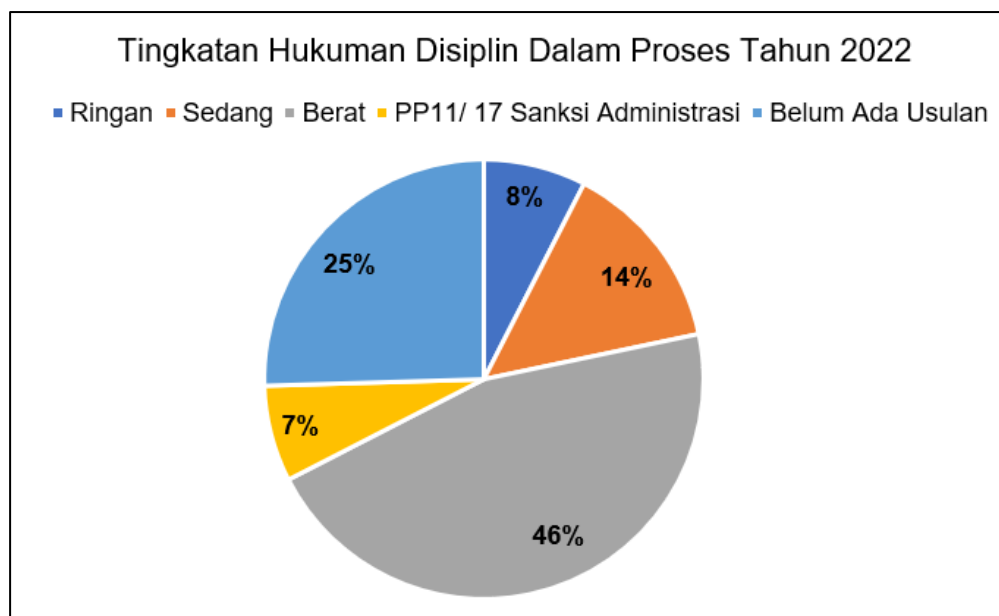
Tabel 3.43

(Rekapitulasi Dalam Proses Pnejatuhan Hukuman Disiplin Tahun 2022)

Ringan	Sedang	Berat	PP11/17 Sanksi Administrasi	Belum Ada Usulan	Total
16	30	97	15	54	212

Gambar 3.24

(Diagram Rekapitulasi Dalam Proses Pnejatuhan Hukuman Disiplin Tahun 2022)

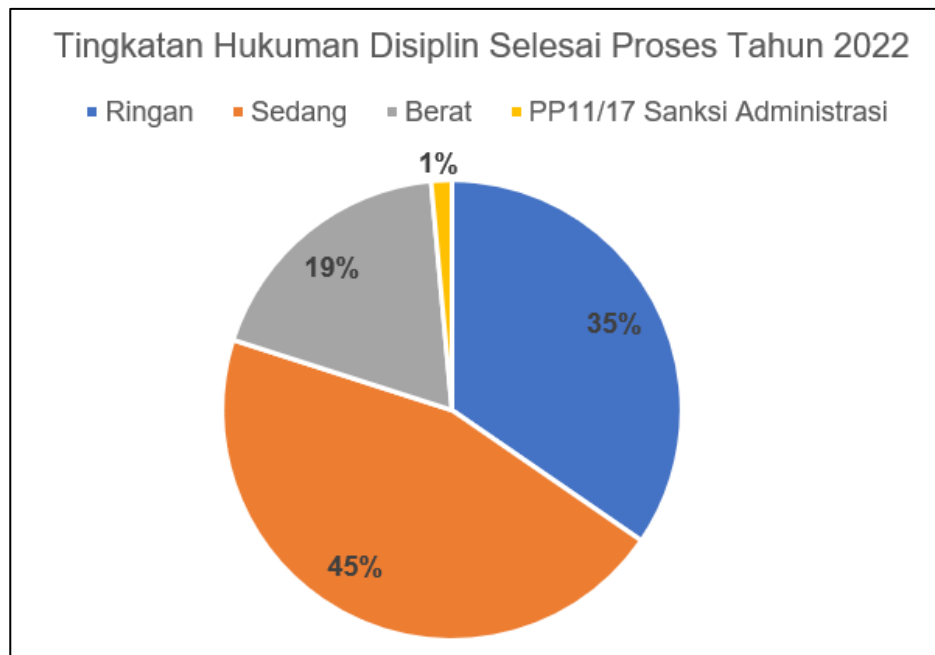


Tabel 3.44

(Rekapitulasi Selesai Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin 2022)

Ringan	Sedang	Berat	PP11/17 Sanksi Administrasi	Total
119	156	64	5	344

Gambar 3.24  
(Diagram Rekapitulasi Selesai Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Tahun 2022)



Adapun rekap Hukuman Disiplin Berdasarkan Aplikasi SIMWAS yang diklasifikasikan atas Penyimpangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Tidak masuk kerja : 140
- Penyalahgunaan Wewenang : 103
- Perselingkuhan : 31
- Pelarian Narapidana/ Lalai : 125
- Pemukulan Narapidana : 3
- Narkotika : 54
- Pidana Umum : 18
- Pungutan Liar dan Suap : 43
- Pengancaman : 5
- Senjata Api : 0
- Belum Diketahui : 34

**Jumlah : 556**

## 11. Survei layanan kesekretariatan Inspektorat Jenderal

Pelaksanaan Pengukuran Layanan Internal Kesekretariatan Inspektorat Jenderal Tahun 2022 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, berdasarkan pada



Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-18.OT.02.01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengukuran Layanan Internal Kesekretariatan Inspektorat Jenderal Tahun 2021-2024 tanggal 7 April 2020. Pengukuran Indeks Layanan Internal Kesekretariatan adalah pengukuran atas layanan kesekretaritan dilingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada Tahun 2022, pengukuran dilaksanakan terhitung mulai tanggal 17 Oktober s.d 5 November 2022 melalui mekanisme online pada website <http://itjen.kemenumham.go.id> dengan hasil sebagai berikut:

Gambar 3.25  
(Hasil Survei Layanan Kesekretariatan Tahun 2022)

No	Unit Kerja	RESPONDEN	PPL	KEPEG	KEU	UMUM	SIP	NILAI AKHIR
1	Inspektorat Wilayah	66	2.860	2.736	2.929	2.877	2.859	14.261
2	Sekretariat Inspektorat Jenderal	22	975	1.010	972	902	967	4.826
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>88</b>	3.835	3.746	3.901	3.779	3.826	19.087
<b>NILAI RATA-RATA</b>			426,11	416,22	433,44	419,89	425,11	424,16
<b>NILAI SURVEI SKALA 6</b>			<b>4,84</b>	<b>4,73</b>	<b>4,93</b>	<b>4,77</b>	<b>4,83</b>	<b>4,82</b>
<b>NILAI SURVEI SKALA 3</b>			<b>2,42</b>	<b>2,36</b>	<b>2,46</b>	<b>2,39</b>	<b>2,42</b>	<b>2,41</b>
<b>NILAI SURVEI SKALA 100</b>			<b>80,70</b>	<b>78,83</b>	<b>82,09</b>	<b>79,52</b>	<b>80,51</b>	<b>80,33</b>
<b>BAIK SEKALI</b>								

Dengan menyesuaikan target yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran yaitu dengan target 76,61, maka **hasil 80,33** tercapai 100% atau melebihi target dengan kategori “**BAIK SEKALI**”. Dengan rincian sebagai berikut:

- Layanan Keuangan memperoleh Nilai 82,09 (Sangat Baik);
- Layanan Program dan Pelaporan memperoleh Nilai 80,70 (Sangat Baik);
- Layanan Sistem Informasi Pengawasan memperoleh Nilai 80,51 (Sangat Baik);
- Layanan Umum memperoleh Nilai 79.52 (Baik); dan
- Layanan Kepegawaian memperoleh Nilai 78,83 (Baik).

Data tersebut juga menunjukkan bahwa nilai tertinggi yaitu kelompok substansi Keuangan dan nilai terendah yaitu Kelompok Substansi Kepegawaian. Selain itu dapat disimpulkan bahwa Indeks **meningkat 1,32 %** dari indeks tahun 2021 dengan nilai 79,01.

## 12. Pengelolaan Data BPK dan Penyelesaian Ganti Kerugian

### a. Pengelolaan Data BPK

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan selaku Auditorat Keuangan Negara dalam pelaksanaan tugasnya melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal pada K/L terkait pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI yang bertugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan koordinator dalam hal penyusunan laporan berkala hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan. Berikut rekapitulasi data hasil pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK s.d. 2022.

Tabel 3.45

(Rekapitulasi Sesuai Status Tindaklanjuti Tahun 2022)

Status Tindak Lanjut	Jumlah	Nilai (Rp)
Sesuai Rekomendasi	1.986	150.822.313.121,73
Reviu BPK	35	11.739.987.269,21
Belum Sesuai	134	162.264.671.596,53
Belum Ditindaklanjuti	36	2.703.780.594,71
Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah	1	111.402.648.064,00

Tabel 3.46

(Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi)

Keterangan	Jumlah	Nilai (Rp)
Temuan Pemeriksaan	983	995.900.189.210,24
Rekomendasi	2.218	438.914.351.682,70

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Kemenkumham Semester II Tahun 2022 terdapat 112 LHP dengan 983 temuan senilai Rp995.900.189.210,24 serta 2.219 rekomendasi senilai Rp438.933.400.646,18 status tindak lanjut yang telah dilakukan Kemenkumham adalah sebagai berikut:

- Sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.986 rekomendasi senilai Rp150.822.313.121,73;



- Rekomendasi dalam proses revidi BPK sebanyak 35 rekomendasi senilai Rp11.739.987.269,21;
- Belum sesuai rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut sebanyak 134 rekomendasi senilai Rp162.264.671.596.53;
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 65 rekomendasi, senilai Rp2.703.780.594,71;
- Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 1 rekomendasi, senilai Rp111.402.648.064,00.


#### **b. Penyelesaian Ganti Kerugian**

Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Semester I Tahun 2022 terhadap Bendahara, sebanyak 6 (enam) kasus sebesar Rp859.762.752,41, Sudah dilakukan angsuran sebesar Rp.315.842.011,00, Pelunasan sebanyak 3 (tiga) sebesar Rp286.408.952,00 dan Sisanya sebanyak 3 (tiga) sebesar Rp257.511.789,41.

Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain Telah Memperoleh Penetapan Pembebanan sebanyak 116 (seratus enam belas) kasus sebesar Rp4.648.826.932,72, Sudah dilakukan angsuran sebesar Rp501.713.570,00, Pelunasan sebanyak 102 (seratus dua) sebesar Rp2.678.879.004,72 dan Sisanya sebanyak 14 (empat belas) sebesar Rp1.468.234.358,00. Sedangkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain Belum Memperoleh Penetapan Pembebanan sebanyak 11 (sebelas) kasus sebesar Rp117.506.250,00, Belum dilakukan angsuran, Pelunasan sebanyak 3 (tiga) sebesar Rp13.032.250,00, Dilakukan penghapusan sebanyak 4 (empat) kasus sebesar Rp6.124.000,00 dan Sisanya sebanyak 4 (empat) sebesar Rp98.350.000,00.

Gambar 3.26

(Rekapitulasi Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara)

 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MATRIKS REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA SEMESTER I TAHUN 2022 AUDITAMA KEUANGAN NEGARA I										
Nama Entitas: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia										
Penanggung Jawab	Kerugian		Angsuran		Pelunasan		Penghapusan		Sisa	
	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(2)-(6+8))	(3)-(5+7+9))
Bendahara	6	859.762.752,41	0	315.842.011,00	3	286.408.952,00	0	0,00	3	257.511.789,41
<b>Jumlah 1</b>	<b>6</b>	<b>859.762.752,41</b>	<b>0</b>	<b>315.842.011,00</b>	<b>3</b>	<b>286.408.952,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>	<b>257.511.789,41</b>
Pegawai Negeri Bukan Bendahara/ Pejabat Lain Telah Memperoleh Penetapan Pembebanan	116	4.648.826.932,72	0	501.713.570,00	102	2.678.879.004,72	0	0,00	14	1.468.234.358,00
Pegawai Negeri Bukan Bendahara/ Pejabat Lain Belum Memperoleh Penetapan Pembebanan	11	117.506.250,00	0	0,00	3	13.032.250,00	4	6.124.000,00	4	98.350.000,00
<b>Jumlah 2</b>	<b>127</b>	<b>4.766.333.182,72</b>	<b>0</b>	<b>501.713.570,00</b>	<b>105</b>	<b>2.691.911.254,72</b>	<b>4</b>	<b>6.124.000,00</b>	<b>18</b>	<b>1.566.584.358,00</b>
Pihak Ketiga	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Jumlah 3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Informasi Kerugian</b>										
LHP BPK	168	257.847.882.587,30	0	44.865.414.028,51	124	55.758.714.534,37	0	0,00	44	157.223.754.024,42
LHP APIP (Inspektorat Jenderal)	1	107.368.897,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	107.368.897,42
<b>Jumlah 4</b>	<b>169</b>	<b>257.955.251.484,72</b>	<b>0</b>	<b>44.865.414.028,51</b>	<b>124</b>	<b>55.758.714.534,37</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45</b>	<b>157.331.122.921,84</b>
<b>Jumlah Total (1+2+3+4)</b>	<b>302</b>	<b>263.581.347.419,85</b>	<b>0</b>	<b>45.682.969.609,51</b>	<b>232</b>	<b>58.737.034.741,09</b>	<b>4</b>	<b>6.124.000,00</b>	<b>66</b>	<b>159.165.219.069,25</b>

1) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Data BPKP pada Kementerian Hukum dan HAM sampai dengan Desember Tahun 2022 berjumlah 1792 temuan, senilai Rp46.965.934.424,59. Temuan yang sudah tuntas berjumlah 1.683 temuan senilai Rp46.216.871.083,20 dan 109 temuan belum tuntas senilai Rp749.063.340.

Tabel 3.47

(Persentasi Temuan BPKP s.d Desember Tahun 2022)

Keterangan	Sudah Tuntas	Belum Tuntas	Total
Temuan	1683	109	1.792
Nilai	46.216.871.083,20	749.063.340	46.965.934.424,59

2) Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

Hasil rekapitulasi data pengaduan yang sedang dalam proses tindak lanjut dari Ombudsman RI, terdapat 7 (tujuh) aduan dari Tahun 2020.





### 13. Efisiensi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang terbatas pada Inspektorat Jenderal sebagai pelaksana kegiatan untuk mencapai kinerja Inspektorat Jenderal ditunjang oleh pelaksanaan diklat, pelatihan, program aktif belajar dan lain-lain. Hal tersebut dalam upaya peningkatan kompetensi dan keahlian dalam menunjang pengawasan dan pencapaian tujuan organisasi.

#### a) Rekapitulasi Diklat

Adapun Rekapitulasi Diklat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.48  
(Rekap Diklat Tahun 2022)

NO	Kegiatan	Jumlah Peserta	Jumlah Hari	Waktu Pelaksanaan	Nama Peserta	Tempat Penyelenggaraan
1.	Pelatihan Reformasi Birokrasi Metode e-Learning Angkatan I – IV	2	6	4 s.d. 11 Februari 2022	1. Naimatuzzahroh, A.Md.Ak. 2. Raden Suryo Satrio Sularso, S.Tr.Im.	E-learning
2.	Pelatihan Tim Assessor PMPRB	2	6	6 s.d. 11 Februari 2022	Tri Sayekti Ningsih, S.H., M.Si. Bobby Novianto	Kampus BPSPM Hukum dan HAM
3.	Pelatihan Dasar-dasar Hak Asasi Manusia Metode Elearning Angkatan I	3	7	7 s.d. 16 Februari 2022	1. Desy Arista Prapitasari, S.H. 2. Nimas Zaky Nabila, S.E. 3. Nirwana Ellen Nora, S.I.P.	E-learning
4.	Pelatihan Dasar-dasar Hak Asasi Manusia Metode Elearning Angkatan III	4	7	7 s.d. 16 Februari 2022	1. Debora Chyntia Eka Putri, S. Psi. 2. Mutiara Endah Cahyani, S.E. 3. Rana Aulia, S.E. 4. Reni Melynda Hutapea, S. Psi.	E-learning
5.	Pelatihan Dasar-dasar Hak Asasi Manusia Metode Elearning Angkatan IV	4	7	7 s.d. 16 Februari 2022	1. Aziz Pilar Syefiaji, S.A.P. 2. Indah Pertiwi, S.Psi. 3. Rizky Herviani, S.H. 5. Wahyu Iriani, S.A.P.	E-learning
6.	Pelatihan Reformasi Birokrasi Metode e-Learning Angkatan V – VIII	1	6	11 s.d. 18 Februari 2022	1. Setio Utomo Priono, S.Tr.Im.	E-learning
7.	Pelatihan Dasar-dasar Hak Asasi Manusia Metode Elearning Angkatan VII	4	7	21 Februari s.d. 4 Maret 2022	1. Anasti Dwi Martantya Kinasih, S.Ak. 2. Devina Ika Pratiwi, S.Psi. 3. Gaufani Majid Masrifa, S.Ak. 4. Muhamad Suhandwifa, S. Psi	E-learning
8.	Pelatihan Dasar-dasar Hak Asasi Manusia Metode Elearning Angkatan VI	5	7	21 Februari s.d. 4 Maret 2022	1. Anita Cameliana, S.Psi. 2. Elma Nur Hikmah, S.E. 3. Ratih Manggarsari, S. Psi. 4. Tutut Asmorowati, S.E. 5. Bara Dynata, S.H.	E-learning
9.	Pelatihan Dasar-dasar Hak Asasi Manusia Metode	6	7	21 Februari s.d. 4 Maret 2022	1. Alex Tumpal Hutajulu, S.E. 2. Y.Aditya Anggara P., S.H. 3. Ahmadi Anjas, S.I.P.	E-learning

	Elearning Angkatan V				<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Azizah Farahdiba Wairooy, S.E.</li> <li>5. Dian Lati Utami, S.Psi.</li> <li>6. Vania Reghina Irsya, S. Ak.</li> </ol>	
10.	Pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer	30	5	7 s.d. 11 Maret 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hari Purwanto, A.Md., S.E., M.Si.</li> <li>2. Nopalisa Egitulas V., S.Kom., M.M.Si.</li> <li>3. Edy Prabowo Saputro, S.Kom, M.Si.</li> <li>4. Zaifachatur Roziyah, S.H., M.Si.</li> <li>5. Agus Priyo Atmoko, A.Md., S.E., M.H.</li> <li>6. R. Eri Irawan Sumanto, S.H., M.Kn.</li> <li>7. Ardiles Ricky Susilo, S.H., M.H.</li> <li>8. Niken Ayu Kusumaningpuri, S.H., M.H.</li> <li>9. Vito Adriano Wismar, S.H.</li> <li>10. Widya Purnamasari, S.H., M.H.</li> <li>11. Bosar Immanuel, S.E.</li> <li>12. Adi Priyo Pratomo, S.H., M.H.</li> <li>13. Ria Wahyu Tanjung S., A.Md., S.E.</li> <li>14. Ade Machmud Apriansyah, S.H.</li> <li>15. Hendra Anggara Saputra, S.E.</li> <li>16. Handityo Nugroho, S.E.</li> <li>17. Gesang Widyatmoko, S.E.</li> <li>18. Dewi Susiana Maulida, S.E.</li> <li>19. Efi Handayani, S.H.</li> <li>20. Kurniawan, A.Md., S.H.</li> <li>21. Abdul Rokhman, A.Md., S.H.</li> <li>22. Anton Kurniawan, A.Md., S.H.</li> <li>23. Erap Nainggolan, S.Sos.</li> <li>24. Galuh Purnomo, S.Sos.</li> <li>25. Zein Ihya Ulumuddin, S.A.P.</li> <li>26. Agil Fahlefi, S.A.P.</li> <li>27. Arnanda Arvi Untari, S.E.</li> <li>28. Dita Priandini, S.E.</li> <li>29. Ade Rizke Putri Wibowo, S.H.</li> <li>7. Mulyani Fitri, S.Ak.</li> </ol>	PJJ
11.	Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Muda di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM secara E-learning	4	12	8 s.d. 17 Maret 2022 dan 24 Maret s.d. 6 April 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dhony Alfianto, S.H.</li> <li>2. Hafidz Zulkarnain, S.Kom.,M.M.</li> <li>3. Neni Ayuni, S.H.,M.H.</li> <li>6. Raden Bagus Wasito Utomo, S.H.,M.H.</li> </ol>	E-learning dan PJJ
12.	Pelatihan Pelatihan Pejabat	1	7	23 Februari s.d. 4 Maret 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melisa Wahyuni, S.E.</li> </ol>	PJJ



	Fungsional Analisis Kepegawaian Keahlian Angkatan II					
13.	Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Le mbaga secara E-learning	21	18	7 s.d. 21 Maret 2022 dan 29 Maret s.d. 14 April 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ahmadi Anjas, S.I.P.</li> <li>2. Alex Tumpal Hutajulu, S.E.</li> <li>3. Alfredo S. Meliala, S.AP</li> <li>4. Arief Rahman, S.H</li> <li>5. Debora Chyntia Eka Putri, S. Psi</li> <li>6. Fransiska Sri A. Tarigan, S.E</li> <li>7. Gaufani Majid Masrifa, S.Ak.</li> <li>8. Harry Dickson Simbolon, S.E.</li> <li>9. Henni Maria Marpaung, S.Psi.</li> <li>10. Indah Pertiwi, S.Psi</li> <li>11. Iwan Putra Siregar, S.H.</li> <li>12. Mhd.Chairil Ambya, S.H.</li> <li>13. Monica Ronauli Saraswaty Sinaga, S.E.</li> <li>14. Muhamad Suhandwifa, S. Psi</li> <li>15. Prasetya Putra Perdana Harefa, S.Psi</li> <li>16. Reni Melynda Hutapea, S. Psi</li> <li>17. Riza Nugraheni, S.Ak.</li> <li>18. Rizky Herviani, S.H.</li> <li>19. Vania Reghina Irsya, S. Ak.</li> <li>20. Y.Aditya Anggara P., S.H.</li> </ol>	E-learning dan PJJ
14.	Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Le mbaga secara E-learning	20	18	15 s.d. 28 Maret 2022 dan 4 s.d. 21April 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anasti Dwi Martantya Kinasih, S.Ak</li> <li>2. Anita Cameliana, S.Psi</li> <li>3. Aziz Pilar Syefiaji, S.A.P</li> <li>4. Azizah Farahdiba Wairooy, S.E</li> <li>5. Bara Dynata, S.H</li> <li>6. Berliani Azizah, S.A.P</li> <li>7. Desy Arista Prapitasari S.H</li> <li>8. Devina Ika Pratiwi, S.Psi</li> <li>9. Dian Lati Utami, S.Psi</li> <li>10. Elma Nur Hikmah, S.E</li> <li>11. Fahmi Yusuf S.I.A</li> <li>12. Mutiara Endah Cahyani, S.E</li> <li>13. Nimas Zaky Nabila, S.E</li> <li>14. Nirwana Ellen Nora, S.IP</li> <li>15. Rana Aulia, S.E</li> <li>16. Ratih Manggarsari, S.Psi</li> <li>17. Saadia Santi, S.E</li> <li>18. Siti Afifah, S.E</li> <li>19. Tutut Asmorowati, S.E</li> </ol>	E-learning dan PJJ
15.	Pelatihan Kapabilitas APIP K/L Mitra Kerja Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK	3	7	27 Maret s.d. 2 April 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asih Retno Sayekti, A.Md., S.Kom.</li> <li>2. Rino Adi Putro, S.H.</li> <li>4. Rini Yuniasih, A.Md.</li> </ol>	Hotel Padjajaran Bogor

16.	e-learning Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	3	12	28 Maret s.d. 8 April 2022 dan 11 s.d. 25 April 2022	1. Sarwadi 2. Lusi Handayani 3. Erwin	e-Learning
17.	Pelatihan Analisis Dasar Penganggaran Tahun 2022 dengan metode E-learning	1	4	4 s.d. 7 April 2022	1. Een Setia Suharjito, S.E., M.M.	e-Learning
18.	Pembelajaran Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran bagi Kementerian/Le mbaga	1	10	8 s.d. 22 April 2022	1. Nanih Kusnani	Pembelajaran Jarak Jauh
19.	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Tingkat Keahlian Angkatan I	1	18	8 Mei s.d. 7 Juni 2022	1. Inas Maisa, S.I.Kom.	Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning)
20.	Pembelajaran Mandiri Melalui Aplikasi Massive Open Online Course (MOOC) bagi CPNS	4	24	23 Mei s.d. 15 Juni 2022	1. Zaidal Bustomi, S.Kom. 2. Adhi Herlambang, S.A.P 3. Ida Bagus Mahayoga Raharja, S.H. 2. Lia Aulia Siringo-Ringo, A.Md.Ak	Massive Open Online Course (MOOC)
21.	Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Level Angkatan I	3	15	2 s.d. 16 Juni 2022	1. Dania Akhmad, S.E. 2. Cendikia Hazwir, S.E. 3. Davin Naufal Joviando, S.E.	Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning)
22.	Pelatihan E-learning dan Microlearning pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan melalui Kemenkeu learning Center Generasi Ke-2 (KLC-2) dengan metode tatap muka	4	10	6 s.d. 17 Juni 2022	1. Sarwadi, S.H., M.H. 2. Denny Darmawan, S.E., M.H. 3. Baneriyama, S.H., M.H. 3. Lusi Handayani, SE.,M.M.	Pembelajaran Jarak Jauh



23.	Pelatihan Dasar CPNS Angkatan XIV – XVIII Metode Pembelajaran Jarak Jauh	4	70	16 Juni s.d. 9 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zaidal Bustomi, S.Kom.</li> <li>2. Adhi Herlambang, S.A.P</li> <li>3. Ida Bagus Mahayoga Raharja, S.H.</li> <li>4. Lia Aulia Siringo-Ringo, A.Md.Ak</li> </ol>	Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning)
24.	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Risk Governance Professional (CRGP)	1	5	19 s.d. 23 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nanih Kusnani, S.Sos., M.Ak.</li> </ol>	Hotel Santika Bogor, Jawa Barat
25.	Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Risk Management Analyst (QRMA) Batch 5A	1	5	26 Juni s.d. 01 Juli 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agung Nugroho, S.Sos., M.H.</li> </ol>	Hotel Padjajaran, Bogor, Jawa Barat
26.	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Auditor IT	1	4	20 s.d. 23 Juni 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abdul Rokhman, A.Md., S.H.</li> </ol>	Padjadaran Hotel Bogor
27.	Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Muda di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM	7	17	E-learning 5 s.d. 14 Juli 2022 dan pembelajaran tatap 19 s.d. 29 Juli 2022;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bosar Immanuel, S.E.</li> <li>2. Chandra Julius Foster Manalu, S.E.</li> <li>3. Faisal Afifi, S.H.</li> <li>4. Firman Septa Firdaus, S.H.</li> <li>5. Jims Gunawan, S.E.</li> <li>6. Rino Adi Putro, S.H.</li> <li>7. Surya Narendra, S.H.</li> </ol>	Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning)
28.	Pelatihan Fungsional Analisis Kebijakan Angkatan I	1	18	08 Juli s.d. 02 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nurmalasari, S.H., M.H.</li> </ol>	Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning)
29.	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi PBJP Level 1	2	17	daring 15 s.d. 29 Juli 2022 dan tatap muka 31 Juli s.d 5 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suciati Kristiasari, S.AB.</li> <li>2. Indah Pertiwi, S.Psi.</li> </ol>	Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning) dan Hotel Mirah, Bogor, Jl. Pangrango No. 9A, Bogor
30.	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Government Accounting Associate (CGAA) Batch IV	1	5	17 s.d. 21 Juli 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cindy Claudia Sari, S.E.</li> </ol>	Hotel Permata Jalan Pajajaran No. 35 Bogor - Jawa Barat
31.	Pelatihan Keprotokoleran di Lingkungan Inspektorat Jenderal	20	1	26 Juli 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tri Darma Manulang, S.H.,M.H.</li> <li>2. Juanda Martua Usuluddin Nasution, S.H.</li> <li>3. Milanto Simanjuntak, S.E.</li> <li>4. Syahrizal Lubis, S.H., M.H.</li> <li>5. Parlindungan Donni, S.H.,M.H.</li> <li>6. Hardika Pratama Putra, S.H., M.E.</li> <li>7. Aman Agung Kurniawan, S.H., M.H.</li> <li>8. Andi Muhammad Taufik, S.H.,M.H.</li> <li>9. Raden Suryo Satrio Sularso, A.Md., Im.</li> <li>10. Yoga Dwi Putra Permana, A.Md.P., S.P., S.Tr.Pas</li> </ol>	Auditorium Inspektorat Jenderal Lantai 16

					<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Setio Utomo Priono, A.Md., Im.</li> <li>12. Fitri Ayu Wulandari, A.Md.</li> <li>13. Rifan Wahyu Permana, S.Sos.</li> <li>14. Robi Rolis Saputra, S.E.</li> <li>15. Gunawan Budiharto, S.E., M.M.</li> <li>16. August Dio Al Fath, A.Md.</li> <li>17. Dara Puspitasari, S.Hub.Int.</li> <li>18. Doni Aji Saputro</li> <li>19. Fiqih Utama, A.Md.P</li> <li>20. Ratih Manggarsari, S. Psi.</li> </ol>	
32.	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Government Accounting Associate (CGAA) Batch V	2	5	31 Juli s.d. 04 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Titut Sulistyaningsih, S.E.,M.Si.</li> <li>2. Agung Pambudi Kurniawan</li> </ol>	Hotel Padjajaran Pajajaran No. 17 Bogor
33.	Pelatihan Audit Jasa Konstruksi	27	5	8 s.d. 12 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. M.H. Kesuma Negara, S.H., M.M.</li> <li>2. DR. Indra Jaya Ali, S.E., M.Si</li> <li>3. Nopalisa Egitulas Vembilan, S.Kom., M.Msi.</li> <li>4. Siti Sofiatun, S.E., M.Si.</li> <li>5. Dwi Ari Wibowo, SH., M.M.</li> <li>6. Fandyla Wahyu Sasongko, S.H., M.Si.</li> <li>7. Iqbal Albert Husin, Sh., M.Kn., M.Si</li> <li>8. Agung Natanael, S.H., M.H.</li> <li>9. Ardiles Ricky Susilo, Sh., Mh</li> <li>10. Hari Purwanto, A.Md., S.E., M.Si.</li> <li>11. Eka Setyawati, S.H., M.H.</li> <li>12. Petrus Moko Handoko, S.E., M.S.M.</li> <li>13. Adi Priyo Pratomo, S.H., M.H.</li> <li>14. Edy Prabowo Saputro, S.Kom, M.Si</li> <li>15. Indra Saputra, S.H.</li> <li>16. Neni Ayuni, S.H.</li> <li>17. Ade Kurniawan, S.E., M.M</li> <li>18. Tyas Setyaningrum, S.H.</li> <li>19. Helmy Ahirul Apriandi, S.H.</li> <li>20. Muhammad Catur Sugiharto, S.H.</li> <li>21. Sandra Nur Fitri, S.Akun.</li> <li>22. Abdul Rokhman, A.Md., S.H.</li> <li>23. Agil Fahlefi, S.A.P.</li> <li>24. Hafidz Zulkarnain, S.Kom.,M.M.</li> <li>25. Muh Fatchul Ulum, S.E.</li> <li>26. Zein Ihya Ulumuddin, S.Ap.</li> <li>3. Heriyanto Tri Ratmoko, A.Md.</li> </ol>	Cahaya Village Hotel and Resort, Jalan Raya Cibogo Puncak Nomor 2 Cipayung Datar, Megamendung, Bogor, Jawa Barat



34.	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIII	1	90	10 Agustus s.d. 03 Desember 2022	1. Titut Sulistyarningsih, S.E.,M.Si	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
35.	Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Muda di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM	1	17	E-learning 10 Agustus s.d. 18 Agustus 2022 dan pembelajaran tatap muka 24 Agustus s.d. 3 September 2022	1. Efi Handayani, S.H.	Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning)
36.	Pelatihan Reformasi Birokrasi Metode e-Learning Angkatan XIX – XXII	3	6	19 s.d. 26 Agustus 2022	1. Zaidal Bustomi, S.Kom. 2. Adhi Herlambang, S.A.P 2. Ida Bagus Mahayoga Raharja, S.H.	Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning)
37.	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Government Accounting Associate (CGAA) Batch 8	3	5	21 s.d 25 Agustus 2022	1. Emmania Novada Sudarno, S.E. 2. Siti Fatimah, S.E. 3. Andi Trias Aryanto, S.M.	Hotel Pajajaran No. 17, Warung Jambu Kota Bogor - Jawa Barat
38.	Pembelajaran E-Learning Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan IX	2	7	22 s.d. 30 Agustus 2022	1. Achmad Syukri Hidayat, A.Md. 2. Henny Erfina Mariana, S.H.	Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning)
39.	Pelatihan Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar Metode e-Learning	4	6	26 Agustus 2022 s.d.2 September 2022	1. Rifan Wahyu Permana, S.Sos. 2. August Dio Al Fath, A.Md. 3. Nisa Amelina, A.Md. 4. Kurnia Putri Natalia Lumbantoruan, A.Md.	Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning)
40.	Diklat Auditor TIK	2	5	12 s.d. 16 September 2022	1. Suciati Kristiasari, S.AB. 2. Agil Fahlefi, S.A.P.	Hotel Pajajaran No. 17, Warung Jambu Kota Bogor
41.	Pelatihan Administrasi Perkantoran Tingkat Lanjutan Metode e-Learning	2	6	23 s.d. 30 September 2022	1. Anggit Sri Rahayu, S.E. 3. Ridha Faridha Djoyo, S.E.	E-learning
42.	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Government Accounting Expert (CGAE) Batch IV	2	5	25 s.d. 29 September 2022	1. Elychia Roly Putri, S.E. 2. Sandra Nur Fitri, S.Akun.	The Mirah Hotel Jl. Pangrango No. 9A Kota Bogor - Jawa Barat
43.	Pelatihan Fungsional Penjenjangan Auditor Ahli Madya	4	14	26 September s.d. 19 Oktober 2022	1. Agus Priyo Atmoko, A.Md., S.E., M.H. 2. Niken Ayu Kusumaningpuri, S.H.,M.H 3. Tessa Leo Marlino, S.H., M.H.	Blended Learning

					4. Zaifachatur Roziyah, S.H., M.Si.	
44.	Pelatihan Pelayanan Publik Tingkat Dasar Metode e-Learning Angkatan XV-XXVII	2	5	21 s.d. 27 Oktober 2022	1. Brahmantya Puji Kurniariadi, S.E., M.H. 2. Inas Maisa, S.I.Kom.	e-Learning
45.	Pelatihan Fungsional Penjurangan Auditor Ahli Madya	5	14	7 s.d. 15 November 2022 (e-learning) dan 21 s.d. 28 November 2022 (tatap muka)	1. Puji Raharto, S.Ip., M.M. 2. Bambang Purwantho, S.H., M.Si 3. Eka Setyawati, S.H., M.H. 4. Edy Prabowo Saputro, S.Kom, M.Si 5. Nasrudin Nurdiansyah, S.H., M.Si.	Blended Learning

### b) Rekap kegiatan Aktif Belajar

Adapun rekap kegiatan Aktif Belajar selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.49  
(Rekap Kegiatan Aktif Belajar Tahun 2022)

No.	JADWAL AKTIF BELAJAR 2022		
	Tanggal	Materi	Narasumber
<b>Februari</b>			
1	17-Feb-22	Remote Audit	Ma'aruf Hidayat, S.ST. Akt., M.Sc ( Auditor Muda BPKP)
2	18-Feb-22	Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Tender Dini (Pra-DIPA) Pengadaan Bahan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan	M. Qadr Siddiq Zam LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa)
<b>Maret</b>			
3	01-Mar-22	Implementasi SPIP Terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM (Evaluasi Hasil, Penilaian Mandiri dan Penjamin Kualitas)	Ikhwan Mulyawan, Ak (Auditor Muda BPKP) (Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum)
4	02-Mar-22	Tata Cara Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran	Tri Budhianto, S.P., M.T ( Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan)
<b>April</b>			
5	04-Apr-22	Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik untuk Mendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Junaidi Sinaga (Analisis Kebijakan Kedeputian Pelayanan Publik Kemenpan RB)
6	05-Apr-22	Audit Investigatif	Panut, Ak., M.Si, CA, CRMP, CFA, CFE, CGCAE (selaku Koordinator Investigasi K/L/PD/BU/BL II - Direktorat Investigasi II, Deputi Bidang Investigasi) BPKP
<b>Mei</b>			
7	12-Mei-22	Isu perubahan/regulasi terkait Administrasi Hukum Umum	Sri Yuliani (Direktur Teknologi Informasi Ditjen AHU)
8	13-Mei-22	Evaluasi Manajemen Resiko	Dr. Dedhi Suharto, Ak., M.Ak., CIA, CISA, CA, CSOX (Auditor Ahli Madya Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan) Itjen Kemenkeu



Juni			
9	13-Jun-22	Gratifikasi	Yulianto Saptoprasetyo (Satgas 1 Dit Sosialisasi dan Kampanye Komisi Pemberantasan Korupsi) KPK
10	14-Mei-22	Nanang Qosim (Nakoy)	Nakoy ( Nanang Qosim Y)
Juli			
11	05-Jul-22	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Firmansyah (Kemenpan RB)
12	06-Jul-22	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Akbar Ferdiansyah (Kemenpan RB)
Agustus			
13	03-Agu-22	Penanganan Overstay Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Halinar (Hp, Pungli Dan Narkoba) Pada Lapas Dan Rutan	Muhamad Dwi Sarwono, Bc.Ip., SH., M.Si (Ditjen Pemasyarakatan)
14	04-Agu-22	Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) pada Pengadaan Barang Produk Dalam Negeri dan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas	Kementerian Keuangan
September			
15	07-Sep-22	Sistem Monitoring Evaluasi Kinerja Terpadu	Edwar Agustin, S.H., M.M (Kepala Seksi Evaluasi Kinerja bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) Direktorat Sistem Penganggaran DJA (Direktorat Jenderal Anggaran)
16	08-Sep-22	Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran	Lely Yalestiarini, S.Kom., MBA (Kepala Seksi Pelaksanaan Anggaran III C) Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPb (Direktorat Jenderal Perbendaharaan)
Oktober			
17	10-Okt-22	Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara	Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (Jumitro Situmorang, S.Sos. MAP)
18	11-Okt-22	Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara	Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
November			
17	23-Nov-22	Implementasi SDP dalam Mendukung Audit Kinerja atas Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
18	24-Nov-22	Pemanfaatan Penelusuran Rekam Jejak Digital Sebagai Bukti Audit	KPK
Desember			
17	05-Des-22	Penerapan Kerangka Integritas	R.Patrick Wahyudwisaksono S.E., M.Ak., CPM, CIO, CRMP (Kementerian Keuangan)
18	06-Des-22	Audit atas Pengadaan Jasa Konstruksi Gedung Bangunan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

### c) Rekapitulasi Pelaksanaan Workshop

Adapun rekap kegiatan *Workshop* dan Pelatihan Kantor Sendiri selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.50  
(Rekap Kegiatan Workshop Tahun 2022)

No.	Tanggal Pelaksanaan	Materi	Keterangan
<b>WORKSHOP</b>			
1.	14 Februari 2022	Kiat-Kiat Peningkatan Nilai Komponen Pengungkit dalam Rangka PMPRB Kemenkumham Tahun 2022	Narasumber: Akhmad Hasmy (KemenPAN-RB) Moderator: Eka Setyawati
2.	1 Maret 2022	Persiapan Pendampingan Manajemen Risiko pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Narasumber: Dennis Yudokusilo, Syamsun Nadzor (Kemenkeu) Moderator: Zaifachatur Roziyah, Nurul Dwi Hastuti
3.	4 Maret 2022	Teknik Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM	Narasumber: Agus Sukiswo (BPKP) Moderator: Indra Jaya Ali
4.	9 s.d. 10 Maret 2022	Sosialisasi Pengisian dan Penilaian LKE Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022.	Narasumber: Doktor Gurning Moderator: Kiki
5.	26 April 2022	Peningkatan Kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan HAM Menuju Level 4	Narasumber: Dyah Sulistyowati (BPKP) Moderator: M.H. Kesuma Negara
6.	28 April 2022	Persiapan Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Secara Berjenjang Melalui Aplikasi ERB Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Narasumber: Doktor Gurning Moderator: Edy Prabowo
7.	18 Mei 2022	Persiapan Evaluasi TPI Atas Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022	Narasumber: Doktor Gurning Moderator: Dewi Ayu Nurmalarari
8.	19 Mei 2022	Administrator Aplikasi SIMWAS Inspektorat Jenderal Versi 3.0 dan SIPIDU pada Unit Utama dan Pusdatin	Narasumber: Brahmantya Puji, Nurmalarari Moderator: Wahyu Setiawan
9.	23 September 2022	Internalisasi Audit Teknologi Informasi	Narasumber: Andrari Grahitudaru, Wardatul Hanifah, Danang Jaya (BRIN) Moderator: Iqbal Albert Husin
10.	6 Oktober 2022	Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara TA 2024	Narasumber: Yufendriansyah Auriga, Erditama Geri Hutomo (Kemenkeu) Moderator: Andriyanto W.P.
<b>PELATIHAN KANTOR SENDIRI</b>			
11.	2 Maret 2022	Implementasi PermenPAN-RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional	Narasumber: Aba Subagja (KemenPAN-RB), Sri Gantini (BKN) Moderator: Muhamad Mufid
12.	22 Maret 2022	1. Teknis Penulisan Jurnalistik ( <i>Hard News</i> , <i>Soft News</i> , dan Teknik Wawancara) Teknik Fotografi Berita	Narasumber: M. Iskandar Zulkarnain (Beritabuana.co), Lucky Savor (UBK) Moderator: Muhamad Mufid
13.	10 Mei 2022	Penilaian Mandiri Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Narasumber: Desmarwita (KemenPAN-RB), Rahmi Widhiyanti (Biro Perencanaan) Moderator: Rani Octariani
14.	6 September 2022	Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Narasumber: M. Fahrullah Moderator: Jims Gunawan



**d) Rekapitulasi Diklat Pembentukan/PIMTI**

Tabel 3.50

(Rekap Diklat Pembentukan/Pimti Tahun 2022)

No	Jabatan	Eksisting	Lulus Diklat PIM/Pembentukan
1	Pimpinan Tinggi Madya	1	1
2	Pimpinan Tinggi Pratama	6	6
3	Pejabat Administrator	2	2
4	Pejabat Pengawas	8	8
5	Pejabat Fungsional Auditor	165	164
6	Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian	8	4
7	Pejabat Fungsional Arsiparis	6	5
8	Pejabat Fungsional Pranata Komputer	4	1
9	Pejabat Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	4	0
10	Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan	1	1
11	Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat	2	1
12	Pejabat Fungsional Analisis Anggaran	1	0
13	Pejabat Fungsional Analisis Hukum	4	0
14	Pejabat Fungsional Perencana	1	0
15	Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa	3	3
16	Pejabat Pelaksana	57	0
17	CPNS	4	0
<b>Total</b>		<b>277 Orang</b>	<b>197 Orang</b>
<b>Presentase</b>			<b>71.12 %</b>

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2022 merupakan laporan pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal selama 1 (satu) tahun anggaran yang berisikan program dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai APIP di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait serta mampu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan tentang kinerja Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan disusunnya laporan ini diharapkan juga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### A. Kesimpulan

Bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Unit Inspektorat Jenderal Tahun 2022 menyajikan:

- 1) LKjIP Inspektorat Jenderal Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Program Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diaman oleh Inspektorat Jenderal Tahun 2022 atas Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal yang terdiri dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama.
- 2) Dasar hukum penyusunan LKIP meliputi:
  - a) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - b) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Palaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - d) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
  - e) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2021 tentang Organisasi Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional;



- f) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-07.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Tujuan dan sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM;
  - g) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-08.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Manual Indikator Kinerja Kementerian Hukum dan HAM.
  - h) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021-2024.
- 3) Sistematika penyajian LKjIP Inspektorat Jenderal Tahun 2022 meliputi:
- a) **KATA PENGANTAR**  
Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022.
  - b) **IKHTISAR EKSEKUTIF**  
Menyajikan ringkasan mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2022.
  - c) **BAB I. PENDAHULUAN**  
Menyajikan secara singkat latar belakang dasar pembentukan organisasi, tugas dan fungsi, aspek strategis, permasalahan utama, struktur organisasi, arah kebijakan, sumber daya manusia, dan sistematika penulisan.
  - d) **Bab II. PERENCANAAN KINERJA**  
Menyajikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021, meliputi Rencana Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Strategi Tahun 2022.
  - e) **Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA**  
Menyajikan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja Tahun 2022, analisis capaian kinerja Tahun 2022 per-indikator dengan membandingkan capaian tahun sebelumnya, perbandingan dengan K/L lain dan perbandingan dengan capaian target RPJMN ke IV Tahun 2020 s.d. 2024, Realisasi Anggaran, Capaian Kinerja Anggaran, dan Capaian Kinerja Lainnya termasuk hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil.

f) Bab IV. PENUTUP

- 4) Pada Tahun 2022, Inspektorat Jenderal berhasil mencapai hampir seluruh Target pada Tahun 2022, kecuali pada Indikator Kinerja Utama -4 yaitu Persentase Satuan Kerja dengan Nilai RB “Baik” dikarenakan masih terdapat 1 Unit Eselon I dengan nilai dibawah 33,5 sehingga capaian 90,9% dari target 93%.
- 5) Inspektorat Jenderal mengelola anggaran sebesar Rp60.225.500.000 (Revisi ke-XI) dan terealisasi sebesar Rp59.395.876.035 atau 98,62%.
- 6) Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Inspektorat Jenderal baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya sarana dan prasarana, dengan meningkatkan koordinasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta Instansi terkait lainnya.

**B. Saran**

- 1) Komitmen dan dukungan Pimpinan sangat diperlukan untuk meningkatkan Kinerja Inspektorat Jenderal lebih PASTI.
- 2) Kerjasama yang solid sangat diperlukan terutama diinternal Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan seluruh kegiatan.
- 3) Peningkatan internalisasi tata nilai Kementerian Hukum dan HAM dan rasa memiliki, rasa tanggung jawab atas tugas, fungsi dan keberhasilan kinerja Inspektorat Jenderal untuk mendukung keberhasilan kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Tahun yang akan datang.
- 4) Penyusunan PKPT berbasis risiko untuk selanjutnya dapat diterapkan pada Tahun Anggaran 2023 dalam penentuan Satuan Kerja pengawasan, dengan mengoptimalkan register risiko yang ada dalam dokumen Manajemen Risiko pada Kementerian Hukum dan HAM serta pada Satuan Kerja.
- 5) Bahwa ketidaksesuaian nilai capaian dan target merupakan akibat dari kendala-kendala tersebut diatas, sehingga dalam hal ini Inspektorat Jenderal menyajikan data capaian dengan penjelasan serta perhitungan sesuai kondisi sebagai capaian dalam dokumen Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022.
- 6) Diperlukan perumusan anggaran yang mengutamakan alokasi anggaran untuk tugas dan fungsi utama Inspektorat Jenderal selaku APIP sebelum melaksanakan tugas *mandatory* dari Kementerian/ Lembaga lain.



- 7) Sehubungan dengan pembatasan Satuan Kerja yang dapat diusulkan untuk memperoleh predikat WBK/WBBM dan berkurangnya Satuan Kerja yang berhasil memperoleh predikat tersebut, agar Inspektorat Jenderal selaku TPI dapat meningkatkan koordinasi dengan TPN dalam rangka memperoleh data berupa indikator penilaian untuk perbaikan dimasa mendatang.
- 8) Sehubungan dengan belum keluarnya nilai dari BPKP terkait SPIP dan Kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan HAM, agar dapat meningkatkan koordinasi dan pemenuhan data untuk masing-masing indikator yang masih kurang atau perlu perbaikan.
- 9) Sehubungan dengan adanya target pada Tahun 2022 yang tidak tercapai, agar selanjutnya melaksanakan monitoring dan evaluasi perbaikan secara berkala atas pelaksanaan kinerja serta melakukan upaya-upaya penguatan untuk mencapai kinerja tersebut.